2024| DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

Jl. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk

Telp / Fax : 0358-325200

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024. Setiap Pimpinan dan/atau Pejabat Struktural di Lingkungan Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab dan memerintahkan kepada pejabat dan/atau pejabat fungsional umum untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan.

Pelaporan Kineja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setia pengguna anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagai mana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Nganjuk, 7 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Derah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Permenpan Nomo 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 08);

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja digambarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi :

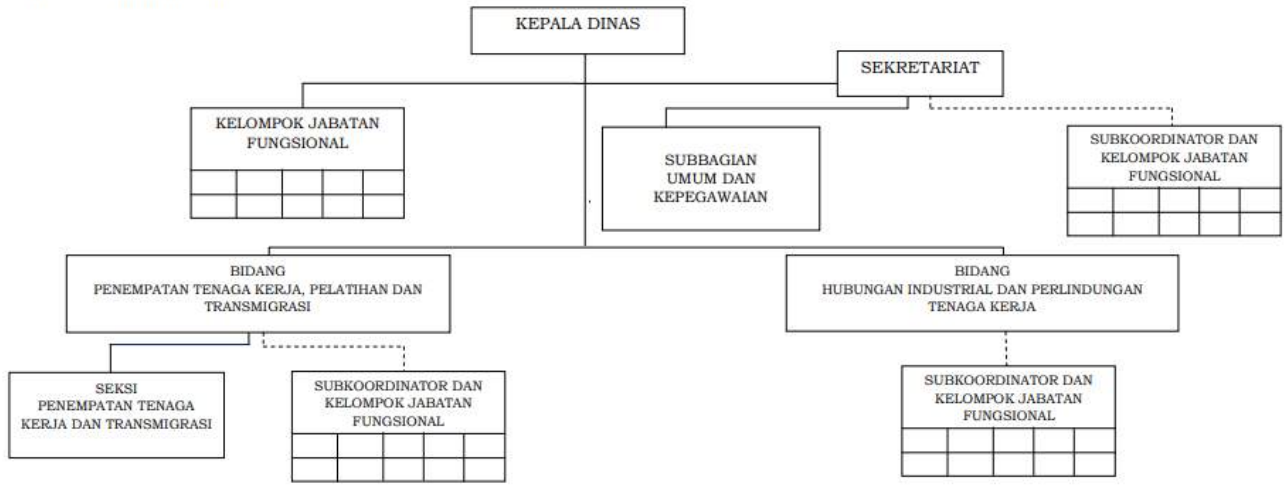
1. Sekretariat terdiri dari :
   a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b) Perencana Ahli Muda
   c) Analis Keuangan Pusat dan Daerah
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi terdiri dari :
   a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   b) Pengantar Kerja Ahli Muda
3. Bidang Hubungan Industral dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
   a) Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda

Susunan organisasi sebagaimana tersebut diatas digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut :

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA

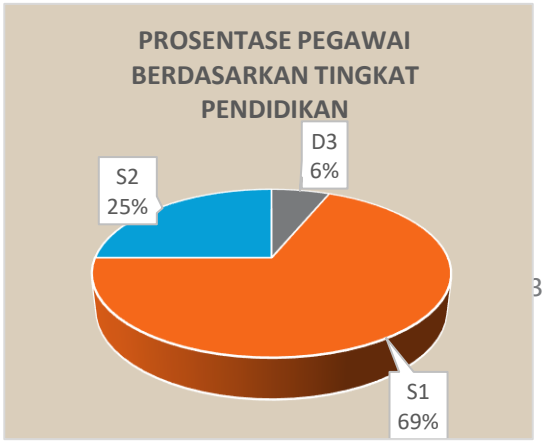
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

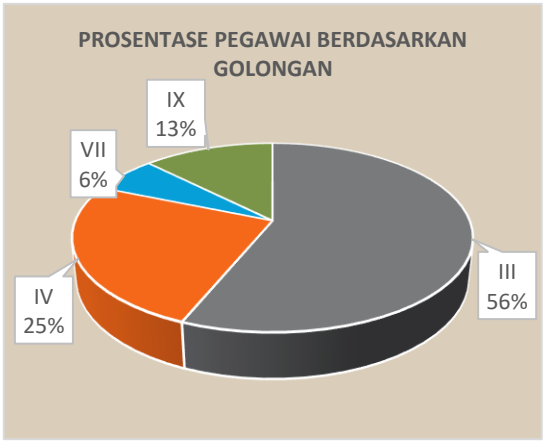


1.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 16 (enam belas) orang dengan persentase dan rincian sebagai berikut :

1. Prosentase Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Dan Golongan





Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat pendidikan pegawai terbesar ada pada jenjang S-1 sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar sebesar 69%, sedangkan persentase pegawai berdasar golongan terbesar ada pada Golongan III sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 56% di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

2. Rincian Pegawai Berdasar Jabatan Struktural/Fungsional dan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1

Pegawai Berdasar Jabatan Struktural/Fungsional dan Jenjang Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Samsul Huda, SH., MH NIP. 19660810 199203 1 011	Plt. Kepala Dinas	IV/c	S-2
	Sekretariat			
2	Suwanto, SH, MH NIP. 19810106 200604 1 010	Plt. Sekretaris	IV/a	S-2
3	Wahyuni Sulistyo, S.KM NIP. 19820314 200501 2 010	Subbagian Umum dan Kepegawaian	III/d	S-1
4	Sri Utami, S.Sos NIP. 19730424 199503 2 003	Perencana Ahli Muda	III/d	S-1
5	Ujiana Wahyuni, SS NIP. 19860709 201101 2 007	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	III/d	S-1
6	Sriyani, SH NIP. 19670415 200701 2 035	Pengadministrasi Umum	III/a	S-1
7	Alfan Dwi Putranto, S.Sos NIP. 19800507 201001 1 005	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	III/b	S-1
8	Fitria Asmarani, A.Md NIP. 19780513 202421 2 001	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	VII	D-3

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
9	Ninuk Siwi Suhartati, SH NIP. 19680130 200604 2 004	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Pelatihan dan Transmigrasi	III/d	S-1
10	Titik Purwani, S.Sos NIP. 19740215 199803 2 004	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	III/c	S-1
11	Sean Fitria Rohmawati L, S.AP NIP. 19911109 202012 2 007	Analis Data dan kerjasama Pemasyarakatan	III/a	S-1
12	Siti Aminah, AMK., SKM NIP. 19710827 199503 2 005	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	III/d	S-1
13	Indarti, SE NIP. 19800113 202421 2 002	Pengantar Kerja Ahli Pertama	IX	S-1
14	Agus Salim, S.Sos NIP. 19700201 202421 1 001	Pengantar Kerja Ahli Pertama	IX	S-1
	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			
15	Suwanto, SH, MH NIP. 19810106 200604 1 010	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	IV/a	S-2
16	Deky Nurmansyah, SH, MH NIP. 19831007 200903 1 004	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	IV/a	S-2

1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik sebagai pendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Gedung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk dengan luasan 4.157 m2. Selain Ruang Gedung Utama untuk kantor di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terdapat pula Ruang Aula Pertemuan yang mampu menampung 100 (orang) peserta rapat, sehingga keberadaan sarana fisik berupa gedung perkantoran dirasa cukup memadai untuk pelaksanaan tugas sehari – hari.

Prasarana lain berupa penerangan listrik telah memiliki instalasi tersendiri sehingga penggunaan listrik sudah memadai, juga dengan prasarana komunikasi berupa telepon/faximili sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk prasarana jaringan internet yang sudah terjangkau oleh internet dari Diskominfo sehingga memudahkan pelayanan bidang penempatan tenaga kerja.

Prasarana mesin ketik komputer/printer yang ada kurang memadai dengan kebutuhan yang diperlukan baik jumlah maupun keadaan komputer tersebut, sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap. Hal serupa juga terjadi pada sarana meubelair yang memerlukan penambahan rak serta perbaikan.

Prasarana tanah yang ada sebanyak 1 bidang, alat angkutan sebanyak 22 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 311 unit, alat studio komunikasi dan pemancar sebanyak 8 unit, alat komputer sebanyak 86 unit, bangunan gedung sebanyak 12 unit, tugu titik kontrol/pasti sebanyak 3 buah serta instalasi jaringan listrik sebanyak 3 titik dengan nilai total aset sebesar Rp. 3.029.116.155.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk merupakan institusi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menangani urusan tenaga kerja. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja meliputi:

TUGAS POKOK :

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu:

"Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja."

FUNGSI :

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **KEPALA DINAS**

  Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

  a. Sekretariat

     Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

     Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

     1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
     2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
     3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
     4. Pembinaan aparatur;
     5. Pengelolaan urusan kepegawaian;

6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan di subbag umum berdasarkan rencana operasional yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbag umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian arsip dan ekspedisi sesuai dengan perosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan pengolahan surat menyurat dan tata usaha, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barag peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
7. Melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbag umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

❖ Perencana (Ahli Muda)

Perencana (Ahli Muda) mempunyai tugas :

1. Menformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif model hubungan kausal / fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral.
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional.
9. Menyususn perencanaan program dan kegiatan sektoral.
10. Menyususn rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan.
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral regional proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.
12. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

❖ Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;

2. Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, dan geografis;
3. Malakukan kajian teknis mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasaran, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
4. Melakukan persuasi kebijakan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
5. Melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
6. Menyusun makalah mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan

prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;

b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi

Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis menyelenggrakan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja dan tranmsigrasi kepada masyarakat;
2. pengoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
3. pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta dan transmigrasi kepada masyarakat;
4. pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dan syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat;
5. pengoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan;
6. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi pencari kerja dan transmigrasi;
7. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;
8. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja bagi PMI;
9. pengoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama dan purna penempatan;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemulangan dan kepulangan PMI;
11. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;

12. pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja di daerah;
13. pengoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan;
14. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
15. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
16. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas antara lain :

1. Seksi Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas: merumuskan kebijakan teknis di Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
4. memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga penempatan kerja swasta;
5. menyelenggarakan unit pendaftaran penerimaan dan penempatan calon PMI yang rekruter;
6. memberikan rekomendasi paspor PMI;
7. menyelenggarakan pemberdayaan PMI purna penempatan;
8. melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi transmigran;
9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
10. menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan daerah penerima berkaitan dengan penempatan lokasi;
11. melaksanakan fasilitas dokumen–dokumen kependudukan bagi para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;

12. monitoring dan evaluasi tranmsigran paska penempatan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Pengantar Kerja (Ahli muda)

Pengantar Kerja (Ahli Muda) mempunyai tugas :

1. Mengidentifikasi sumber daya pelayanan antar kerja;
2. Melakukan layanan analisis jabatan lanjutan;
3. Menganalisis informasi pasar kerja;
4. Melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-PHK / disabilitas / lansia/ orang tua siswa / kelompok masyarakat;
5. Menyusun struktur biaya penempatan Pejkerja Migran Indonesia;
6. Megevaluasi substansi perjanjian kerjasama / kemitraan pelayanan antar kerja;
7. Mensosialisasikan program / kegiatan pelayanan antar kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
8. Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja;
9. Melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan;
10. Melakukan rekruitmen calon tenaga kerja untuk penempatan;
11. Melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan;
12. Menganalisa dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
13. Menganalisis dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
14. Menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga kerja;
15. Melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja;
16. Melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
17. Mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
18. Melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam / luar negeri;
19. Melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;

20. Melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara daring;
21. Melakukan validasi dan analisis permohonan pengesahan / pencabutan / perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
22. Menganalisis hasil pemantauan penggunaan TKA;
23. Menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping;
24. Menganalisis kelayakan permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan (ekspose);
25. Memverifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
26. Menyusun rekomendasi sertifikat standart atas permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
27. Menyusun konsep penolakan permintaan kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
28. Melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan / bursa kerja layak;
29. Memantau pelayanan antar kerja;
30. Mengevaluasi kerja sama / kemitraan pelayanan antar kerja.

c. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan tugas:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
2. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda)

Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda) mempunyai tugas :

1. Melakukan penilaian hubungan industrial di perusahaan;
2. Menyusun peta hubungan industrial Kabupaten/Kota;
3. Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana hubungan industrial di perusahaan;
4. Merumuskan strategi pencegahan dan penanganan diskriminasi di tempat kerja;
5. Mengidentifikasi kepesertaan program jaminan sosial;
6. Menyusun profil tenaga penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan;
7. Menganalisis sistem pengupahan;
8. Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;
9. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan sarana hubungan industrial di perusahaan;
10. Melakukan pembimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
11. Melakukan pembimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
12. Melakukan pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di perusahaan;
13. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan fasilitasi kesejahtraan pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
14. Melakukan pembimbingan penerapan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial dan / atau penahapan kepesertaan;
15. Melakukan pembimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

16. Melakukan pembimbingan mekanisme penanganan mogok kerja atau penutupan perusahaan;
17. Melakukan verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di perusahaan;
18. Melakukan deteksi dini di perusahaan;
19. Melakukan layanan konseling teknis hubungan industrial tingkat lanjut;
20. Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat atau instansi terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah;
21. Melakukan pendampingan kinerja lembaga tripartit;
22. Melakukan validasi data calon anggota lembaga hubungan industrial;
23. Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat menengah;
24. Menyusun naskah penyebarluasan informasi hubungan industrial bagi kepentingan satuan kerja atau instansi;
25. Mereviu penyelenggaraan sarana hubungan industrial di perusahaan;
26. Mereviu penyelenggaraan program jaminan sosial;
27. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme perlindungan bipartit;
28. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial;
29. Mengevaluasi penerapan anti-deskriminasi;
30. Mengevaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan, atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;
31. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
32. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
33. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
34. Menyusun telaahan bidang hubungan industrial tingkat I (satu);
35. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;
36. Melakukan mediasi perselisihan kepentingan tingkat sedang;
37. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang
38. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;

39. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
40. Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat sedang dalam bentuk perjanjian bersama;
41. Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat menengah;
42. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan tindak lanjutnya;
43. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui mediasi atau konsolidasi dan tindak lanutnya;
44. Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui arbitrase dan tindak lanjutnya;
45. Melakukan supervisi hasil mediasi pencegahan mogok kerja penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya;
46. Melakukan supervisi dan layanan penyelesaian hak pasca kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan arbiter / pengadilan hubungan industrial.

D. ISU-ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi

terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, maka isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya angka pengangguran karena penempatan pencari kerja di pasar kerja belum optimal dan pertumbuhan lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding
2. Masih cukup rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja sehingga tidak dapat bersaing di bursa kerja dan biaya operasional tinggi karena mahalnya biaya untuk uji kompetensi
3. Masih rendahnya derajat kesejahteraan pekerja dikarenakan banyaknya perusahaan yang belum menerapkan Upah Minimum Kabupaten

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

a. Gambaran umum/Latar belakang
b. Landasan Hukum
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
d. Isu-isu Strategis (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi
e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

a. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang Bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi
    1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)
    2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun sebelumnya
    3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standart Nasional (Minamal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Indikator Kinerja Utama (IKU)
3) Keadaan Ketenagakerjaan dari BPS Kabupaten Nganjuk
4) Laporan Triwulan 1, 2, 3 dan 4
5) Ikhtisar DPA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR RENCANA STRATEGIS

1. TUJUAN

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk merumuskan tujuan sebagai berikut :

"***Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja***"

Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk menggunakan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2. SASARAN

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja;
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.

Sasaran yang hendak dicapai tersebut menggunakan indicator sebagai berikut :

1. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan;
2. Persentase Kasus Perselisihan HI yang diselesaikan di luar Pengadilan.

3. STRATEGI

Strategi yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasarana dalam sebagai berikut :

1) Peningkatan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
2) Peningkatan persentase kasus perselisihan HI yang diselesaikan diluar Pengadilan.

4. ARAH KEBIJAKAN

Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
2) Meningkatkan pembinaan terhadap kualitas Lembaga Pelatihan Kerja;
3) Meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
4) Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur bagi masyarakat setengah penganggur;
5) Mengoptimalkan penempatan calon transmigran;
6) Optimalisasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan norma dan syarat kerja secara berkelanjutan;
7) Optimalisasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan;
8) Memberdayakan Lembaga Kerja Sama Bipartit di tiap - tiapPerusahaan sebagai salah satu sarana hubungan industrial dalam rangka menjalin komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan pekerja.

Adapun Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya perluasana kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Peningkatan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatkan pembinaan terhadap kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	
			Meningkatkan penempatan angkatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya insfrastuktur bagi masyarakat setengah menganggur	
			Mengoptimalkan penempatan calon transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Meningkatnya hubungan	Peningkatan Persentase Kasus	Optimalisasi penyelesaian perselelisihan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	industrial yang harmonis	Perselisihan HI yang diselesaikan diluar Pengadilan	Pembinaan norma dan syarat kerja secara berkelanjutan	
			Optimalisasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan	
			Memberdayakan Lembaga Kerja Sama Bipartit di tiap – tiap perusahaan sebagai salah satu sarana hubungan idustrial dalam rangka menjalin komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan pekerja	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 - 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 (lima) tahun menyesuaikan dokumen Renstra OPD serta RPD Pemerintah Kabupaten Nganjuk. IKU tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai suatu acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan	Formula Perhitungan	Target
1.	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum angkatan\ kerja}{\sum penduduk\ usia\ kerja}$ x 100%	67,50%

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan	Formula Perhitungan	Target
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum pencari\ kerja\ terdaftar\ yang\ ditempatkan}{\sum pencari\ kerja\ terdaftar}$ x 100%	83%
3.	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	$\frac{\sum perselisihan\ hubungan\ industrial\ yang\ selesai\ diluar\ pengadilan}{\sum perselisihan\ hubungan\ industrial\ tercatat}$ x 100%	90%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 dan diperjanjikan dalam suatu bentuk Perjanjian Kinerja pada tiap jabatan.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk telah dijabarkan dalam lampiran perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%

2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaian diluar pengadilan	90%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.486.008.952,00	DAU
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 126.800.000,00	DAU
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.032.241.750,00	DAU
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 475.790.000,00	DAU
5	Program Hubungan Industrial	Rp. 456.366.050,00	DAU
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 11.350.000,00	DAU

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa dalam proses seiring perjalanan waktu telah terjadi beberapa perubahan APBD anatar lain :

- Perubahan APBD I :
    1. Mendapat tambahan anggaran pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dari Sumber dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) sebesar Rp. 1.526.458.200,- pada subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan. Selain itu pada Program Penempatan Tenaga Kerja juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 177.012.700,- pada subkegiatan Job Fair
    2. Mendapat tambahan anggaran pada Program Penempatan Tenaga Kerja dari Sumber dana DIF (Dana Insentif Fiskal) sebesar Rp. 709.476.250,- pada subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
- Perubahan APBD II
    1. Mendapat tambahan anggaran pada Program Penempatan Tenaga Kerja dari Sumber dana DIF (Dana Insentif Fiskal) sebesar Rp. 300.000.000,- pada subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
- Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
    1. Mendapat tambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 428.517.150,- terbagi menjadi beberapa subkegiatan antara lain :
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 115.991.000,-

- Penyediaan Komponen Instlalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 250.000,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 2.250.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 46.450.000,-
- Pengadaan Mebel sebesar Rp. 46.153.950,-
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 45.382.200,-
- Penyediaan Surat Menyurat sebesar Rp. 1.390.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 13.650.000
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor sebesar Rp. 157.000.000,-

2. Mendapat tambahan anggaran pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dari Sumber dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) sebesar Rp. 1.010.415.550,- pada subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan.
3. Mendapat tambahan anggaran pada Program Penempatan Tenaga Kerja dari Sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 49.900.000,- pada subkegiatan Penyediaan Sumberdaya Pelayanan Antar kerja
4. Mendapat tambahan anggaran pada Program Hubungan Industrial dari sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 559.925.200,- pada subkegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5. Pergeseran anggaran dari subkegiatan bantuan permodalam dalam bentuk uang saku menjadi sub kegiatan pendampingan dari kabupaten/kota sampai ke lokasi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk bantuan uang saku untuk transmigran yang akan diberangkatkan ke lokasi transmigrasi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan dalam mencapai tujuan serta sasaran periode yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*) atau tingkat capaian program sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
91 ≥	Sangat Tinggi
76≤90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

A.1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pencapaian kinerja terkait dengan tujuan dan sasaran OPD pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1

REALISASI KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	69,79%	103,39%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	73,21%	88,20%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	90%	100%	111,11%

Dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disajikan tabel seperti berikut ini :

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022–Ags 2023		Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	847,60	891,13	898,95	43,53	5,14	7,82	0,88
Angkatan Kerja	566,10	596,11	627,40	30,01	5,30	31,29	5,25
- Bekerja	539,24	568,20	603,10	28,96	5,37	34,90	6,14
- Pengangguran	26,85	27,91	24,30	1,06	3,95	-3,61	-12,93
Bukan Angkatan Kerja	281,51	295,01	271,55	13,50	4,80	-23,46	-7,95
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,74	4,68	3,87	-0,06		-0,81	
- Laki-laki	4,02	4,59	3,80	0,57		-0,79	
- Perempuan	5,92	4,84	3,97	-1,08		-0,87	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,79	66,89	69,79	0,10		2,90	
- Laki-laki	83,64	84,91	84,35	1,27		-0,56	
- Perempuan	50,31	48,86	55,22	-1,45		6,36	

Pada tahun 2024, indikator kinerja Tujuan yaitu Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di angka 69,79% dari target yang ditentukan sebesar 67,50% dengan capaian kinerja sebesar 103,39%. Hal ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 627.400 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebesar 898.950 orang. Capaian kinerja TPAK mengalami kenaikan karena sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Nganjuk.

Sasaran yang pertama yaitu dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di angka 73,21% dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja sebesar 83% dengan capain kinerja sebesar 88,20%. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja karena tidak sebandingnya antara target yang diperjanjikan dengan realisasi. Faktor penyebab dari capain tersebut karena adanya penambahan jumlah pencari kerja terdaftar dan tidak diiringi dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Upaya Dinas Tenaga Kerja kedepan untuk mengatasi indikator tersebut yaitu dengan kegiatan *Job Canvasing* ke Perusahaan, melaksanakan program pelatihan kompetensi, dan melaksanakan kegiatan *Job Fair*.

Sasaran yang kedua yaitu dengan indikator kinerja persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja sebesar 90% sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Pada indikator tersebut terdapat 1 Perselisihan Hubungan Industrial yang selesai diluar Pengadilan dibandingkan dengan perselisihan hubungan industrial tercatat sebanyak 1 perselisihan. Hal ini berarti perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan telah mencapai target atau bisa dibilang terjadi hubungan industrial yang harmonis. Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis tersebut maka perlunya peran Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja berkolaborasi menciptakan hubungan industrial yang baik. Jika dalam perusahaan terdapat perselisihan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha maka perselisihan melalui perundingan bipartit. Jika dalam perundingan bipartit tidak ada kesepakatan maka perusahaan tersebut harus

mencatatkan perselisihan perusahaannya di Dinas Tenaga Kerja. Karena menurut Perundang-Undangan yang ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Dalam mediasi perselisihan hubungan industrial tersebut jika sudah tercapai kesepakatan maka menghasilkan Perjanjian Bersama (PB) dan jika belum ada kesepakatan maka akan terbitlah anjuran. Dan jika anjuran tersebut tidak disetujui maka perselisihan tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya Dinas Tenaga Kerja untuk tahun yang akan datang yaitu memaksimalkan program hubungan industrial supaya tercipta hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.

A.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel. 3.1.2

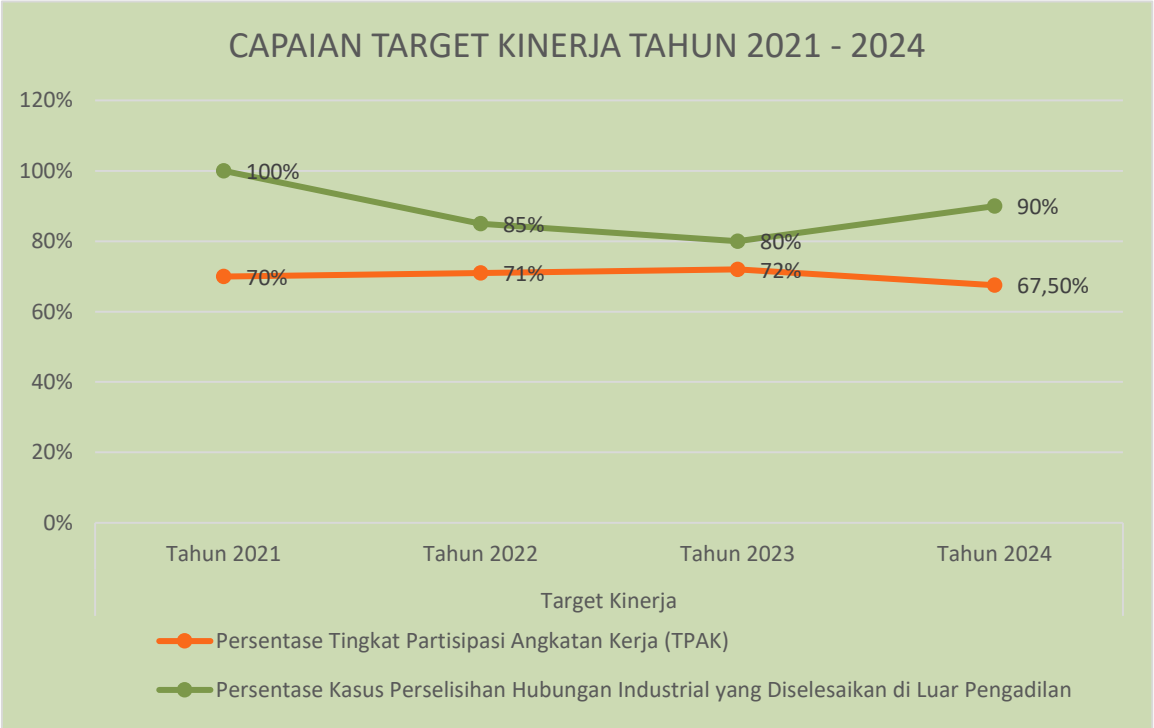
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

DAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70%	71%	72%	67,50%	61,04%	66,79%	66,89%	69,79%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	100%	85%	80%	90%	50%	60%	100%	100%

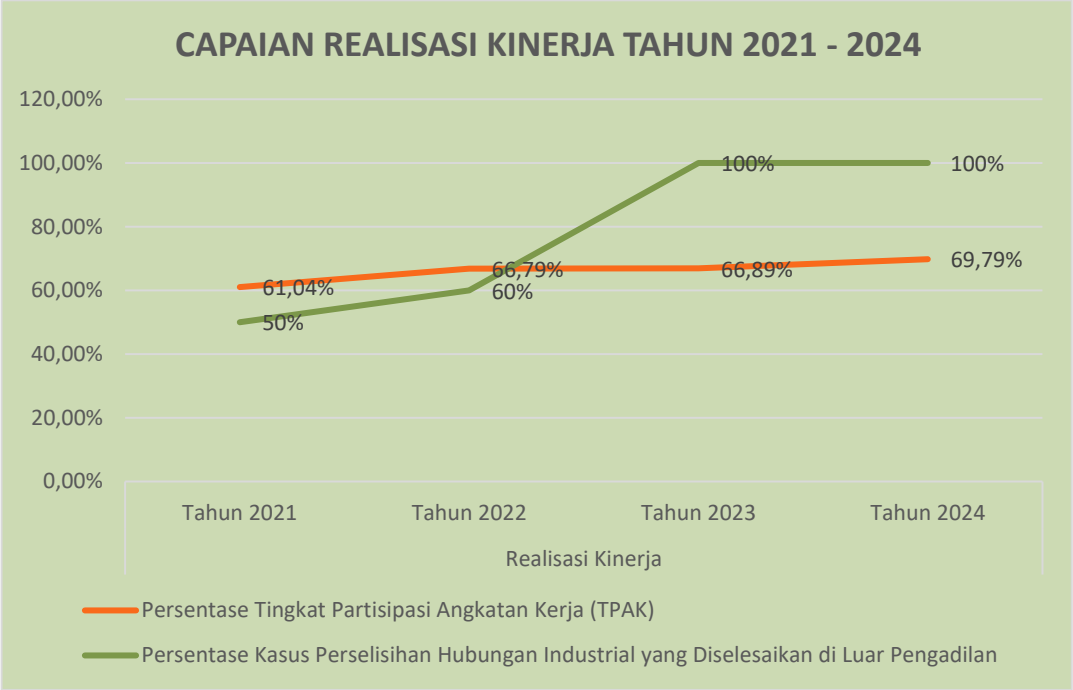
Dari tabel tersebut dapat dibuat diagram garis untuk mengetahui perbandingan naik dan turun realisasi kinerja dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya sebagai berikut :



Analisis capaian target Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja mentargetkan kinerja sebesar 67,50%. Pada

tahun 2021 sebesar 70%, tahun 2022 sebesar 71% dan tahun 2023 sebesar 72%. Hal ini jika dilihat dengan diagram curva mengalami naik turun, bahkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,5% dari tahun 2023. Ini terjadi karena realisasi kinerja selama empat tahun terakhir capaiannya tidak lebih dari 70% yang dirilis oleh BPS Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan analisis capaian target Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja mentargetkan kinerja sebesar 90%, tahun 2021 sebesar 80%, tahun 2022 sebesar 85%, dan tahun 2023 sebesar 90%. Jika dilihat curva perbandingan tersebut mengalami turun naik. Hal ini target kinerja mengalami perubahan dikarenakan adanya capaian kinerja pada tahun sebelumnya kurang dari target yang ditetapkan, sehingga untuk meminimalisir tidak tercapainya target kinerja maka di tahun berikutnya dilakukan perubahan.



Analisis capaian realisasi Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2024 dapat dilihat curva realisasinya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Tahun 2021 terealiasi sebesar 61,04%, tahun 2022 sebesar 66,79%, tahun 2023 sebesar 66,89% dan tahun

2024 sebesar 69,79%. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kenaikan TPAK juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Nganjuk.

Analisis capaian realisasi sararan 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Dari tahun 2021 terealisasi sebesar 50%, tahun 2022 sebesar 60%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini Dinas Tenaga Kerja sudah semaksimal mungkin menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Tabel. 3.1.2.1

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

DAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	-	-	-	83%	-	-	-	73,21%

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tidak ada pengukuran, karena pada sasaran tersebut bukan IKU Dinas Tenaga Kerja yang tercantum didalam Renstra tahun 2019-2023. Pada tahun 2024 sasaran dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan baru termuat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 dengan target 83% dan sudah terealisasi sebesar 73,21%. Pada indikator ini diperoleh dari jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

sebanyak 4.749 orang dibandingkan dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 6.468 orang dikalikan 100%.

Data pencari kerja terdaftar diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Online melalui aplikasi Kemenaker https://karirhub.kemnaker.go.id
2. Offline melalui register kartu AK-1 / Kartu Kuning

Untuk data pencari kerja terdaftar yang ditempatkan diperoleh dari :

1. Kegiatan *Job Fair*/Bursa Kerja
2. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
3. CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)

Dari data tersebut dapat dirangkum menjadi tabel seperti berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG DITEMPATKAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

No.	Bulan	Penempatan Luar Negeri		Penempatan Dalam Negeri		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Januari	13	30	7		50
2	Februari	14	21	1	6	42
3	Maret	21	38	45	90	194
4	April	19	20	113	541	693
5	Mei	10	23	34	140	207
6	Juni	12	26	15	628	681
7	Juli	8	27	44	34	113
8	Agustus	7	25	31	1044	1107
9	September	38	32	22	99	191
10	Oktober	15	28	506	70	619
11	Nopember	22	23	379		424
12	Desember	5	20	403		428
	JUMLAH	**184**	**313**	**1600**	**2652**	**4749**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG TERDAFTAR
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

No.	BULAN	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		SMK		DIPLOMA		Sarjana			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	17	10	33	93	258	197	144	149	22	28	95	122	569	599
2	Februari	2	4	4		3		5		1	1	2	3	17	8
3	Maret				2	4	4	6	6			1	2	11	14
4	April	1	1		1	4	3	4	5			4	1	13	11
5	Mei	1	3		5	10	16	70	33	1	5	13	38	95	100
6	Juni	3	4	12	15	238	239	662	352	35	46	155	238	1105	894
7	Juli		5	2	9	10	16	21	27	2	3	4	4	39	64
8	Agustus		5	1	13	17	9	20	11		2	3	5	41	45
9	September	4	6	30	25	290	253	569	305	51	81	236	385	1180	1055
10	Oktober		2	2	5	76	48	16	5		4	2	7	96	71
11	Nopember					112	271							112	271
12	Desember	1		1	7	24	21	9	11	1			2	36	41
	JUMLAH	29	40	85	175	1046	1077	1526	904	113	170	515	807	3314	3173

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR PADA DOKUMEN RENSTRA

Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan atas implementasi program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Berikut kami gambarkan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024-2026 dengan Target yang ada dalam RPD/RENSTRA :

Tabel 3.1.3

TARGET KINERJA RENSTRA

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Target Tahun Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Urusan Tenaga Kerja								
1.	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50	68	68,50	69,79	-	-	68,50	101,88%
2.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83	84	85	73,21	-	-	85	86,13%
3.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	90	90	90	100	-	-	90	111,11%



Berdasarkan data diatas, tingkat kemajuan pada masing-masing indikator sudah bisa dikatakan baik. Pada indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tingkat kemajuan mencapai 101,88%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 69,79% dengan target akhir Renstra sebesar 68,50%. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan TPAK seperti program pelatihan kerja, peningkatan akses ke pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan TPAK, seperti pengangguran, ketidakcocokan antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri, dan akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan TPAK, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien, seperti pengembangan program pelatihan kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tingkat kemajuan mencapai 86,13%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 73,21% dengan target akhir Renstra sebesar 85%. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

a) Pengembangan program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri
b) Peningkatan akses ke informasi tentang lowongan kerja
c) Pengembangan sistem seleksi yang lebih efisien dan efektif

Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a) Keterampilan pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri
b) Kurangnya informasi tentang lowongan kerja
c) Proses seleksi yang panjang dan rumit

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dapat meningkat, sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan menjadi 75% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas layanan penempatan kerja.

Kemudian pada indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan tingkat kemajuan mencapai 111,11%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir Renstra sebesar 90%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan semakin efektif. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan. Upaya-upaya tersebut antara lain :

a) Pengembangan sistem mediasi dan arbitrase
b) Peningkatan kesadaran dan partisipasi para pihak dalam penyelesaian perselisihan
c) Pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung penyelesaian perselisihan di luar pengadilan

Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a) Kurangnya kesadaran dan partisipasi para pihak dalam penyelesaian perselisihan
b) Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penyelesaian perselisihan di luar pengadilan
c) Perlu adanya peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk mendukung penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan menjadi 100% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL (MINIMAL DENGAN REGIONAL / PROVINSI / KABUPATEN YANG BERBATASAN)

Tabel 3.1.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

DENGAN STANDAR NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,63%	69,79%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83,59%	73,21%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	43,71%	100%

Analisis perbandingan realisasi kinerja tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data TPAK yang diambil dari data BPS RI menunjukkan angka TPAK sebesar 70,63%. Sedangkan data TPAK BPS Kabupaten Nganjuk sebesar 69,79%. Hal ini jika dibandingkan BPS Kabupaten Nganjuk lebih kecil dari pada BPS RI dikarenakan perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Nganjuk lebih tinggi. Upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan persentase TPAK yaitu peningkatan program pelatihan kerja, peningkatan akses ke pendidikan, dan pengembangan infrastruktur.

Untuk Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Data yang kami

sajikan dari data Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk terealisasi sebesar 83,59%. Sedangkan realisasi pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sebesar 73,21%. Angka tersebut di dapat dari perbandingan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sejumlah 4.749 orang dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 6.487 orang. Sedangkan data pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 113.446 orang dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 135.722 orang. Maka persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Nganjuk masih kecil dan hanya selisih 10,38%. Hal ini tentunya mendapat perhatian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk untuk lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas layanan penempatan kerja.

Analisis Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan pada tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk terealisasi sebesar 100%. Angka tersebut di dapat dari jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan sebanyak 1 perselisihandengan jumlah perselisihan hubungan industrial yang tercatat sebanyak 1 perselisihan. Sedangkan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan di tingkat Provinsi Jawa Timur tercatat 43,71% di tahun 2024. Data tersebut diperoleh dari 819 kasus yang berhasil diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 358. Hal ini jika dibandingkan maka perolehan Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan di Kabupaten Nganjuk lebih tinggi dari pada kasus Perselisihan Hubungan Industrial di tingkat Provinsi Jawa Timur.

A.5. ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1.5

ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Tercapai / Tidak Tercapai
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	103,39%	Tercapai Sangat Tinggi
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	88,20%	Tercapai Tinggi
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	111,11%	Tercapai Sangat Tinggi

Analisis ketercapaian Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2024 dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk dengan capaian kinerja sebesar 103,39%. Hal ini bisa dikatakan tercapai sangat tinggi. Faktor keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas atau angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2024 sebesar 898,95 ribu orang. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 627,40 ribu orang atau sekitar 69,79%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,79%. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,35%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,22%.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan TPAK, seperti program pelatihan kerja, peningkatan akses ke pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

Analisis ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Pada tahun 2024 ditargetkan 83% dan terealisasi 73,21%. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 88,20%. Hasil tersebut di dapat dari perbandingan antara Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2024 sebanyak 4.749 orang dengan pencari kerja terdaftar sebanyak 6.487 orang. Dari data tersebut bisa dikatakan tercapai tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa layanan penempatan kerja semakin efektif dalam membantu pencari kerja menemukan pekerjaan. Solusi yang akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kegiatan *Job Canvasing* ke perusahaan, pelaksanaan kegiatan program pelatihan berbasis kompetensi, dan pelaksanaan kegiatan *Job Fair*/Bursa Kerja.

Analisis ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Dari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada tahun 2024 telah menetapkan targetnya sebesar 90% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai sangat tinggi. Dinas Tenaga Kerja telah mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan, sehingga permasalahan yang muncul bisa terselesaikan dengan baik di tahapan Bipartit. Pun juga hal tersebut tidak terlepas dari peranan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Nganjuk bersama stakeholder ketenagakerjaan yang lain dari unsur Pengusaha maupun Pekerja dalam menciptakan situasi hubungan kerja yang minim kerawanan hubungan industrial.

A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.1.6

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	103,39	91,89	11,50
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	88,20	91,85	-3,65
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	111,11	92	19,11

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2024 sebagaimana tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Terjadi efisiensi anggaran dengan perolehan 11,50% dari capaian kinerja sebesar 103,39% dikurangi capaian anggaran sebesar 91,89% sehingga dapat dikatakan indikator TPAK ada efisiensi sumber daya sebesar 11,50%.

Pada indikator kedua yaitu Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan belum ada efisiensi sumber daya. Hal ini karena perolehan capaian kinerja sebesar 88,20% dikurangi capaian anggaran sebesar 91,85% efisiensinya mencapai -3,65%. Indikator ini perlu adanya efisiensi karena perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada tidak sebanding. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah pencari kerja terdaftar disetiap tahunnya tidak di iringi dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Diharapka upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang yaitu peningkatan kegiatan *Job Canvasing*

ke Perusahaan, pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan kegiatan *Job Fair*/Bursa Kerja.

Pada indikator ketiga yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,11%. Angka ini diperoleh dari jumlah capaian kinerja sebesar 111,11% dikurangi dengan jumlah capaian anggaran sebesar 92%. Pada indikator ini bisa dikatakan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

A.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1.7

PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			67,50 %	69,79%	103,39%	Hasil perhitungan dari BPS Kab. Nganjuk	- Masih terdapat pengangguran - Ketidak cocokan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri - Akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan	- Pengembangan program pelatihan kerja yang lebih relevandengan kebutuhan pasar kerja - Peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan - Pengembangan infrastruktur yang lebih baik
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			83%	73,21%	88,20%	Data pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	- Keterampilan pencari kerja yang tidak sesuai dengan	- Pengembangan program pelatihan kerja yang relevan dengan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									kebutuhan industri - Kurangnya informasi tentang lowongan kerja	kebutuhan industri Peningkatan akses digitalisasi informasi lowongan kerja
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan			90%	100%	111,11%	Data penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama	Tidak ada kendala tetapi ada beberapa tantangan antara lain : - Perlu adanya peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak - Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penyelesaian perselisihan di	- Peningkatan kesadaran dan partisipasi para pihak dalam penyelesaian perselisihan - Pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									luar Pengadilan	
4			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	80,50 nilai	75,65 nilai	93,98%	Hasil dari LHE SAKIP dari Inspektorat	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data	Lebih meningkatkan komunikasi dan kepedulian dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data
5			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14 laporan	14 laporan	100%	1. LKPJ 2. LPPD 3. LKjIP 4. Renstra 5. Renja 6. Perubahan Renja 7. RKA 8. RKA Perubahan 9. DPA 10. DPA Perubahan 11. Reviu Renstra	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								12. Proses Bisnis 13. SIPPN 14. PUG		
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	100%	1. Laporan Triwulan 1 2. Laporan triwulan 2 3. Laporan triwulan 3 4. Laporan triwulan 4 5. Dialog kinerja 6. Dokumen manajemen resiko 7. Perjanjian kinerja	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten
7			Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun	48 dokumen	48 dokumen	100%	SPM Gaji Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, SPM Gaji PPPK Mei,	Tidak ada hambatan	-

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								September, Oktober, November, Desember, SPM THR, SPM Gaji 13, SPM Rapel, SPM TPP Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, GU1,GU2,GU3,GU4,GU5,GU6,GU7,GU8,GU9,GU10,GU11,GU12,GU13,GU14,GU15, LS pengadaan barang dan jasa		
8			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	14 orang	77,77%	Daftar gaji sebanyak 14 orang	Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala	Menunggu pengisian jabatan yang kosong dari BKPSDM

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									Dinas dan Sekretaris	
9			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan /semesteran	20 laporan	1 laporan	5%	LKPD	Terdapat kesalahan perencanaan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Untuk tahun yang akan datang supaya lebih memperhatikan dan teliti dalam perencanaan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran
10			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan	7 dokumen	7 dokumen	100%	Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar, Nomor SK, Ekspedisi, Pinjam Gedung, Data PKL, Buku Pinjam Arsip	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
11			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	1 paket	100%	Laporan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
				bangunan kantor yang disediakan				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		kegiatan sesuai perencanaan
12			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
13			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Laporan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
14			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
15			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
16			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
17			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
18			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	97 unit	97 unit	100%	BAST Pengadaan mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 97 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
19			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	150 unit	100%	BAST pengadaan mebel 150 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
20			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin	35 unit	35 unit	100%	BAST pengadaan peralatan dan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
				lainnya yang disediakan				mesin lainnya sebanyak 35 unit		melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
21			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	12 unit	100%	BAST pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 12 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
22			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	14 laporan	14 laporan	100%	Laporan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor 14 laporan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
23			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan tentang Penyediaan jasa surat menyurat	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
24			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 laporan	1 laporan	100%	Laporan tentang Penyediaan jasa komunikasi,	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				sumber daya air dan listrik		kegiatan sesuai perencanaan
25			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
26			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara	28 unit	28 unit	100%	Laporan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, biaya pemeliharaan pajak dan perizimam kemdaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya,	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 28 unit		
27			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
28			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
29			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%	Berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan 5 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
30			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	3 unit	100%	BAST Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
31			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%	Berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 5 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
32			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%	Buku RTKD Kab. Nganjuk Tahun 2025 -2029	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
										kegiatan sesuai perencanaan
33			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	100%	Buku RTKD Kab. Nganjuk Tahun 2025 -2029	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
34			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
35			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100%	100%	100%	Jenis pelatihan : 1. Pelatihan barbershop 2. Pelatihan menjahit 3. Pelatihan memasak 4. Pelatihan rias wajah 5. Pelatihan berbasis kompetensi 6. Pelatihan las	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								7. Pelatihan barista		
36			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	71%	60,20%	84,79%	- Daftar nama peserta pelatihan - Daftar nama peserta pelatihan yang telah mandiri	Tidak semua pencari kerja terdaftar tercover pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Mengupayakan pencari kerja terdaftar tercover pelatihan berdasarkan klaster kompetensi
37			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 orang	490 orang	272 %	Laporan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi sebanyak 490 orang	Terdapat peserta pelatihan yang tidak menyelesaikan kegiatan pelatihan	Mengupayakan peserta pelatihan menyelesaikan kegiatan pelatihan
38			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta yang dibina	80%	50%	62,50%	Daftar LPK Swasta yang terdaftar	Masih banyaknya LPK yang	Memberikan bimtek tentang standar akreditasi

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi	serta memberikan pendampingan dalam pemenuhan akreditasi
39			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	35 lembaga	50 lembaga	142,85%	Laporan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 50 lembaga	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi	Melaksanakan bimtek tentang standar akreditasi serta memberikan pendampingan dalam pemenuhan akreditasi
40			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas	7%	30%	428,57%	Daftar perusahaan kecil	Keterbatasan pengetahuan perusahaan kecil terkait	Melaksanakan bimtek peningkatan produktivitas

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									pengukuran produktivitas	kepada perusahaan kecil
41			Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan	50 perusahaan	333%	Laporan kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil sebanyak 50 perusahaan	Tidak semua peserta bimtek memahami materi yang disampaikan	Melaksanakan pendampingan pasca bimtek
42			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	73,21%	88,20%	- Daftar pencari kerja yang terdaftar - Daftar pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi menyesuaikan kebutuhan pasar kerja
43			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	86%	57,79%	67,20%	- Daftar pencari kerja yang terdaftar - Daftar pencari kerja terdaftar yang terfasilitasi	Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencaker untuk mendapatkan pekerjaan baik disektor formal	- Melaksanakan kegiatan bimtek peningkatan kompetensi bagi petugas antar kerja

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									maupun informal	
44			Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	500 orang	60 orang	12 %	Laporan kegiatan Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja sebanyak 60 orang	Tidak semua peserta bimtek hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan	Sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi kehadiran
45			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	50 orang	250%	Laporan kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebanyak 50 orang	Tidak semua peserta pasca pelatihan mampu mandiri secara ekonomi	Melaksanakan monitoring dan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan
46			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	800 orang	401 orang	50,12%	Laporan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 401 orang	Pencari kerja cenderung masuk didunia kerja bukan menciptakan kesempatan kerja baru dengan menjadi tenaga kerja mandiri	Memperluas cakupan kepesertaan pelatihan keterampilan kerja yang mendorong terciptanya tenaga kerja mandiri

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
47			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online	80%	58,60%	73,25%	- Pencari kerja terdaftar - Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui IPK online	Tidak maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja	Melakukan sosialisasi kepada pencari kerja maupun pemberi kerja tentang manfaat platform yang telah tersedia
48			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	2700 orang	2.432 orang	90,07%	Laporan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja sebanyak 2.432 orang	Terdapat perusahaan peserta job fair yang tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja	Melakukan monitoring ke perusahaan peserta job fair
49			Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	100%	111,11%	Data Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian
50			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial	100 perusahaan	177 perusahaan	177%	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggaraka	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tenaga kerja diatas 50%				n jaminan sosial tenaga kerja diatas 50% sebanyak 177 perusahaan		
51			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	30 laporan	1 laporan	3,33%	Laporan data sarana hubungan industrial	Terdapat Perusahaan yang belum dilakukan pendataan Sarana Hubungan Industrial	Telah tersedianya Aplikasi Berbasis Web Peta Sarana Hubungan Industrial (PENA HI)
52			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka sengketa perusahaan per tahun	2%	0,45%	22,5%	Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan dengan jumlah perusahaan yang ada, kemuadian dikalikan 100%	Masih adanya perselisihan hubungan industrial yang tidak selesai dengan perundingan bipartite di Perusahaan	Diupayakan Perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
53			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	15 perkara	0 perkara	0%	Laporan kegiatan sosialisasi pembinaan norma dan syarat kerja, kegiatan jalan sehat peringatan May Day, kegiatan Sarasehan peringatan May Day, dan Usualan UMK	Masih adanya Perusahaan yang tidak melaporkan perselisihan hubungan industrial	Diupayakan Perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit
54			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 perkara	1 perkara	50%	Data Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama	Masih adanya Perusahaan yang berselisih	Diupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
55			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	30 lembaga	1 lembaga	3,33%	Keputusan Bupati Nomor 188/139/K/411.013/2022 tentang	Masih adanya Perusahaan yang belum menerapkan	Melakukan monitoring ke Perusahaan yang belum

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					pembentukan lembaga kerja sama Tripartit Kabupaten Nganjuk	norma dan syarat kerja sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan	menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan
56			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80 orang	15.568 orang	194,6%	Laporan terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja sebanyak 15.568	Masih adanya Perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian	Perlunya pembinaan kepada Perusahaan terkait pentingnya mendaftarkan seluruh pekerjanya kepesertaan BPJS
57			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	40%	6,67%	16,68%	- Daftar calon transmigran yang terdaftar - SK Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	Penentuan lokasi dan kuota calon transmigran dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait lokasi penempatan dan kuota calon transmigran

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
58			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	40%	6,67%	16,68%	- Daftar calon transmigran yang terdaftar - SK Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas	Melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk penambahan kuota
59			Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi	1 lokasi	25%	Laporan kegiatan Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi di satuan permukiman Saluandeang Kawasan Transmigrasi Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat	Tidak terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigran	Menyediakan anggaran kegiatan penjajakan calon lokasi transmigran

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
60			Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	10 kk	1 KK	10%	Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi tobadak, Kecamatan Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	Tidak terlaksananya pendampingan calon transmigrasi	Menyediakan anggaran kegiatan pendampingan calon transmigrasi
61			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 lokasi	1 lokasi	25%	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Muna dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Menyediakan anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								Provinsi Sulawesi Tenggara		

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja ada 3 (tiga) program dan kegiatan yaitu :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu dengan capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan yang menunjang yaitu kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan indikator jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian kinerja 100%. Meskipun capaian kinerja sudah mencapai 100% tentunya dalam pelaksanaan kegiatan masih ada faktor penghambat dan faktor pendorongnya namun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pelaksanaannya. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak seluruh pencari kerja terdaftar mendapatkan ketrampilan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu tingginya tingkat turn over tenaga kerja sebagai dampak kurangnya kompetensi. Untuk kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapain kinerja Dinas Tenaga Kerja yaitu pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan indikator persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi sebesar 84,79%. Hal ini tentunya ada beberapa faktor penghambat yaitu tidak semua pencari kerja terdaftar tercover pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, dan upaya yang akan dilakukan yaitu mengupayakan pencari kerja terdaftar tercover pelatihan berdasarkan klaster kompetensi.
3. Program hubungan industrial dengan capaian kinerja sebesar 111,11%. Hal ini berarti capaian kinerja terlalu tinggi. Upaya yang akan dilakukan untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50% sebesar 177%. Hal ini berarti pada capaian kinerja terlalu tinggi, sehingga diperlukan upaya untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.01		PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.682.744.102	3.659.702.214	1.023.041.888	78,15%	- Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog - Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	- Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar - Menunggu pengisian jabatan yang kosong dari BKPSDM
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah	25.600.000	25.580.000	20.000	99,92%	Jumlah hari dalam laporan lembur pegawai yang dibutuhkan lebih sedikit dari yang direncanakan	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan lembur pegawai supaya lebih teliti lagi
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	25.600.000	25.580.000	20.000	99,92%	Jumlah hari dalam laporan lembur	Untuk tahun yang akan datang dalam

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
					dsn Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					pegawai yang dibutuhkan lebih sedikit dari yang direncanakan	merencanakan lembur supaya lebih teliti
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja	2.626.667.000	1.688.272.355	938.394.645	64,27%	Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	Menunggu pengisian jabatan dari BKPSDM
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.622.515.000	1.684.172.355	938.342.645	64,22%	Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	Menunggu pengisian jabatan dari BKPSDM
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.152.000	4.100.000	52.000	98,75%	Jumlah hari dalam laporan lembur pegawai yang dibutuhkan lebih sedikit dari yang direncanakan	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan lembur pegawai supaya lebih teliti lagi
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja	457.470.584	406.398.741	51.071.843	88,84%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.738.284	7.140.415	597869	92,27%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.485.700	66.113.312	15.372388	81,13%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	15.955.600	12.749.200	3.206.400	79,90%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	0	100%	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	10.255.000	995.000	91,16%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan	Disesuaikan dengan kegiatan fasilitasi rapat SKPD sebagaimana

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
										barang dan jasa melalui e-katalog	permenkeu No.49 tahun 2023 tentang satuan biaya masukan tahun 2024 bahwa makanan dan minuman rapat dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian /lembaga lainnya/ instansi pemerintah /pihak lain.
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.861.000	293.180.814	30.680.186	90,53%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.780.000	14.560.000	2.780.000	98,51%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.014.218	310.788.950	16.225.268	95,04%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	91.003.950	87.748.950	3.255.000	96,42%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.177.700	194.540.000	4.637.700	97,67%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.832.568	28.500.000	8.332.568	77,38%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.852.000	454.383.464	468.536	99,90%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
										barang dan jasa melalui e-katalog	barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.022.000	3.000.000	22.000	99,07%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000000	47.553.464	446.536	99,07%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.830.000	403.830.000	0	100%	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	791.140.300	774.278.704	16.861.596	97,87%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	47.996.700	47.965.777	30.923	99,94%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.376.100	144.407.973	12.968.127	91,76%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.798.000	202.000	99,33%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.567.500	545.106.954	3.460.546	99,37%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.200.000	7.000.000	200.000	97,22%	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07				Urusan Bidang Tenaga Kerja						
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	126.800.000	111.288.900	15.510.100	87,77%	Pelaksanaan rapat koordinasi hanya dilakukan sebanyak 2 kali sehingga honor narasumber dan bantuan transport tidak terserap semua	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	126.800.000	111.288.900	15.510.100	87,77%	Pelaksanaan rapat koordinasi hanya dilakukan sebanyak 2 kali sehingga honor narasumber dan bantuan transport tidak terserap semua	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	126.800.000	111.288.900	15.510.100	87,77%	Pelaksanaan rapat koordinasi hanya dilakukan sebanyak 2 kali sehingga honor narasumber dan bantuan transport tidak terserap semua	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03			Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.569.115.500	3.485.123.796	83.991.704	97,65%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	3.485.599.500	3.416.293.796	69.305.704	98,01%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari	3.485.599.500	3.416.293.796	69.305.704	98,01%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak hadirnya narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
					Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					eksternal di beberapa kegiatan	anggaran selanjutnya
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	66.720,000	54.030.000	12.690.000	80,98%	Efisiensi kegiatan rapat koordinasi sehingga anggaran tidak terserap	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	66.720.000	54.030.000	12.690.000	80,98%	Efisiensi kegiatan rapat koordinasi sehingga anggaran tidak terserap	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	16.796.000	14.800.000	1.996.000	88,12%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	16.796.000	14.800.000	1.996.000	88,12%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	1.702.179.450	1.674.948.157	27.231.293	98,40%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.338.606.750	1.318.608.957	19.997.793	98,51%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	131.792.000	114.291.000	17.501.000	86,72%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	197.338.500	194.878.500	2.460.000	98,75%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
					Perluasan Kesempatan Kerja	1.009.476.250	1.009.439.457	36.793	99,99%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
											untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	363.572.700	356.339.200	7.233.500	98,01%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	363.572.700	356.339.200	7.233.500	98,01%	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	05			Program Hubungan Industrial	1.016.291.250	935.487022	80.804.228	92%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan	9.351.850	8.850.900	500.950	94%	Dikarenakan adanya negosiasi	Rencana anggaran pada tahun n+1

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					dari pihak pengadaan	dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	9.351.850	8.850.900	500.950	94%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.006.939.400	926.636.122	80.303.278	92%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	268.369.200	258.925.200	9.444.000	96%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak	Rencana anggaran pada tahun n+1

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
					Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	dilakukan penyesuaian
2	*07*	05	2.02	0002	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.366.000	64.228.000	2.138.000	96%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	*07*	05	2.02	0001	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	52.219.000	48.740.000	3.479.000	93%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial	619.985.200	554.742.922	65.242.278	89%	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan realisasi jumlah	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
					Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja					penerima bantuan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	
3					Urusan Pemerintahan Pilihan						
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	21.350.000	17.850.000	3.500.000	83,61	Kegiatan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.350.000	17.850.000	3.500.000	83,61	Kegiatan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
										Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	2.000.000	0	2.000.000	0%	Kegiatan penjajakan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	17.850.000	17.850.000	0	100%		Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	1.500.000	0	1.500.000	0%	Kegiatan penjajakan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
										Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
TOTAL						**11.118.480.302**	**9.884.400.089**	**1.234.080.213**	**88,90%**		

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dana yang telah dialokasikan serta target pendapatan yang telah dibebankan pada masing-masing satuan kerja.

Pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.588.557.252,- seiring berjalannya waktu terjadi perubahan APBD sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 11.118.480.302,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.884.400.089,- dengan kata lain besaran penyerapan anggaran sebesar 88,90%. Adapun faktor penyebab tidak tercapai 100% tersebut dikarenakan kekosongan jabatan Administrator yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. Sehingga upaya yang dilakukan adalah menunggu pengisian jabatan dari BKPSDM Kabupaten Nganjuk. Yang mana anggaran tersebut dipergunakan sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 4.486.008.952,- dan terjadi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp. 428.517.150,- sehingga anggarannya menjadi Rp. 4.682.744.1,- sudah terealisasi sebesar Rp. 3.659.702.214,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 78,15%. Kegiatan program tersebut untuk mendukung nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dengan nilai 75,65. Adapun faktor penyebab tidak tercapai 100% dikarenakan adanya jabatan administrator yang masih kosong dan Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Untuk itu upaya yang akan dilakukan adalah menunggu pengisian jabatan yang kosong dari BKPSDM dan untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar.

b) Program Perencanaan Tenaga Kerja besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 126.800.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 111.288.900,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,77%. Kegiatan program tersebut digunakan untuk penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) makro. Adapun faktor penyebab tidak tercapai 100% dikarenakan Pelaksanaan rapat koordinasi hanya dilakukan sebanyak 2 kali sehingga honor narasumber dan bantuan transport tidak terserap semua. Sedangkan upaya yang akan dilakukan yaitu Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya.

c) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 1.032.241.750,-. Kemudian

seiring perjalanan waktu terjadi perubahan APBD I sebesar dari sumber dana DBHCHT sebesar 1.526.458.200,- dan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp. 1.010.415.550,- sehingga anggarannya menjadi Rp. 3.569.115.500,- sudah terealisasi sebesar Rp. 3.485.123.796,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,65%. Faktor penyebab tidak terserap 100% dikarenakan Adanya efisiensi harga pada e katalog dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan. Sedangkan upaya yang akan dilakukan adalah dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan antara lain :

- Pelaksanaan Pendidikan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yaitu :
  1) Pelatihan Barbershop
  2) Pelatihan Menjahit
  3) Pelatihan Memasak
  4) Pelatihan Las
  5) Pelatihan Barista
  6) Pelatihan Berbasis Kompetensi di 3 Perusahaan
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan rapat koordinasi bagi LPK Swasta
- Pelaksanaan bimbingan teknis bagi Perusahaan kecil

d) Program Penempatan Tenaga Kerja besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 475.790.000,-. Kemudian seiring waktu terjadi perubahan APBD I dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp. 177.012.700,- dan dari sumber dana DIF sebesar Rp. 709.476.250,-. Terjadi perubahan APBD II dari sumber dana DIF sebesar Rp. 300.000.000,-. Terjadi perubahan anggaran keuangan (PAK) dari sumber dana DAU sebesar Rp. 49.900.000,-. Jadi anggarannya menjadi Rp. 1.674.948.157,-. Sudah terealisasi sebesar Rp. 1.674.948.157,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,40%. Faktor penyebab tidak terserapnya anggaran 100% yaitu adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber. Upaya yang akan dilakukan yaitu dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan bimbingan teknis bagi BKK (Bursa Kerja Khusus) dan Petugas Antar Kerja

- Pelaksanaan pelatihan menjahit dan pelatihan barbershop bagi penyandang disabilitas
- Pelaksanaan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Khusus
- Pelaksanaan kegiatan padat karya di 5 titik lokasi

e. Program Hubungan Industrial besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 456.366.050,-. Seiring waktu telah terjadi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari sumber dana DAU sebesar Rp. 559.925.200,- sehingga anggarannya menjadi Rp. 1.016.291.250,- sudah terealisasi sebesar Rp. 935.487022,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 92%. Faktor penyebab tidak terserap anggaran 100% dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Sedangkan upaya yang akan dilakukan adalah rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan pendataan sarana hubungan industrial ke perusahaan
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma dan syarat kerja
- Pelaksanaan peringatan May Day antara lain :
  1) Istighosah
  2) Jalan sehat
  3) Sarasehan peringatan May Day
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan
- Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Pelaksanaan kegiatan rapat kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 11.350.000,-. Seiring waktu telah terjadi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari sumber dana DAU sebesar Rp. 10.000.000,-. Sehingga anggarannya menjadi Rp. 21.350.000,-. Sudah terealisasi sebesar Rp. 17.850.000,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 83,61%.

Faktor penyebab anggaran tersebut tidak terserap 100% dikarenakan kegiatan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sedangkan upaya yang akan dilakukan adalah untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output. Adapun anggaran tersebut tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain :

- Pelaksanaan keberangkatkan calon transmigran sebanyak 1 KK dengan daerah tujuan transmigrasi di UPT. Saluandean Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
- Pelaksanaan kegiatan Monitoring transmigrasi pemberangkatan tahun 2023 yaitu di UPT Raimuna Kawasan Mutiara Kec. Maligano Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya sebagai laporan / *progress report* perjalanan pembangunan selama tahun anggaran 2024, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan. Di masa mendatang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, dimana sebagian besar capaian telah dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat target-target dalam beberapa indikator kinerja yang belum tercapai dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target.

4.2. SARAN/REKOMENDASI

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Disnaker Kabupaten Nganjuk di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1) Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung lemah, kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada beberapa elemen data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan data series untuk dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada

suatu indikator kinerja, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.

2) Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas terkait indikator kinerja bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai effort yang bersifat prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan atasan langsungnya.
3) Capaian kinerja yang telah diperoleh, terutama pada indikator kinerja yang berada pada kategori 'kurang' atau belum mencapai target, perlu mendapatkan perhatian lebih dan ditingkatkan pencapaiannya. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang tugas masih tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
4) Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tahun 2024 ini kami susun. Diharapkan dengan disusunnya laporan ini menjadi referensi dan proses pembangunan di bidang ketenagakerjaan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Nganjuk, 7 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Derah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN BAB II

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dipindai dengan CamScanner

B

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor 188/065.1/K/411.311/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakanacuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 14 April 2023

a.n.BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Nganjuk tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026

Nomor : 09 Tahun 2023

Tanggal : 14 April 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

1. **Nama Organisasi** : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Tenaga Kerja
3. **Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja
4. **Fungsi** :
   - Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja
   - Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
   - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
   - Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. **Indikator Kinerja Utama** :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum Angkatan\ Kerja}{\sum Penduduk\ Usia\ Kerja} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Program Hubungan Industrial	- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
		Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\sum Pencari\ kerja\ yang\ ditempatkan}{\sum Pencari\ kerja\ terdaftar} \times 100\%$	-Karirhub -AK-1 -Kegiatan Job Fair -PKWT	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan	- Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
					CPMII	Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	$\frac{\Sigma \text{ Perselisihan HI yang selesai diluar pengadilan}}{\Sigma \text{ Perselisihan HI tercatat}} \times 100\%$	Risk Register Perselisihan	- Program Hubungan Industrial	- Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Nganjuk, 14 April 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

DR. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_nakcr@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/tet.2 /K/411.311/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Individu;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Individu sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Individu sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran

d. huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja dalam suatu Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026.

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Nganjuk dalam mencapai Indikator Kinerja Utama.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 14 April 2023

a.n BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk



Drs. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
3. Tugas : Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lignkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
4. Fungsi :
   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
   d. pembinaan aparatur;
   e. pengelolaan urusan kepegawaian;
   f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
   g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
   h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
   i. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Indikator Kinerja Individu :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	80,50	SAKIP
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	14 laporan	Renja, RKA, DPA, LKPJ, LKjIP, LPPD, Renstra
3	Terselenggarannya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	48 dokumen	Laporan fungsional, laporan realisasi anggaran, proknosis, LKPD
4	Terselenggarannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah 12 ASN	1 dokumen	Data PIP, Rekap Daftar Hadir, SKP, Anjab ABK, Gratifikasi, IP ASN, Bezzeting, Data Pensiun, Data KGB, Data KP
5	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinsai bagian umum	7 dokumen	Laporan rutin operasional kantor

Dipindai dengan CamScanner

6	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjnag urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara	197 unit	Kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2, komputer PC, laptop, AC, printer
7	Terlenggarannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	4 laporan	Laporan operasional penunjang kantor
8	Terlenggarannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara	28 unit	Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Perencana Ahli Muda
3. Tugas :
   a) menformulasikan sajian untuk analisis
   b) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan
   c) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan
   d) menyusun alternatif model hubungan kausal / fungsional
   e) menguji alternatif kriteria dan model
   f) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek
   g) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral
   h) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional
   i) menyususn perencanaan program dan kegiatan sektoral
   j) menyususn rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan
   k) melakukan telaahan lingkup sektoral regional proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif
4. Indikator Kinerja Individu :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber data
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	Pemutakhiran renstra, renja, renja perubahan, PK, Manajemen risiko, analisis gender, RB, kas induk, kas perubahan, RKA, RKA perubahan, DPA, DPA perubahan
2	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	SPIP, Laptri, capaian rencana aksi, DUBB

Dipindai dengan CamScanner

3	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	LKjIP, LKPJ, LPPD, laporan kemiskinan, LKE PAN – RB, Pemutakhiran Data

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Kepala Sub Umum dan Kepegawaian
3. Tugas :
   a) melaksanakan urusan persuratan;
   b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
   c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
   d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
   e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
   f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan; dan
   g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4 Indikator Kinerja Individu :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber data
1	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7 dokumen	Data PIP, Rekap Daftar Hadir, SKP, Anjab ABK, Gratifikasi, IP ASN, Bezzeting, Data Pensiun, Data KGB, Data KP
2	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Laporan penunjang operasional kantor
3	Tersediannya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	1 paket	Laporan penunjang operasional kantor
4	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Laporan penunjang operasional kantor
5	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	1 dokumen	Laporan penunjang operasional kantor
6	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	Laporan penunjang operasional kantor

Dipindai dengan CamScanner

7	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	Laporan penunjang operasional kantor
8	Terlaksanannya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	Laporan arsip dinamis
9	Tersediannya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	Laporan operasional rutin kantor
10	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	Laporan penunjang operasional kantor

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum
3. Tugas :
   a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkantoran
   b) Menyelenggarakan administrasi data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi pemerintahan umum
   c) Melaksanakan penatausahaan administrasi data pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaporan pembangunan yang ada pada unit kerja
   d) Melaksanakan penatausahaan administrasi data lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaporan lingkungan yang ada pada unit kerja
   e) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
   f) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahanevaluasi dan pertanggungjawaban
   g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
4 Indikator Kinerja Individu :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber data
1	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	Data PIP, Rekap Daftar Hadir, SKP, Anjab ABK, Gratifikasi, IP ASN, Bezzeting, Data Pensiun, Data KGB, Data KP
2	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 paket	Laporan penunjang operasional kantor

Dipindai dengan CamScanner

3	Tersediannya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	12 paket	Laporan penunjang operasional kantor
4	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	Laporan penunjang operasional kantor
5	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	12 dokumen	Laporan penunjang operasional kantor
6	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	Laporan penunjang operasional kantor
7	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Laporan penunjang operasional kantor
8	Terlaksanannya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	Laporan arsip dinamis
9	Tersediannya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	Laporan operasional rutin kantor
10	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	Laporan penunjang operasional kantor

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Tugas :

a) Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang- undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis

b) Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis

c) Melakukan kajian teknis mengena1 pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis

d) Melakukan persuasi kebijakan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundangundangan, sistem dan prosedur, sumber daya

Dipindai dengan CamScanner

manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis

e) Melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis.

f) Menyusun makalah mengenal pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundangundangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis

g) Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis.

4. Indikator Kinerja Individu :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber data
1	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	144 orang	SPM gaji
2	Tersediannya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14 laporan	Laporan fungsional, laporan realisasi anggaran, proknosis, LKPD

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
2. Nama Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Plt. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
3. Tugas : Merumusakan kebijakan teknis menyelenggarakan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tuags di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Fungsi :
   a) pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
   b) pengkoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
   c) pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta dan transmigrasi kepada masyarakat;
   d) pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dan syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat;
   e) pengkoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Imdonesisa (PMI) purna penampatn;
   f) pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksai pencari kerja dan transmigrasi;
   g) pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;
   h) pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI);
   i) pengkoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama dan purna penempatan;
   j) pengkoordinasian pelaksanaa pemulangan dan kepulangan PMI;
   k) pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;
   l) pelaksanaan penerbiatan perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja di daerah;
   m) pengkoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan;
   n) perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
   o) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penempatan kerja dan transmigrasi;
   p) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
   q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

5. Indikator Kinerja Individu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Terselesaikannya perencanaan tenaga kerja	Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	RTK
2	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	100%	Laporan kegiatan pelatihan
3	Terlaksananya pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	85%	Laporan penempatan tenaga kerja
4	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online	83%	Laporan penempatan tenaga kerja melalui IPK online
5	Terlaksananya penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	40%	Laporan pemberangkatan calon transmigran

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
2. Nama Jabatan : Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Tugas :
   a) merumuskan kebijakan teknis diseksi penempatan dan transmigrasi;
   b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   c) membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
   d) memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada sekolah, perguruan tinggi maupaun lembaga penempatan kerja swasta;
   e) menyelenggarakan unit pendaftaran penerimaan dan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang rekrute;
   f) memberikan rekomendasi paspor PMI;
   g) menyelenggarakan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan;
   h) melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi transmigran;
   i) melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
   j) menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan daerah penerima berkaitan dengan penempatan lokasi;
   k) melaksanakan fasilitas dokumen-dokumen kependudukan bagi para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat terkait;
   l) monitoring dan evaluasi transmigran paska penempatan; dan
   m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Indikator Kinerja Individu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaa tenaga kerja	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	1 dokumen	RTK

Dipindai dengan CamScanner

1	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 Orang	Laporan kegiatan
2	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	400 Orang	Laporan IPK
3	Terselenggarannya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	250 Orang	Laporan IPK
4	Terlaksananya job fair/ bursa kerja	Jumlah pencari kerja yag mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	2000 Orang	Laporan IPK
5	Terlaksananya peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/PMI	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50 Orang	Laporan CPMI terdaftar
6	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Laporan Kegiatan
7	Terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigrasi yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK	Data calon transmigran yang terseleksi
8	Terlaksananya penyuluhan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yanag mendapatkan penyuluhan	3 KK	Data calon transmigran yang terseleksi
9	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigran	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 Lokasi	Laporan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
2. Nama Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda
3. Tugas :
   a) Mengidentifikasi sumber daya pelayanan antar kerja
   b) Melakukan layanan analisis jabatan lanjutan
   c) Menganalisis informasi pasar kerja
   d) Melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-phk / disabilitas / lansia/ orang tua siswa / kelompok masyarakat
   e) Menyusun struktur biaya penempatan penempatan pekerja migran indonesia
   f) Mengevaluasi substansi perjanjian kerjasama / kemitraan pelayanan antar kerja
   g) Mensosialisasikan program / kegiatan pelayanan antar kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau p3mi
   h) Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja
   i) Melakukan pelayanan pemenuhan penempatan kepada pemberi kerja
   j) Melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter-phk atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan
   k) Melakukan rekruitmen calon tenaga kerja untuk penempatan
   l) Melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan
   m) Menganalisis dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja
5. Indikator Kinerja Individu :

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 Orang	Laporan Kegiatan
2	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 Lembaga	Ijin operasional, sertifikat akreditasi

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
2. Nama Jabatan : Analis Data Kerjasama dan Pemasyarakatan
3. Tugas :
   a) Menyiapkan bahan penyusunan program sub bagian
   b) Menyusun instrumen dan pengelolaan data kerja sama, publikasi, dan hubungan permasyarakatan sesuai dengan kebutuuhan dan jenis data
   c) Menganalisis kerja sama, publikasi, dan hubungan pemasyarakatan untuk mengetahui permasalahan
   d) Menidentifikasi masalah kerjasama, publikasi dan hubungan kemasyarakatan sesuai dengan hasil analisis
   e) Merumuskan konsep saran pemecahan masalah, pedoman, petunjuk pelaksana kerja sama dan hubungan pemasyarakatan
   f) Meyiapkan bahan fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis kerja sama, publikasi dan hubungan pemsayarakatan sesuai dengan kebutuhan
   g) Menyusun konsep naskah kerja sama, publikasi dan hubungan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan
   h) Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan kerja sama, publikasi, dan hubungan pemasyarakatan sesuai ketentuan
   i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaantugas
   j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Indikator Kinerja Individu :

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 Orang	Laporan kegiatan
2	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	250 Orang	Laporan IPK
3	Terselenggarannya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	750 Orang	Laporan IPK
4	Terlaksananya job fair/ bursa kerja	Jumlah pencari kerja yag mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1000 Orang	Laporan IPK
5	Terlaksananya peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/PMI	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50 Orang	Lporan CPMI terdaftar
6	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dar 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 Laporan	Laporan Kegiatan
7	Terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigrasi yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	Data calon transmigran yang terseleksi
8	Terlaksananya penyuluhan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yanag mendapatkan penyuluhan	3 KK	Data calon transmigran yang terseleksi
9	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigran	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	3 Lokasi	Laporan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
3. Tugas : merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan
4. Fungsi :
   a) perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
   b) penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
   c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Indikator Kinerja Individu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angka Sengketa per Tahun	1%	Register Perselisihan Hubungan Industrial

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
3. Tugas : merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan
4. Fungsi :
   a) perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
   b) penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
   c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Indikator Kinerja Individu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angka Sengketa per Tahun	1%	Register Perselisihan Hubungan Industrial

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
2. Nama Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli muda
3. Tugas :
   a. Menganalisis mogok kerja dan / atau penutupan perusahaan
   b. Mengidentifikasi pemutusan hubungan kerja
   c. Mengidentifikasi unjuk rasa terkait ketenagakerjaan
   d. Melakukan pembimbingan perhitungan hak-hak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja
   e. Melakukan pendampingan dan supervisi pembentukan organisasi pekerja
   f. Melakukan verifikasi perjanjian kerja
   g. Melakukan verifikasi peraturan perusahaan keputusan pengesahan peraturan perusahaan
   h. Melakukan verifikasi perjanjian kerja bersama
   i. Melakukan verifikasi perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh
   j. Melakukan pelayanan konseling teknis/bidang hubungan industrial tingkat dasar
   k. Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat/instansi terkait hubungan industrial tingkat dasat
   l. Melakukan verifikasi penerbitan legitimasi mediator/ konsiliator arbirter hubungan industrial
   m. Melakukan verifikasi kinerja lembaga tripartit
   n. Melakukan verifikasi data calon anggota lembaga hubungan industrial
   o. Meakukan pengendalian unjuk rasa tingkat ringan
   p. Mengevaluasi materi perjanjian kerja di perusahaan
   q. Mengevaluasi materi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Dipindai dengan CamScanner

r. Mengevaluasi pelaksanaan pemborongan pekrjaaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh

s. Melakukan mediasi penyelesaian hak tingkat ringan

t. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat ringan

u. Melakukan mediasi penyeleseian perselisihan hubungan kerja tingkat ringan

v. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan

w. Merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hubungan industrial tingkat ringan dalam bentuk perjanjian bersama

x. Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat ringan

4. Indikator Kinerja Individu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah	Sumber Data
1	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Register Perselisihan Hubungan Industrial
2	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat./berdampak pada kepenitngan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	4 Perkara	Register Perselisihan Hubungan Industrial
3	Terlaksananya pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	14500 Orang	Register Perselisihan Hubungan Industrial
4	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	Data Hubungan Industrial

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN BAB II

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

C

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL HUDA, S H, M H

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihakpertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 8 Januari 2024

Pihak Kedua Pj. Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si	SAMSUL HUDA, S H, M H Pembina Utama Muda NIP. 19660810199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnyajumlahpenduduk yang bekerja	Persentasepencankerjaterdaftar yang ditempatkan	83%
2	Meningkatnyahubungan industrial yang harmonis	PersentaseKasusPerselisihanhubungan industrial yang diselesaiandiluarpengadilan	90%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.486.008.952,00	DAU
2	Program PerencanaanTenagaKerja	Rp. 126.800.000,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.032.241.750,00	DAU
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 475.790.000,00	DAU
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 456.366.050,00	DAU
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 11.350.000,00	DAU

Nganjuk, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

SAMSUL HUDA, S.H.M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN BAB III

A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL

Dipindai dengan CamScanner

A.9

BERITA RESMI STATISTIK

No. 83/11/Th. XXVII, 5 November 2024

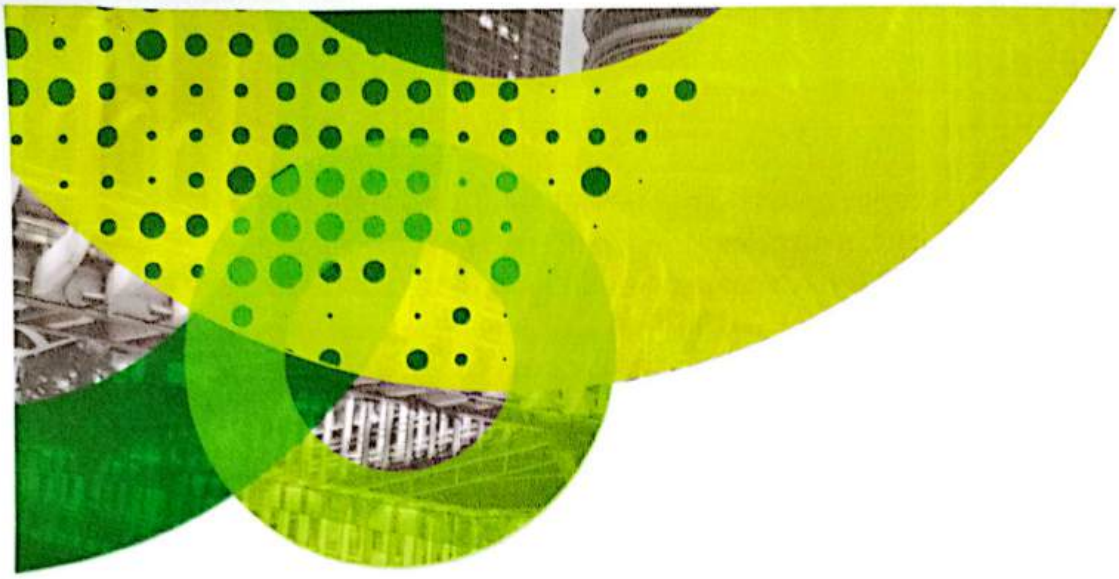


Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen.
- Rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulan.

BADAN PUSAT STATISTIK

Dipindai dengan CamScanner



A. Keadaan Ketenagakerjaan

- Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 juta orang.
- Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,16 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2024 sebesar 7,59 juta orang, naik sebesar 0,21 juta orang dibanding pada Agustus 2023.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding pada Agustus 2023.

Dipindai dengan CamScanner

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. PUK pada Agustus 2024 sebanyak 215,37 juta orang, bertambah sebanyak 2,78 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 152,11 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 63,26 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 144,64 juta orang penduduk bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 4,40 juta orang dan 4,79 juta orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,39 juta orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 3,10 persen poin sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,63 persen, naik 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,66 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,42 persen. Dibandingkan pada Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,40 persen poin dan 1,90 persen poin.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019–Agustus 2024

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agt 2023–Agt 2024	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	201,19	203,97	206,71	209,42	212,59	215,37	2,78	1,31
Angkatan Kerja	135,86	138,22	140,15	143,72	147,71	152,11	4,40	2,98
- Bekerja	128,76	128,45	131,05	135,30	139,85	144,64	4,79	3,42
- Pengangguran	7,10	9,77	9,10	8,42	7,86	7,47	-0,39	-4,96
Bukan Angkatan Kerja	65,33	65,75	66,56	65,70	64,88	63,26	-1,62	-2,49
	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,53	67,77	67,80	68,63	69,48	70,63	1,15	
- Laki-Laki	83,25	82,41	82,27	83,87	84,26	84,66	0,40	
- Perempuan	51,81	53,13	53,34	53,41	54,52	56,42	1,90	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954
Website : http://disnakertrans.jatimprov.go.id e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id

JUMAH PENEMPATAN TENAGA KERJA TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kab. Bangkalan	814	1,26%	627	1,28%	1.441	1,27%
Kab. Banyuwangi	823	1,28%	833	1,70%	1.657	1,46%
Kab. Blitar	751	1,17%	939	1,92%	1.691	1,49%
Kab. Bojonegoro	517	0,80%	470	0,96%	986	0,87%
Kab. Bondowoso	313	0,49%	379	0,77%	692	0,61%
Kab. Gresik	5.412	8,40%	2.665	5,44%	8.077	7,12%
Kab. Jember	341	0,53%	158	0,32%	502	0,44%
Kab. Jombang	1.742	2,70%	2.660	5,42%	4.402	3,88%
Kab. Kediri	1.426	2,21%	2.851	5,81%	4.277	3,77%
Kab. Lamongan	622	0,97%	751	1,53%	1.374	1,21%
Kab. Lumajang	810	1,26%	653	1,33%	1.463	1,29%
Kab. Madiun	2.543	3,95%	690	1,41%	3.231	2,85%
Kab. Magetan	821	1,27%	1.834	3,74%	2.653	2,34%
Kab. Malang	1.124	1,74%	3.028	6,18%	4.152	3,66%
Kab. Mojokerto	2.568	3,99%	5.135	10,47%	7.703	6,79%
Kab. Nganjuk	954	1,48%	2.075	4,23%	3.029	2,67%
Kab. Ngawi	518	0,80%	650	1,33%	1.168	1,03%
Kab. Pacitan	314	0,49%	628	1,28%	942	0,83%
Kab. Pamekasan	219	0,34%	643	1,31%	862	0,76%
Kab. Pasuruan	5.217	8,10%	2.429	4,95%	7.648	6,74%
Kab. Ponorogo	346	0,54%	857	1,75%	1.203	1,06%
Kab. Probolinggo	957	1,49%	881	1,80%	1.838	1,62%
Kab. Sampang	218	0,34%	735	1,50%	953	0,84%
Kab. Sidoarjo	8.934	13,87%	2.989	6,10%	11.923	10,51%
Kab. Situbondo	332	0,52%	836	1,71%	1.168	1,03%
Kab. Sumenep	148	0,23%	431	0,88%	579	0,51%
Kab. Trenggalek	342	0,53%	509	1,04%	851	0,75%
Kab. Tuban	1.349	2,09%	648	1,32%	1.997	1,76%
Kab. Tulungagung	512	0,79%	883	1,80%	1.395	1,23%
Kota Batu	2.273	3,53%	1.686	3,44%	3.957	3,49%
Kota Blitar	821	1,27%	529	1,08%	1.352	1,19%
Kota Kediri	742	1,15%	653	1,33%	1.395	1,23%
Kota Madiun	1.017	1,58%	356	0,73%	1.373	1,21%
Kota Malang	2.124	3,30%	2.096	4,28%	4.221	3,72%
Kota Mojokerto	541	0,84%	151	0,31%	689	0,61%
Kota Pasuruan	825	1,28%	378	0,77%	1.203	1,06%
Kota Probolinggo	564	0,88%	1.092	2,23%	1.656	1,46%
Kota Surabaya	14.519	22,54%	3.224	6,58%	17.743	15,64%
TOTAL	**64.413**	**100%**	**49.033**	**100%**	**113.446**	**100%**

- Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954
Website : http://disnakertrans.jatimprov.go.id e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id

JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Pacitan	341	0,49%	310	0,47%	651	0,48%
2	Ponorogo	390	0,56%	397	0,60%	787	0,58%
3	Trenggalek	362	0,52%	412	0,62%	774	0,57%
4	Tulungagung	146	0,21%	139	0,21%	285	0,21%
5	Blitar	1.024	1,47%	890	1,35%	1.914	1,41%
6	Kediri	1.094	1,57%	874	1,32%	1.968	1,45%
7	Malang	2.634	3,78%	2.591	3,92%	5.225	3,85%
8	Lumajang	543	0,78%	556	0,84%	1.099	0,81%
9	Jember	383	0,55%	378	0,57%	761	0,56%
10	Banyuwangi	1.192	1,71%	1.197	1,81%	2.389	1,76%
11	Bondowoso	467	0,67%	361	0,55%	828	0,61%
12	Situbondo	760	1,09%	665	1,01%	1.425	1,05%
13	Probolinggo	1.171	1,68%	1.258	1,90%	2.429	1,79%
14	Pasuruan	5.658	8,12%	5.403	8,18%	11.061	8,15%
15	Sidoarjo	8.954	12,85%	7.688	11,64%	16.642	12,26%
16	Mojokerto	5.707	8,19%	5.924	8,97%	11.631	8,57%
17	Jombang	2.592	3,72%	2.499	3,78%	5.091	3,75%
18	Nganjuk	1.171	1,68%	1.163	1,76%	2.334	1,72%
19	Madiun	1.317	1,89%	1.791	2,71%	3.108	2,29%
20	Magetan	1.059	1,52%	825	1,25%	1.884	1,39%
21	Ngawi	669	0,96%	783	1,19%	1.452	1,07%
22	Bojonegoro	564	0,81%	508	0,77%	1.072	0,79%
23	Tuban	1.212	1,74%	1.014	1,54%	2.226	1,64%
24	Lamongan	801	1,15%	531	0,80%	1.332	0,98%
25	Gresik	5.588	8,02%	5.500	8,33%	11.088	8,17%
26	Bangkalan	920	1,32%	872	1,32%	1.792	1,32%
27	Sampang	244	0,35%	312	0,47%	556	0,41%
28	Pamekasan	251	0,36%	251	0,38%	502	0,37%
29	Sumenep	216	0,31%	205	0,31%	421	0,31%
30	Kota Kediri	550	0,79%	468	0,71%	1.018	0,75%
31	Kota Blitar	1.094	1,57%	1.134	1,72%	2.228	1,64%
32	Kota Malang	2.676	3,84%	1.219	1,85%	3.895	2,87%
33	Kota Probolinggo	571	0,82%	471	0,71%	1.042	0,77%
34	Kota Pasuruan	843	1,21%	731	1,11%	1.574	1,16%
35	Kota Mojokerto	502	0,72%	516	0,78%	1.018	0,75%
36	Kota Madiun	1.073	1,54%	583	0,88%	1.656	1,22%
37	Kota Surabaya	12.257	17,59%	12.770	19,34%	25.027	18,44%
38	Kota Batu	2.683	3,85%	2.854	4,32%	5.537	4,08%
Total Jawa Timur		**69.679**	**100,00%**	**66.043**	**100,00%**	**135.722**	**100,00%**

- Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

DATA PENYELESAIAN PHI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

No.	Kab/Kota	Jumlah PB	Jumlah Perselisihan	Persentase (%)
1.	Kota Surabaya	120	220	54,5
2.	Kota Mojokerto	10	14	71,4
3.	Kab. Mojokerto	4	10	40,0
4.	Jombang		18	0,0
5.	Nganjuk	2	2	100,0
6.	Kota Madiun	11		
7.	Kab. Madiun	1	8	12,5
8.	Magetan	1	7	14,3
9.	Ngawi	2	5	40,0
10.	Ponorogo	0	1	0,0
11.	Pacitan	0	1	0,0
12.	Trenggalek	0	0	
13.	Kota Blitar	2	3	66,7
14.	Kab. Blitar	0	0	
15.	Tulungagung	6	11	54,5
16.	Kota Kediri	2	15	13,3
17.	Kab. Kediri	3	15	20,0
18.	Gresik	23	122	18,9
19.	Lamongan	4	4	100,0
20.	Tuban	5	6	83,3
21.	Bojonegoro	4	16	25,0
22.	Sidoarjo	22	99	22,2
23.	Kota Malang	19	34	55,9
24.	Kab. Malang	8	14	57,1
25.	Batu	2	2	100,0
26.	Kota Pasuruan	8	8	100,0
27.	Kab. Pasuruan	11	31	35,5
28.	Kota Probolinggo	16	10	160,0
29.	Kab. Probolinggo	1	3	33,3
30.	Situbondo	1	33	3,0
31.	Bondowoso	5	5	100,0
32.	Banyuwangi	13	19	68,4
33.	Lumajang	13	18	72,2
34.	Jember	36	44	81,8
35.	Bangkalan	1		
36.	Sampang	0	1	0,0
37.	Pamekasan	0		
38.	Sumenep	2		
39.	Prov. Jatim	36	101	35,6

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL HUDA, S.H, M.H

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihakpertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 8 Januari 2024

Pihak Kedua Pj. Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si	SAMSUL HUDA, S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19660810199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnyajumlahpenduduk yang bekerja	Persentasepencarikerjaterdaftar yang ditempatkan	83%
2	Meningkatnyahubungan industrial yang harmonis	PersentaseKasusPerselisihanhubungan industrial yang diselesaiandiluarpengadilan	90%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.486.008.952,00	DAU
2	Program PerencanaanTenagaKerja	Rp. 126.800.000,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.032.241.750,00	DAU
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 475.790.000,00	DAU
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 456.366.050,00	DAU
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 11.350.000,00	DAU

Nganjuk, 3 Januari 2024

Pihak Kedua
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

SAMSUL H[illegible]DA, S.H.M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024–TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor 188/065.1/K/411.311/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakanacuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 14 April 2023

a.n.BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Nganjuk tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026

Nomor : 09 Tahun 2023

Tanggal : 14 April 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

1. **Nama Organisasi** : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Tenaga Kerja
3. **Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja
4. **Fungsi** :
   - Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja
   - Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
   - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
   - Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. **Indikator Kinerja Utama** :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum Angkatan\ Kerja}{\sum Penduduk\ Usia\ Kerja} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Program Hubungan Industrial	- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
		Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\sum Pencari\ kerja\ yang\ ditempatkan}{\sum Pencari\ kerja\ terdaftar} \times 100\%$	-Karirhub -AK-1 -Kegiatan Job Fair -PKWT	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan	- Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
					CPMII	Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	$\frac{\Sigma \text{Perselisihan HI yang selesai diluar pengadilan}}{\Sigma \text{Perselisihan HI tercatat}} \times 100\%$	Risk Register Perselisihan	- Program Hubungan Industrial	- Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Nganjuk, 14 April 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

Dr. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

3. KEADAAN KETENAGAKERJAAN DARI BPS KABUPATEN NGANJUK

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NGANJUK

BERITA RESMI STATISTIK

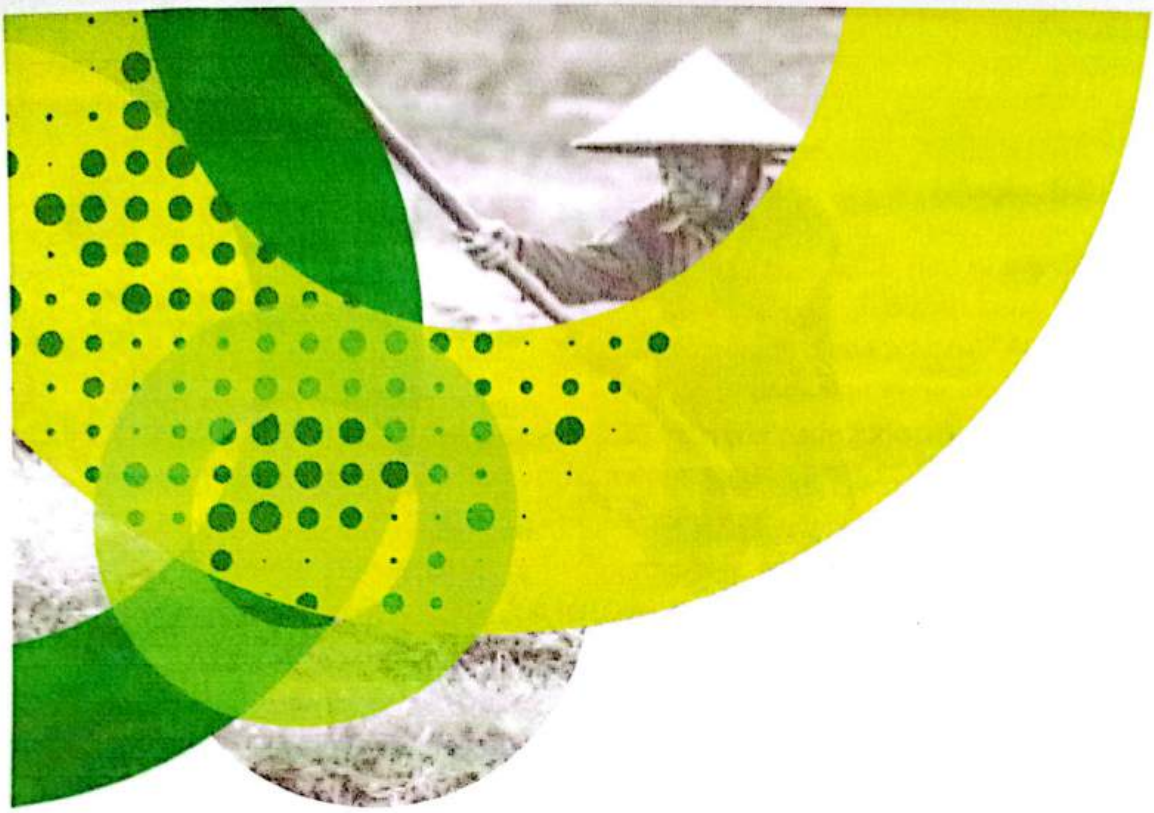
No. 04/11/3518/Th. XXIV, 26 November 2024



Keadaan Ketenagakerjaan Nganjuk Agustus 2024

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,87 persen
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,79 persen

Dipindai dengan CamScanner



A. Keadaan Ketenagakerjaan

- Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 bertambah 31 ribu orang menjadi sebanyak 627,39 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,79 persen, naik 2,90 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023.
- Penduduk yang bekerja sebanyak 603 ribu orang atau bertambah 34 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
- Sebanyak 197 ribu orang (32,70 persen) bekerja pada kegiatan formal atau bertambah 1,94 persen poin dibandingkan Agustus 2023.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 3,87 persen, turun 0,81 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.
- TPT tertinggi di Nganjuk pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 7,96 persen disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 5,52 persen.

Dipindai dengan CamScanner

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Nganjuk pada Agustus 2024 sebesar 898,95 ribu orang atau mengalami kenaikan 7,82 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 627,40 ribu orang atau sekitar 69,79 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2024 terdiri dari 603,10 ribu orang bekerja dan 24,30 ribu orang menganggur.

Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 31,29 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 34,90 ribu orang dan pengurangan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 3,61 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,79 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Nganjuk. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,35 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,22 persen.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022–Ags 2023		Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	847,60	891,13	898,95	43,53	5,14	7,82	0,88
Angkatan Kerja	566,10	596,11	627,40	30,01	5,30	31,29	5,25
- Bekerja	539,24	568,20	603,10	28,96	5,37	34,90	6,14
- Pengangguran	26,85	27,91	24,30	1,06	3,95	-3,61	-12,93
Bukan Angkatan Kerja	281,51	295,01	271,55	13,50	4,80	-23,46	-7,95
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,74	4,68	3,87	-0,06		-0,81	
- Laki-laki	4,02	4,59	3,80	0,57		-0,79	
- Perempuan	5,92	4,84	3,97	-1,08		-0,87	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,79	66,89	69,79	0,10		2,90	
- Laki-laki	83,64	84,91	84,35	1,27		-0,56	
- Perempuan	50,31	48,86	55,22	-1,45		6,36	

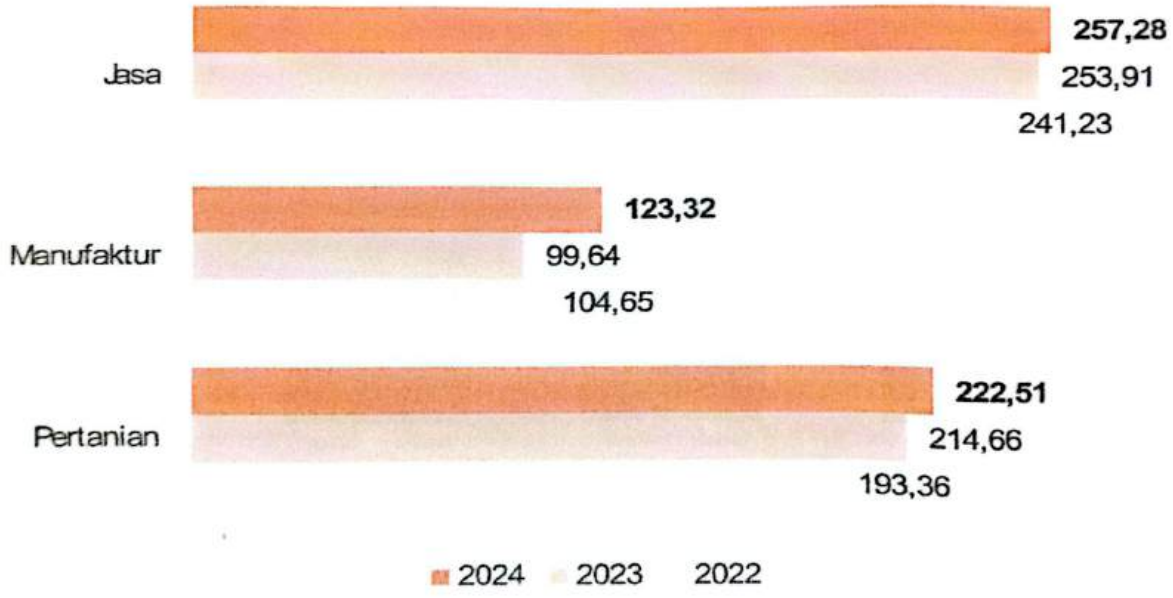
Dipindai dengan CamScanner

2. Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Konsep bekerja dalam Sakernas adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam baik secara berturut-turut maupun kumulatif dalam seminggu terakhir. Penduduk bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Penduduk bekerja di Nganjuk pada Agustus 2024 sebesar 603,10 ribu orang. Berikutnya, akan dilihat karakteristik penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama seminggu yang lalu.

2.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, lapangan pekerjaan di Nganjuk terbagi dalam 3 sektor utama, dimana yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Jasa yaitu sebesar 42,66 persen; Pertanian sebesar 36,89 persen; dan Manufaktur sebesar 20,45 persen. Persentase tiga sektor ini menunjukkan pergeseran pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022 dan Agustus 2024.



Gambar 1 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu), Agustus 2024

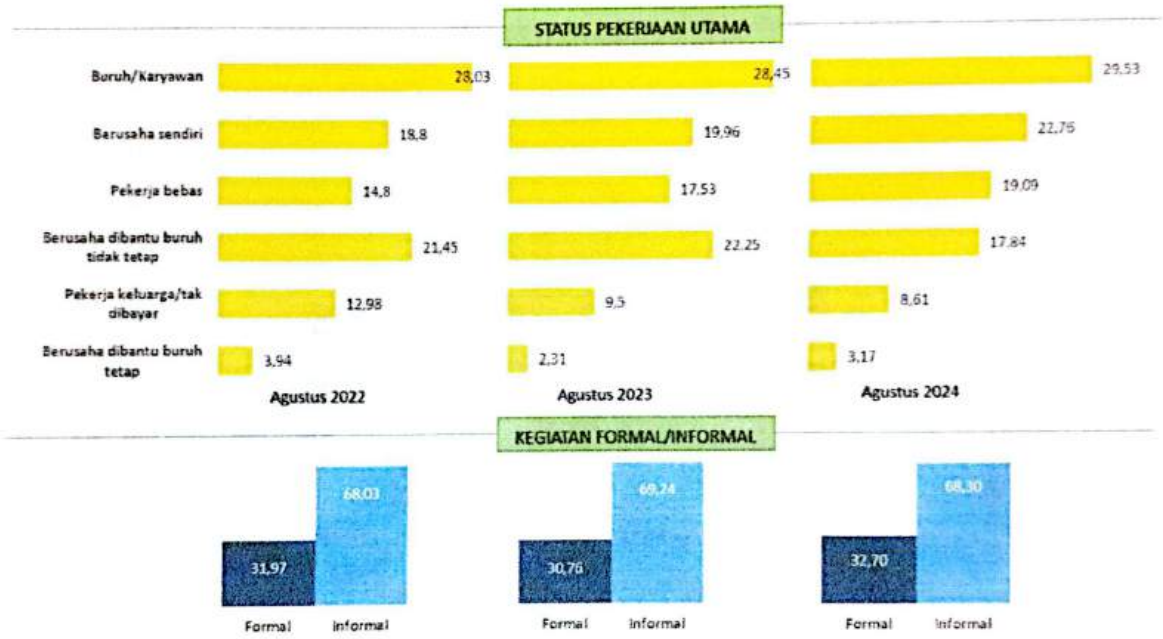
Sektor Manufaktur mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak sebesar 23,68 ribu orang, diikuti Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) mengalami peningkatan sebesar 7,85 ribu orang, kemudian sektor Jasa-jasa juga mengalami peningkatan sebesar 3,37 ribu orang. Penyerapan tenaga kerja tahun 2024 pada semua sektor mengalami peningkatan. Penambahan terbesar ada pada sektor Manufaktur, hal ini disebabkan mulai bertumbuhnya

Dipindai dengan CamScanner

Industri di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan sektor Pertanian pada Agustus 2024 mengalami peningkatan dikarenakan adanya panen raya bawang merah dan panen tanaman cengkeh yang mundur.

2.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, tidak terjadi perubahan komposisi persentase di Nganjuk. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Nganjuk masih didominasi Buruh/Karyawan/ Pegawai yaitu sebesar 29,53 persen diikuti mereka yang berstatus Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap masih memiliki persentase paling kecil sebesar 3,17 persen. Status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah Berusaha Sendiri (naik 2,8 persen poin), Buruh/Karyawan/ Pegawai (naik 1,08 persen poin), Berusaha Dibantu Buruh Tetap (naik 0,86 persen poin), dan Pekerja Bebas (naik 0,56 persen poin). Jika dilihat dari jumlah penduduk bekerja, hanya status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap dan Pekerja Keluarga yang mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2023 yaitu turun sebesar 1,63 dan 3,47 persen poin.



Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/ Informal (persen), Agustus 2022-Agustus 2024

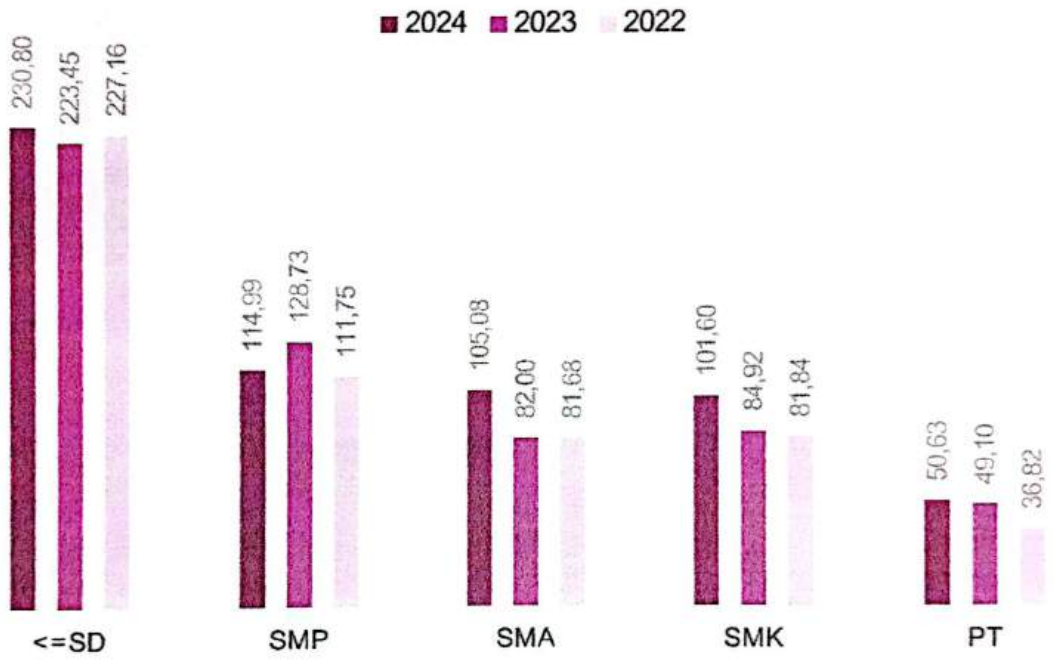
Berdasarkan status pekerjaan utama, kegiatan penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan status Buruh/Karyawan/Pegawai, sedangkan mereka yang Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga, Pekerja Bebas (pertanian/nonpertanian), dan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar dikategorikan bekerja pada kegiatan informal.

Pada Agustus 2024, penduduk Nganjuk yang bekerja di kegiatan formal sebesar 197,21 ribu orang (32,70 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 405,89 ribu orang (68,30 persen). Terjadi penambahan proporsi penduduk yang bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 sebesar 1,94 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Dipindai dengan CamScanner

2.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Nganjuk masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 230,80 ribu orang atau 38,27 persen dari total penduduk bekerja. Sementara yang paling sedikit adalah tenaga kerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 50,63 ribu orang atau 8,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan periode sebelumnya. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMP menunjukkan penurunan, sedangkan jumlah penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar kebawah (<=SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi (Diploma & Universitas) menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk berpendidikan SMP yang bekerja berkurang 13,74 ribu orang sementara penduduk berpendidikan SMA Umum yang bekerja mengalami penambahan terbesar yaitu 23,08 ribu orang.



Gambar 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu), Agustus 2022 - Agustus 2024

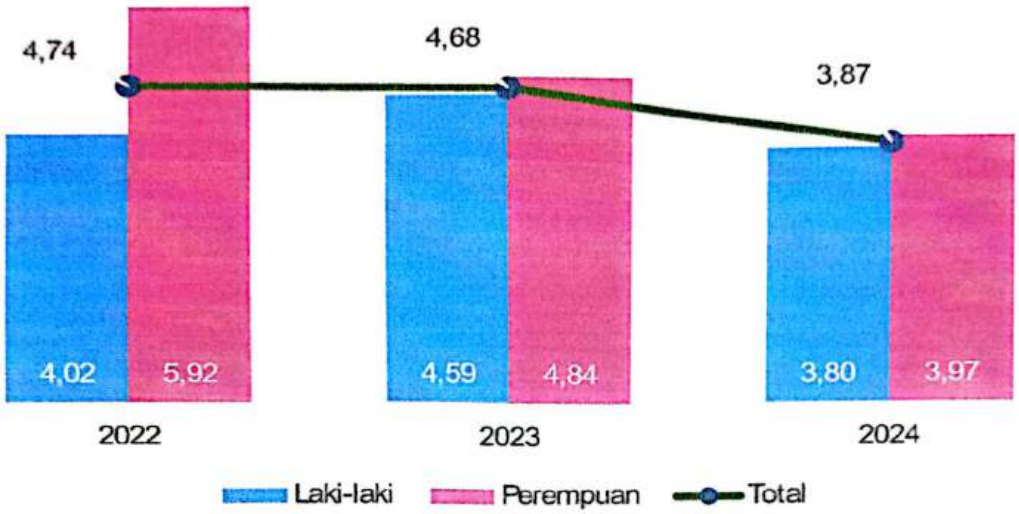
3. Karakteristik Penganggur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Dipindai dengan CamScanner

3.1. TPT Menurut Jenis Kelamin

Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu 3,97 persen berbanding 3,80 persen. TPT baik laki-laki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan 0,79 persen poin dan TPT perempuan mengalami penurunan 0,87 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

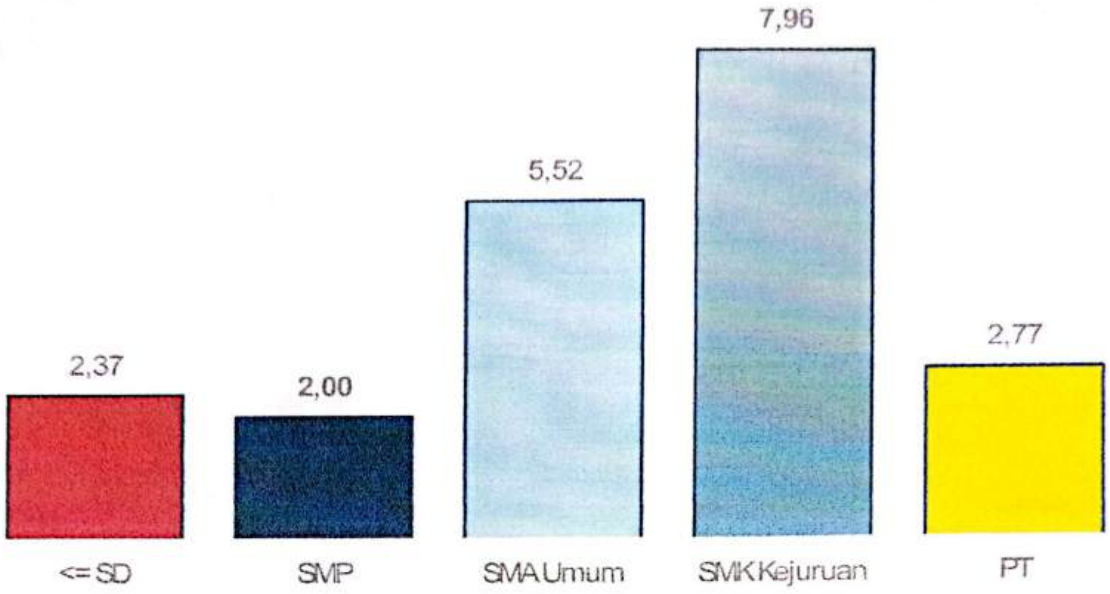


Gambar 4 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2022–Agustus 2024

3.3. TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agutus 2024, TPT lulusan SMK menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 7,96 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA sebesar 5,52 persen. Selanjutnya TPT lulusan PT (Diploma & Universitas) sebesar 2,77 persen. TPT penduduk dengan pendidikan SMP menunjukkan, memiliki persentase yang paling rendah yaitu 2 persen sedangkan TPT pendidikan SD ke bawah berada pada urutan kedua terendah sebesar 2,37 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2023 hampir semua tingkat pendidikan TPT nya turun, hanya yang berpendidikan SD ke bawah TPT nya bertambah sekitar 0,76 persen poin menjadi 2,37 persen. Terdapat pola TPT yang berbeda pada tingkat pendidikan SD kebawah, sebelumnya diketahui bahwa jumlah penduduk bekerja pada jenjang ini bertambah, tetapi disisi lain jumlah pengangguran juga bertambah yang mengakibatkan TPT pada jenjang pendidikan tersebut juga naik. Salah satu penyebab bertambahnya pengangguran pada tingkat SD kebawah adalah jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak dapat mengimbangi pertumbuhan Angkatan Kerja pada jenjang tersebut. Pada Agustus 2024, dari setiap 100 angkatan kerja berpendidikan SMP, 2 di antaranya menganggur. TPT pendidikan SMP kebawah memiliki persentase kecil dikarenakan, penduduk pada pendidikan ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2024

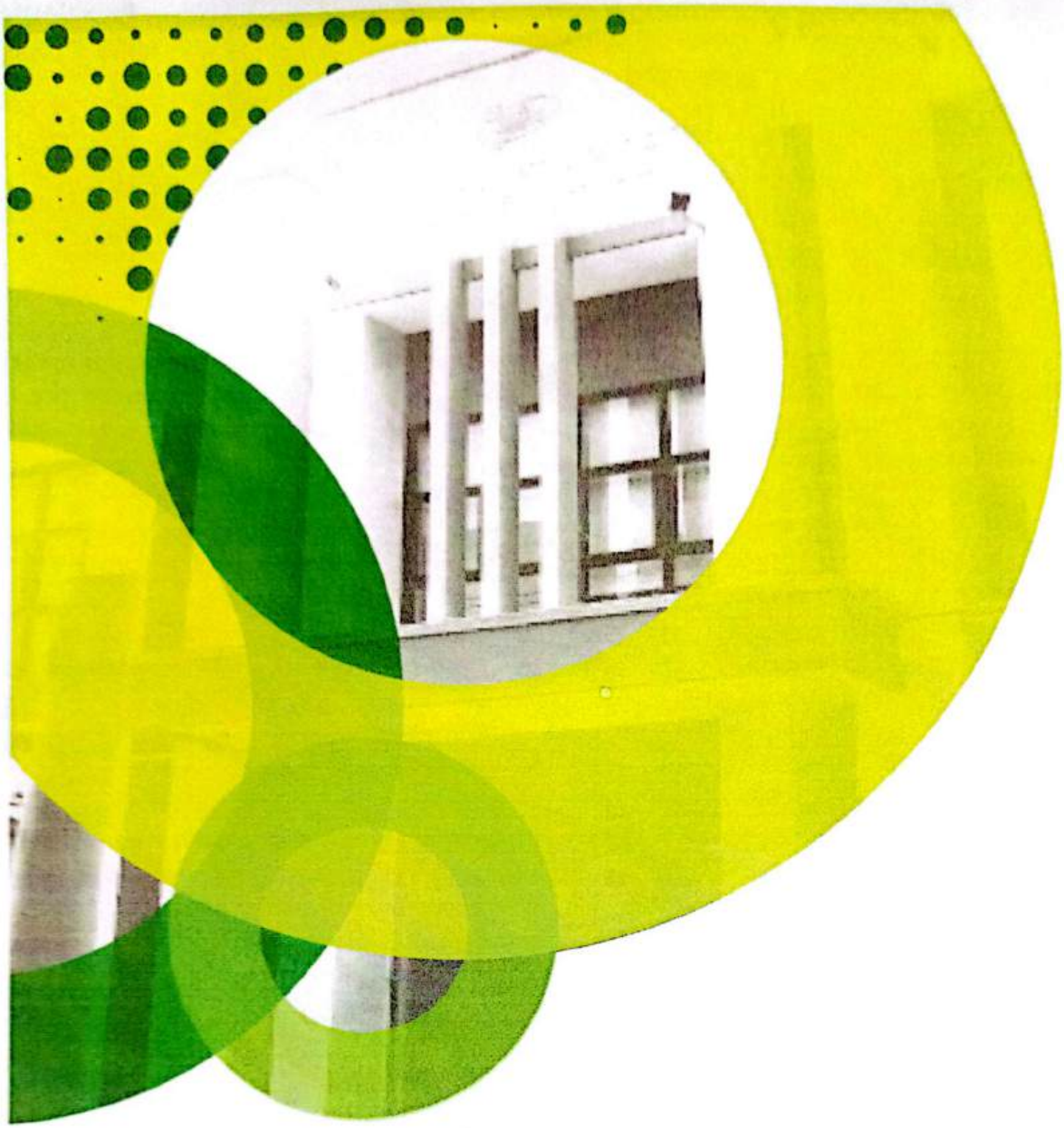
4. Isu Ketenagakerjaan di Nganjuk

Berdasarkan kondisi umum ketenagakerjaan Agustus 2024 yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian yang di antaranya: ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan, produktivitas, dan juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK.

Di Kabupaten Nganjuk, dari tahun ke tahun TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang terjun ke pasar kerja. TPT perempuan juga sedikit lebih tinggi dari TPT laki-laki, dimana pekerja perempuan masih mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, isu lain yang masih terjadi adalah TPT lulusan SMK yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya. Tingginya TPT pada lulusan SMK dan juga pada lulusan SMA, selain isu *link and match* antara kemampuan/ *skill* dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga kemungkinan besar karena karakteristik angkatan kerja pada jenjang pendidikan ini cenderung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibanding angkatan kerja pada jenjang lain. Pelaksanaan *job fair* bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena bisa mempercepat pertemuan antara pencari kerja berkemampuan khusus ini dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus tersebut. Perkembangan sektor Manufaktur di Kabupaten Nganjuk juga terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor Manufaktur. Sedangkan perkembangan sektor pertanian masih sangat dipengaruhi musim, sebagaimana pada Agustus 2024 ini terpengaruh oleh musim panen bawang merah dan cengkeh.

Dipindai dengan CamScanner



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:



Ir. Siswi Harini, M.Si.
Kepala BPS Kabupaten Nganjuk

081333411200
bps3518@bps.go.id.

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

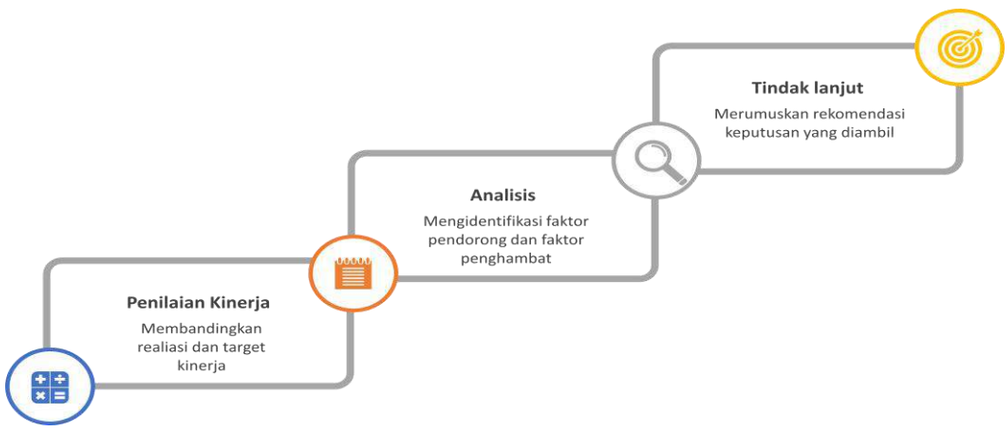
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga

Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

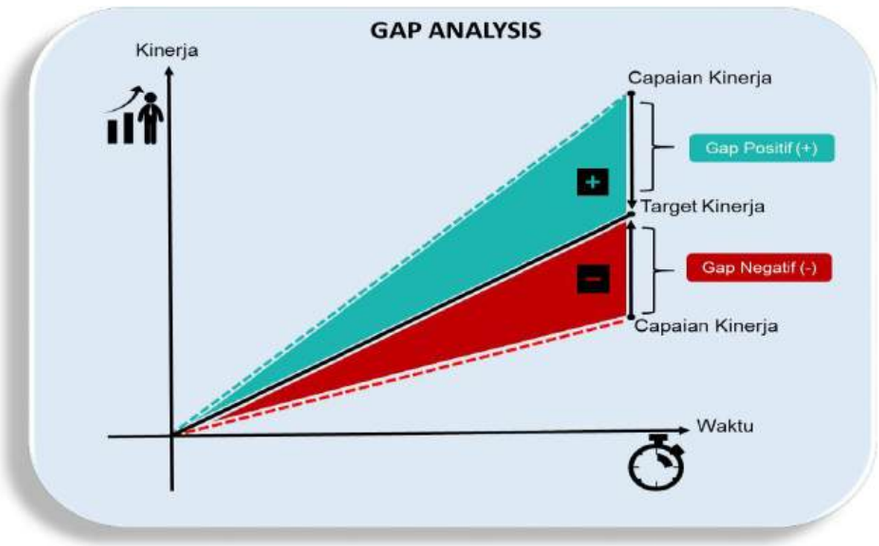
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



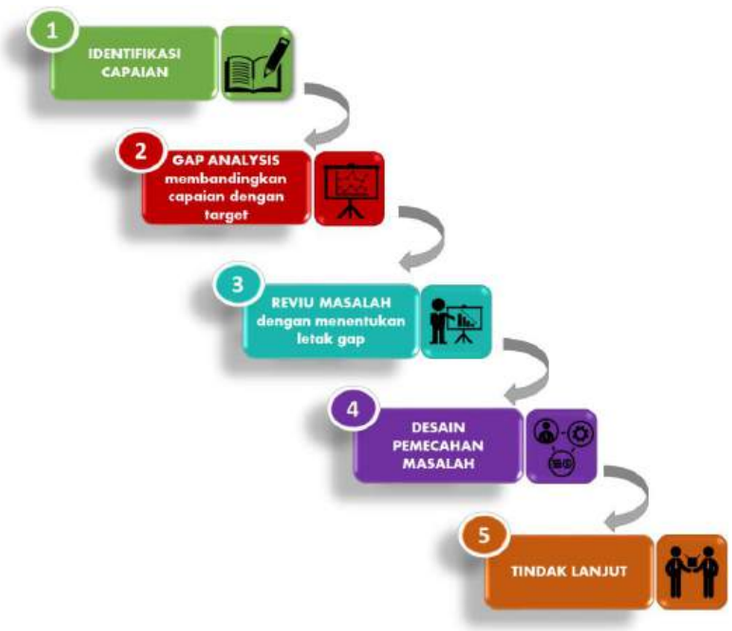
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	4,68%	99,32%
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	66,89%	92,91%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	100%	111%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja triwulan I Tahun 2024 [realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,89% dari target yang telah ditentukan sebesar 72% realiasai kinerja 92,91% data sementara dari BPS Tahun 2023 dan Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 66,89% dari targer yang telah ditentukan sebesar 83% realisasi kinerja 92,91%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 90% dengan target kinerja 100%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80,50**	0	0
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**14 laporan**	7 laporan	100%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**26 laporan**	7 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**20 dokumen**	20 dokumen	100%
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan	13 orang/bulan	100%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan	20 laporan		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						bulanan/triwulan/smesteran			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**7 dokumen**	2 paket	100%
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	1 paket		
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen		
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada**	**57 unit**		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perangkat Daerah yang disediakan**			
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	55 unit		
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit		
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit		
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**14 laporan**	3 laporan	66,67%
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	10 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit		
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	14 unit	280%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit		
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	02			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu	100%		
2	**07**	02	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja	1 dokumen		
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja	1 dokumen		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Makro	makro (RTK) yang disusun			
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**100%**	100%	100%
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	66,04%	94,34%
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 orang	1.964 orang	125,25%
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**80 %**		
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	35 lembaga		
2	**07**	03	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan		
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan		
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi**	**83%**	66,89%	92,76

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						angkatan kerja (TPAK)			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**86%**	82,04%	96,51%
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	50 orang	156,25%
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang		
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**80%**	**70%**	**100%**
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	2.700 orang	721 orang	28,84%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	100%	125%
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang**	Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	**100 perusahaan**		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	30 laporan		
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**2%**	100%	100%
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	15 perkara	0 Perkara	100%
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	30 lembaga	1 Lembaga	100%
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	Terlaksananya program jaminan social	80 orang		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan I Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja			
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	9,09%	11,36%
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**80%**	9,09%	11,36%
3	32	03	**2.01**	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi		
3	32	03	**2.01**	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	10 KK		
3	32	03	**2.01**	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 lokasi		

- Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator inedeks kepuasan masyarakat (IKM) telah terealisasi sebagai berikut :

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS TENAGA KERJA	89,51	A (Sangat Baik)	115	Sukma e-Jatim (SKM Online)	1. Sarana dan Prasarana	Unsur Sarana dan Prasarana: • Penambahan perangkat keras personal computer untuk akses Aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon
						2. Waktu Penyelesaian	Unsur Waktu Penyelesaian: • Memberikan pemahaman kepada Calon PMI maupun PPTKIS terkait kelengkapan berkas yang baik dan benar guna meminimalisir proses upload ulang.

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
						3. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan: • Tim teknis akan terus memantau kinerja layanan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan melakukan pembaruan atau perbaikan sesuai kebutuhan.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan belum terealisasi hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Darah tertinggal dan Transmigrasi hanya 1 KK.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Realisasi di tahun 2024 pada triwulan I pada indikator Jumlah Perselisihan yang Dicegah dan Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan tidak terdapat pengaduan dari Pekerja sehingga realisasi jumlah perselisihan yang dicegah adalah 0 Perkara dari target rencana aksi yang ditetapkan sejumlah 1 Perkara dan Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan dari target rencana aksi yang ditetapkan sejumlah 3 Perkara. Hal ini berarti jika jumlah perkara perselisihan yang diselesaikan maupun jumlah perselisihan yang dicegah terealisasi semakin kecil dari target maka dikatakan tercapai atau baik.

Untuk indikator Jumlah LKS Tripartit yang Dibina ditetapkan target rencana aksi sebesar 1 lembaga dan terealisasi sebesar 1 lembaga. Hal ini bisa dikatakan tercapai atau baik. Anggota LKS Tripartit pada setiap Triwulan mengadakan pembinaan ke Perusahaan guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Perusahaan.

Kemudian pada indikator Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ditetapkan target rencana aksi sebesar 10.875 orang dan terealisasi sebesar 11.159 orang. Sehingga dikatakan indikator tersebut tercapai cukup baik karena terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 3.625 orang dari triwulan IV. Namun hal ini Dinas Tenaga Kerja senantiasa tetap memberikan pemahaman yang komprehensif atas manfaat BPJS baik bagi Perusahaan maupun pekerjanya. Berupaya menggandeng stakeholder ketenagakerjaan untuk berupaya semaksimal mungkin agar semua pekerja di Kabupaten Nganjuk dapat tercover manfaat BPJS.

Realisasi keluaran subkegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota dengan indikator Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan 1 KK dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hanya 1 KK

- Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80,50**	0	0
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**25.000.000**		
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.600.000	0	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**2.742.358.000**	**152.198.406**	**5,54**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.738.206.000	152.198.406	5,55
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan	4.152.000		

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**405.220.584**	**27.668.650**	**6,82**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	7.488.284	170.000	2,27
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.235.700	4.075.150	5.14
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.955.600		
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000		
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000		
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	277.411.000	23.423.500	8,44

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	11.480.000		
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**235.578.068**		
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	44.850.000		
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	153.795.000		
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	36.932.568		
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**439.812.000**	**63.175.483**	**14,36**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.632.000	150.000	9,19
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.000000	1.610.700	3,35

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	390.180.000	61.414.783	15,7
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**634.140.300**	**5.014.800**	**0.79**
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	47.996.700	3.564.800	7,42
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157.376.100	1.450.000	0,9
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.000.000		
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	391.567.500		
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.200.000		

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu**	**126.800.000**		
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja**	**126.800.000**		
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	126.800.000		
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**1.032.241.750**	**255.527.750**	**24,75**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**948.725.750**	**246.896.250**	**26**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	948.725.750	246.896.250	26
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**66.720,000**	**8.631.500**	**12,9**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	66.720.000	8.631.500	12,9

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas**	**16.796.000**		
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	16.796.000		
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)**	**475.790.500**	**2.225.000**	**0,4**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**279.230.500**	**2.225.000**	**0,7**
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	81.892.000	2.225.000	2,7
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	197.338.500		
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**196.560.000**		

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	196.560.000		
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**456.366.050**	**1.580.900**	**0,3**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**9.351.850**	1.580.900	16
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	9.351.850	1.580.900	16
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	447.014.200		

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	268.369.200		
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	52.219.000		
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	60.060.000		
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		**11,350.000**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		**11,350.000**		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**11,350.000**		
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**11,350.000**		

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
3	32	03	**2.01**	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	2.000.000		
3	32	03	**2.01**	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	7.850.000		
3	32	03	**2.01**	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1.500.000		
						JUMLAH	**6.588.557.252**	**507.390.989**	**7,70**

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV dan
2	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi Perusahaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	setiap bulan	bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		
2	**07**	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Melakukan pendampingan dan akan menghadirkan Bank Penyalur KUR untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan terkait dengan pemanfaatan KUR untuk usaha	Permasalahan pada sub ini yaitu masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**		
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		
2	**07**	04	2.01	01	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	-	-
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		
2	**07**	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Melakukan koordinasi lanjutan dengan OPD terkait dengan kebutuhan karyawan pada	Permasalahan pada sub ini yaitu pencari kerja belum berimbang dengan kebutuhan tenaga kerja disektor industri padat karya,

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						perusahaan.	demikian juga minat pencari kerja untuk berwiraswasta masih rendah.
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**		
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	***07***	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi Perusahaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum.
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**		
3	**32**	**03**	**03**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
3	32	03	03	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Menindaklanjuti dengan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kuota yang terbatas 1 KK dari Kementerian Desa,

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan kuota pemberangkatan terbatas pada 1 KK	Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2023 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
    c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 8 April 2024

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

Tindak Lanjut

1. Sasaran : **Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**

Indikator : **Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n**

Kegiatan : Pelatihan Barbershop, Pelatihan Memasak, Pelatihan Menjahit dan Pelatihan berbasis Kompetensi

Waktu Pelaksanaan : Januari – Maret 2023

Hambatan : belum ada hambatan jika dilihat dari capaian target yang terealisasi

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.






KEGIATAN
PELATIHAN MENJAHIT

BAB I
PENDAHULUAN

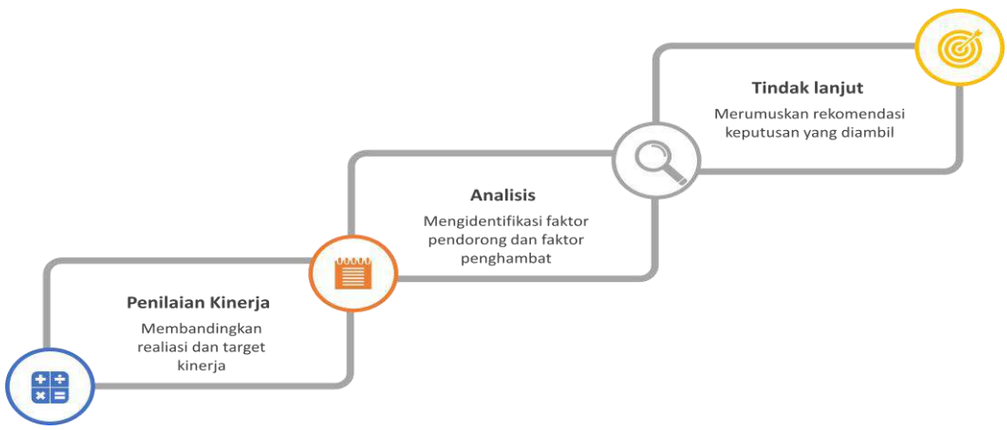
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai triwulan II melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga

Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2024.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

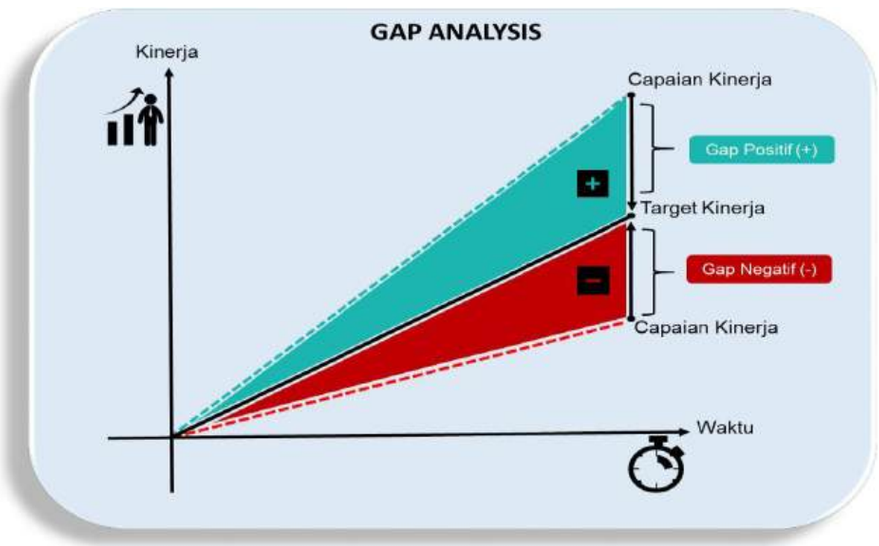
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



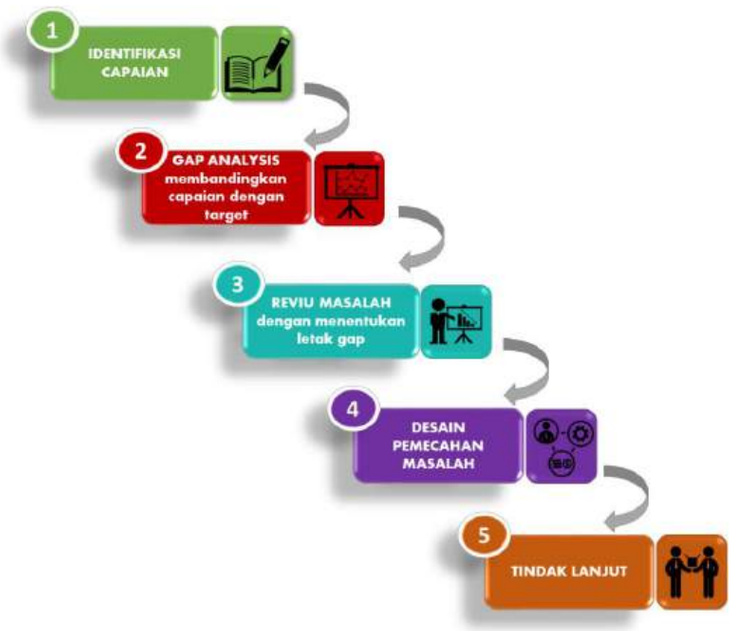
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	66,89% *	99,10%
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	51,34%	61,86%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	100%	111%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Tujuan Dinas Tenaga Kerja yaitu Meningkatnya penyerapan angkatan kerja yang mempunyai indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan untuk realisasi TPAK tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Nganjuk dikarenakan data TPAK akan dirilis pada bulan Agustus 2024 (satu tahun sekali). Jadi untuk capaian kinerja dengan indikator TPAK masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 66,89%.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada triwulan II Tahun 2024 yaitu dengan target 83% dan sudah terealisasi sebesar 51,34%. Hal ini jika diprosentase capain kinerjanya sebesar 61,86%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 90% dengan target kinerja 111%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80,50**	75,65	93,98%
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**14 laporan**	7 laporan	100%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**26 laporan**	7 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**20 dokumen**	20 dokumen	100%
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan	50 orang	100%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						bulanan/triwulan/smesteran			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**7 dokumen**	2 dokumen	28,57%
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 laporan	100%
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada**	**57 unit**		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perangkat Daerah yang disediakan**			
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	55 unit		
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit		
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	12 unit	100%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**14 laporan**	3 laporan	66,67%
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	10 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	5 unit	50%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	280%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	02			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu	100%	0	0
2	**07**	02	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja	1 dokumen	0	0
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja	1 dokumen	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Makro	makro (RTK) yang disusun			
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**100%**	30%	30%
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	39,38%	55,46%
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	780 orang	160 orang	20,51%
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**80 %**	**52,08%**	**65,1%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	35 lembaga	50 lembaga	142,86%
2	**07**	03	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan	0%	0%
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi**	**67,50%**	66,89%	80,59%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						angkatan kerja (TPAK)			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**86%**	51,34%	61,86%
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	0 orang	0%
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50 orang	25 orang	50%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**80%**	**80,39%**	**100,49%**
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	2.700 orang	1.581 orang	58,56%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	100%	125%
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja**	Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	100 perusahaan	177 perusahaan	177%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	4 laporan	1 laporan	25%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**2,50%**	0,45%	18%
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	1 perkara	1 Perkara	100%
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 Lembaga	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	14.500 orang	15.259 orang	105,23%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	0	0
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**80%**	0	0
3	32	03	**2.01**	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi	0	0
3	32	03	**2.01**	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	10 KK	0	0
3	32	03	**2.01**	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 lokasi	0	0

- Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 80,05 dan terealisasi sebesar 75,65. Sehingga persentasenya sebesar 93,98%. Hal ini berarti Dinas Tenaga Kerja memperoleh nilai dengan predikat BB.

Capaian Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100% dengan realisasi 0%. Hal ini belum mencapai target karena kegiatan masih dalam proses dengan kata lain masih pemenuhan dokumen kontrak dengan pihak ketiga yaitu CV. Atrindo Yasa Surabaya.

Capaian Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard dengan target 100% dan terealisasi sebesar 30%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pelatihan yang ditargetkan 7 macam pelatihan dan baru terealisasi 3 macam pelatihan. Tujuh macam pelatihan tersebut antara lain :

a) Pelatihan Memasak
b) Pelatihan Menjahit
c) Pelatihan Barbershop
d) Pelatihan Rias Wajah
e) Pelatihan Las
f) Pelatihan Berbasis Kompetensi

Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan untuk realisasi TPAK tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Nganjuk dikarenakan data TPAK akan dirilis pada bulan Agustus 2024 (satu tahun sekali). Jadi untuk capaian kinerja dengan indikator TPAK masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 66,89%.

Capain Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan dengan target 90% dan sudah terealisasi senesar 100%. Hal ini dipengaruhi karena belum ada perselisihan hubungan industrial yang tercatat.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan dengan target 40% dan belum terealisasi sama sekali atau dengan kata lain sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Darah tertinggal dan Transmigrasi hanya 1 KK, belum ada pemberangkatan transmigrasi dan lahan yang akan ditempati masih dalam proses pembenahan atau dapat dikatakan lahan belum siap untuk ditinggali.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Untuk analisis realisasi output atau hasil dari kegiatan dan subkegiatan dari sekretariat dalam triwulan II adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan tepat waktu antara lain :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu menghasilkan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 7 dokumen yaitu Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKJiP 2023.
2. Kegiatan administrasi keuangan yaitu menghasilkan dokumen keuangan sebanyak 6 dokumen antara lain dokumen gaji bulanan.
3. Kegiatan administrasi umum yaitu menghasilkan dokumen administrasi umum sebanyak 7 dokumen antara lain dokumen perjalanan dinas, dokumen logistik kantor, dokumen arsip, dokumen rapat, dokumen barang cetakan dan penggandaan, dokumen bahan bacaan dan dokumen rutin lainnya.
4. Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yaitu menghasilkan dokumen penunjang lainnya sebanyak 3 dokumen antara lain dokumen surat menyurat, dokumen sumberdaya air dan listrik dan dokumen pelayanan umum kantor
5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang pemerintah daerah yaitu menghasilkan barang milik daerah yang dipelihara sebanyak 21 unit antara lain kendaraan dinas jabatan, operasional lapangan, peralatan dan mesin kantor, gedung kantor dan prasarana dan prasarana kantor.
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) yaitu menghasilkan 0 dokumen. Hal ini belum mencapai target karena kegiatan masih dalam proses dengan kata lain masih pemenuhan dokumen kontrak dengan pihak ketiga yaitu CV. Atrindo Yasa Surabaya.
7. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yaitu menghasilkan 160 orang yang dilatih dalam kegiatan pelatihan.
8. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu menghasilkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 50 lembaga.
9. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil yaitu menghasilkan perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas sebanyak 0 perusahaan.
10. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan sumber daya pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui

bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi sebanyak 0 orang dan tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD sebanyak 25 orang.

11. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja menghasilkan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja sebanyak 1.581 orang.
12. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan sebanyak 1 laporan.
13. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan mencegah perselisihan sebanyak 1 perkara, pembinaan LKS Tripartit sebanyak 1 lembaga dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja sebanyak 15.259 orang.
14. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan pelaksanaan penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran sebanyak 0 lokasi, Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi sebanyak 0 KK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi lokasi transmigran sebanyak 0 lokasi. Hal ini kegiatan masih jauh dari target yang dilaksanakan karena masih menunggu kuota transmingrasi dari Kementerian Desa PDTT.

- Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**4.486.008.952**	**1.409.663.835**	**31,42%**
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**25.600.000**	**3.772.000**	**14,73%**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.600.000	3.772.000	14,73%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**2.742.358.000**	**788.362.770**	**28,75%**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.738.206.000	784.262.770	28,64%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan	4.152.000	4.100.000	98,75%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**408.520.584**	**97.312.160**	**23,82%**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	7.488.284	170.000	2,27%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.235.700	18.011.550	22,73%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.955.600	5.015.300	31,43%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000	1.100.000	45,83%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	4.180.000	37,16%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.411.000	68.835.310	24,81%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah dokumen penatausahaan arsip	11.780.000	0	0%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					SKPD	dinamis pada SKPD			
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**235.578.068**	**116.800.000**	**49,58%**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	44.850.000	0	0%
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	153.795.000	99.000.000	64,37%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	36.932.568	17.800.000	48,20%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**439.812.000**	**170.843.191**	**38,84%**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.632.000	1.110.000	68,01%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.000000	12.242.400	25,51%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	390.180.000	157.490.791	40,36%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Disediakan			
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**634.140.300**	**232.573.714**	**36,68%**
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	47.996.700	12.886.750	26,85%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157.376.100	20.403.500	12,96%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.000.000	1.496.000	4,99%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	391.567.500	197.987.464	50,56%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.200.000	0	0%
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase dokumen yang**	**126.800.000**	**0**	**0%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						diselesaikan tepat waktu			
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja**	**126.800.000**	**0**	**0%**
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	126.800.000	0	0%
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**2.558.699.950**	**489.875.000**	**19,15%**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**2.475.183.950**	**481.585.000**	**19,46%**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	2.475.183.950	481.585.000	19,46%
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**66.720,000**	**8.290.000**	**12,43%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	66.720.000	8.290.000	12,43%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi**	**16.796.000**	**0**	**0%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						peningkatan produktivitas			
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	16.796.000	0	0%
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)**	**1.362.279.450**	**121.780.000**	**8,94%**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**988.706.750**	**2.225.000**	**0,23%**
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	81.892.000	2.225.000	2,72%
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	197.338.500	0	0%
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	709.476.250	0	0%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar**	**373.572.700**	**119.555.000**	**32,00%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						kerja (IPK) online			
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	373.572.700	119.555.000	32,00%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**696.366.050**	**226.421.500**	**32,51%**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**9.351.850**	**1.650.000**	**17,64%**
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	9.351.850	1.650.000	17,64%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**687.014.200**	**224.771.500**	**32,72%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Kabupaten/Kota				
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	268.369.200	191.581.500	71,39%
					Penyelesaian perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	66.366.000	0	0%
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	52.219.000	4.390.000	8,41%
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	300.060.000	28.800.000	9,60%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang**				

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Transmigrasi				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**11,350.000**	**0**	**0%**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**11,350.000**	**0**	**0%**
3	32	03	**2.01**	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	2.000.000	0	0%
3	32	03	**2.01**	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	7.850.000	0	0%
3	32	03	**2.01**	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1.500.000	0	0%
						JUMLAH	**9.241.504.402**	**2.247.741.235**	**24,32%**

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV tahun 2024
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	kebutuhan perusahaan tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja
3	**Sasaran 2 :** Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Tidak ada perselisihan yang selesai diluar pengadilan

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dokumen RTK	masih proses dengan rekanan/pihak ketiga dengan CV. Atrindo Yasa Surabaya
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	koordinasi dengan dinas terkait untuk mencukupi data RTK	menghimpun data penyusunan RTK
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	koordinasi dengan dinas terkait untuk mencukupi data RTK	menghimpun data penyusunan RTK
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	membuka pendaftaran pelatihan secara online	Kegiatan pelatihan masih berlanjut
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	membuka pendaftaran pelatihan secara online	pendaftaran peserta yang lambat
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Pelatihan masih dalam proses pelaksanaan
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	-	-
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Akan dilaksanakan pembinaan LPK Swasta pada anggaran tahun berikutnya bagi yang belum mendaptkan pembinaan	Keterbatasan anggaran sehingga pembinaan tidak dapat mencakup seluruh jumlah LPK Swasta

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	koordinasi dengan perusahaan perusahaan yang ada	belum ada perusahaan yang melalukan konsultansi
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perencanaan kegiatan peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil akan dilaksanakan pada triwulan III	Perencanaan kegiatan konsultasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil berbenturan dengan kegiatan lainnya sehingga membutuhkan waktu melebihi yang direncanakan
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	melakukan pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja	kegiatan masih berlanjut
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	melakukan pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja	kebutuhan perusahaan tidak sesuai dengan kualifikasi pencaker
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Perencanaan kegiatan pelayanan antar kerja direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Menyelesaikan pelaksanakan pelatihan untuk penyandang	Pelatihan untuk penyandang disabilitas masih dalam proses

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						disabilitas	pelaksanaan
2	**07**	04	2.01	**0005**	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Perencanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	melalukan pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja	kebutuhan pasar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencaker
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan target sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja pada tahun berikutnya	Tidak ada hambatan untuk capaian sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	Menjaga hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha agar tetap harmonis	Tidak ada perselisihan HI yang selesai diluar pengadilan
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan	Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Perlu adanya Pembinaan Norma dan Syarat Kerja bagi Perusahaan	Masih terdapat beberapa Perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru terakit data ketenagakerjaan ke Dinas
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Selalu berkomunikasi kepada dua pihak agar penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat	Terkadang salah satu pihak tidak dapat hadir dalam proses penyelesaian perselisihan
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Perlu penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan yang tidak comply terhadap aturan ketenagakerjaan - Perlunya kesadaran Perusahaan untuk memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh - Meningkatkan partisipasi aktif pekerja dan pengusaha dalam menyampaikan problematika yang terjadi	- Sosialisasi ditujukan untuk Pengusaha agar mengetahui norma kerja pada Perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya permasalaha dengan pekerja - Kegiatan Jalan Sehat ditujukan untuk mengapresiasi pekerja/buruh di Kabupaten Nganjuk - Peserta kegiatan sarasehan kurang antusias dalam

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						dalam hubungan kerja sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis - Melaksanakan Keputusan Gubernur sebagai salah satu norma hukum yang harus dipatuhi - Melakukan monitoring ke Perusahaan-Perusahaan apakah penetapan UMK Tahun 2025 sudah diterima dan siap untuk diterapkan di Tahun 2025	menyampaikan problematika yang terjadi dalam hubungan kerja - Salah satu unsur Dewan Pengupahan tidak menyetujui hasil akhir dari keputusan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan UMK Tahun 2025 - Sosialisasi ditujukan untuk memantau apakah penetapan UMK Tahun 2025 sudah diterima dan siap untuk diterapkan di Tahun 2025
2	***07***	05	2.02	0002	Penyelesaian perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perlu pemahaman antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditujukan untuk menambah pengetahuan Perusahaan maupun pekerja/buruh dalam menyelesaikan permasalahan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							yang ada.
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Saling menjaga komunikasi antara Perusahaan dan Pemerintah terkait Peringatan Hari Buruh Internasional guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis.	Perwakilan Serikat Pekerja mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah untuk memperingati Hari Buruh Internasional salah satunya dengan mengadakan acara tabur bunga di Makam Almh. Marsinah.
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	- Perlunya penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak comply terhadap aturan ketenagakerjaan termasuk didalamnya tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan - Diperlukan pendataan secara keseluruhan terhadap para	- Pembinaan ditujukan untuk Pengusaha agar mengetahui pentingnya mendaftarkan pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap pekerjanya dapat dilindungi menggunakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdaftarkan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						petani tembakau di Wilayah Kab Nganjuk yang masuk kategori pekerja rentan	- Masih terdapat petani tembakau kategori pekerja rentan yg belum terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Masih menunggu kuota transmingrasi dari Kementerian Desa PDTT	Belum ada calon transmigran yang diberangkatkan
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	selalu koordinasi dengan Disnaker Prop. Jatim	menunggu kuota dari kementrian
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait KSAD	Belum adanya KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Kegiatan Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke lokasi direncanakan dilaksanakan pada

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							triwulan III
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Melakukan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur agar monitoring dapat segera terlaksana dalam waktu dekat	Monitoring ke lokasi transmigran dikoordinir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bersama Kab./Kota lain

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
    c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 5 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

IV.2. Tindak Lanjut

1. Program : Hubungan Industrial

1.1 Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Register pencatatan pengesahan peraturan perusahaan

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PP akan tetapi tidak melakukan pencatatan peraturan perusahaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

REGISTER PP 2024

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
1	Januari	PT. Indo Pack Printing	560/001/HIPTK-PP/411.311/2024	10 Januari 2024	10 Januari 2026
		PT. Zhanhui Jaya Indonesia	560/002/HIPTK-PP/411.311/2024	15 Januari 2024	15 Januari 2026
		CV. Cahaya Gemilang Indonesia	560/003/HIPTK-PP/411.311/2024	16 Januari 2024	16 Januari 2026
		PT. Eagle Sporting Goods Bagor	560/004/HIPTK-PP/411.311/2024	03 Januari 2024	03 Januari 2026
		PT. Eagle Sporting Goods Baron	560/005/HIPTK-PP/411.311/2024	23 Januari 2024	23 Januari 2026
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni	PT. Sumber Plast Indo	560/006/HIPTK-PP/411.311/2024	19 Juni 2024	19 Juni 2026
		PT. Limmas Anugrah Plasindo	560/007/HIPTK-PP/411.311/2024	21 Juni 2024	21 Juni 2026
		PT. Sukses Abadi Indonesia	560/008/HIPTK-PP/411.311/2024	26 Juni 2024	26 Juni 2026
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Register pendaftaran perjanjian kerja bersama

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PKB akan tetapi tidak mendaftarkan perjanjian kerja bersama ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

REGISTER PKB 2024

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desmeber				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Pendataan Sarana Hubungan Industrial

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

DATA AKUMULATIF PROFIL HUBUNGAN INDUSTRIAL
TAHUN 2024

NO	JUMLAH		2023	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Perusahaan Tercatat		220	220	220	220	220	220	220						
2	Tenaga Kerja Terdaftar		21.264	16.968	16.968	16.968	21.228	21.228	21.228						
3	Peraturan Perusahaan		23	28	28	28	28	28	31						
4	Perjanjian Kerja Bersama		7	7	7	7	7	7	7						
5	PKWT Tercatat		6.282	733	1.796	2.240	2.277	3.534	3.847						
6	LKS Bipartit		19	22	23	25	25	25	25						
7	SP/SB Tingkat Perusahaan		16	16	16	16	16	16	17						
8	Perselisihan Hubungan Industrial		0	0	0	0	0	0	0						
9	Perselisihan HI Perselisihan Diluar Pengadilan		0	0	0	0	0	0	0						
10	Mogok Kerja		0	0	0	0	0	0	0						
11	Tenaga Kerja Peserta BPJamsostek		15.568	14.263	14.263	14.263	15.259	15.259	15.259						
12	Tenaga Kerja Peserta BPJS Kesehatan														
13	PHK	Pencairan JHT	8	2	2	2	2	4	6						
		Laporan dari Perusahaan	227	9	105	110	113	117	119						

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

1.2 Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan	:	Jalan Sehat dan Sarasehan Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2024
Waktu Pelaksanaan	:	12 Mei 2024
Hambatan	:	Masih terdapat beberapa yang tidak mencatatkan perselisihan ke Dinas
Tindak Lanjut	:	Memberikan pemahaman kepada perusahaan, pekerja maupun SP/SB terkait tata cara penyelesaian perselisihan





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 13 Juni 2024
Hambatan	:	Terdapat salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Tindak Lanjut	:	Melakukan kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan HI kepada pengusaha, pekerja maupun SP/SB agar mengetahui teknisnya



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Data rekapitulasi keanggotaan SP/SB

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang seharusnya sudah memenuhi syarat untuk membentuk SP/SB akan tetapi tidak dilakukan

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

DATA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH Kab.Nganjuk Tahun 2024 (per Bulan Juni)

NO	NAMA SERIKATPEKERJA/SERIKAT BURUH	JUMLAH ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	NOMOR BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	NAMA AFILIASI FEDERASI ATAU KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH		PENGURUS SP/SB	
				FEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KETUA	SEKRETRAIS
1	Serikat Pekerja Perekebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) Pabrik Gula Lestari	260	560/001/PCT.SP/SB/411.311/2023 Tgl 06-09-2023	FSP - BUN		Totok Edi S.	Iwan Setiawan
2	SP - UK SPSI PT. JAYA KERTAS Kertosono	569	05/SP/PCT/VIII/2001 Tgl. 03-08-2001	F-SPSI NGANJUK		Harsoyo	Sutrisno
3	SP - UK Langgeng Jaya Makmur Bagor	753	12/SP/PCT/IV/2002 Tgl. 12-08-2002	FSP-RTMM SPSI NGANJUK		Rochmatin	Jumilah
4	SP - UK RTMM Perusahaan Rokok CENGKIR GADING Nganjuk	98	14/SP/PCT/III/2005 Tgl. 22-03-2005	FSP-RTMM SPSI NGANJUK		Suhartono	Handayani
5	SP - PGRI KABUPATEN NGANJUK	450	07/SP/PCT/XI/2001 Tgl. 29-11-2001	SP-PGRI PROP. JATIM		Sukotjo HS,S Pd	Sutrisno, S.Pd M.MPd
6	SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA (SPPI) DPC NGANJUK	54	01/SP/PCT/V/2001 Tgl. 21-05-2001	ASPEK INDONESIA		Robby Dwi Hermawan	Nawang Sudadi
7	Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) KPH Nganjuk	86	560/001/PCT.SP-SB/411.203/2013	DPD SP2P Jatim		Subari	Abdul Rohman
8	Serikat Karyawan (SEKAR) Perhutani KPH Nganjuk	33	560/002/PCT.SP-SB/411.203/2013 Tgl 19-04-2013	DPW Sekar Perhutani Unit II Koreg IV Jombang		Zainudin	Mariyono
9	SP - UK SPSI PT. Lotus Sukomoro.Nganjuk	900	560/003/PCT.SP SB/411.310/2020 Tgl 10-11-2020	F - SPSI Nganjuk		Dwi Hariyanto	Eko Suhartono
10	Serikat Buruh Bersatu Sejahtera Bagor	15	560/001/PCT.SP-SB /411.310/2018			Satriyo Pamungkas	M. Dzikri Fajrul Falah, S.Sos
11	SPUK-SPSI Direktorat Breeding Farm-Wonokoyo Group Jatikalen	170	560/002/PCT. SP-SB/411.310/2018 Tgl 11-06-2018	F - SPSI Nganjuk		Amirul Mutaqin,SE	Huda S
12	PK F KIKES KSBSI PT.Candra Perkasa Mandiri Group A Kecamatan Tanjunganom	170	560/001/PCT.SP-SB/411.310/2020	F. KIKES KSBSI		Atik Tri S	Feny Rio R
13	PK F KIKES KSBSI CV.Rio Karya Wood Kecamatan Ngronggot	60	560/002/PCT.SP-SB/411.310/2020	F. KIKES KSBSI		Freddy	Heny Jaya
14	SB Tingkat Perusahaan SBI (SBTP-SBI) PT. Gunawan Fajar Lengkong	380	560/001/PCT.SP-SB/411.310/2021 Tgl 14-12-2021			Joko Wahyudi	Muhamad Johan
15	Serikat Pekerja SPBS PUK PT. Sukses Abadi Indonesia Gondang	700	560/001/PCT.SP-SB/411.311/2022 Tgl 18-04-2022			Stefani Aprilia W	Tantis Qurizza
16	Pengurus Komisariat HUKATAN PT. SUKSES ABADI INDONESIA GONDANG	10	560/003/PCT.SP-SB/411.311/2022 Tgl 18-07-2022	Federasi Hukatan KSBSI Kab. Nganjuk		Safei Ricardyan	Siti Nimatus S.
17	SPBS PUK PT. Bayangkara Majapahit Sejati (BMS)	20	560/001/PCT.SP/SB/411.311/2024 Tgl 13 Juni 2024			Didik Priyanto	Daniel Noirul Qodim
18	SPBS PUK PT. Eagle Sporting Goods Plant II	13	560/002/PCT.SP/SB/411.311/2024 Tgl 08 Juli 2024			Sri Utami	Windy Ayu Wulandari

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat kerja Anggota LKS Tripartit Tahun 2024 dengan Bapak Pj. Bupati Nganjuk
Waktu Pelaksanaan	:	23 April 2024
Hambatan	:	Beberapa Perusahaan konsultasi terkait kelengkapan persyaratan baik untuk pengajuan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
Tindak Lanjut	:	Memberikan arahan serta saran kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Pembinaan Kepesertaan BPJS Tahun 2024
Waktu Pelaksanaan	:	25 Juni 2024
Hambatan	:	Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data pekerja yang terdaftar BPJS terbaru ke Dinas
Tindak Lanjut	:	Melakukan koordinasi ke perusahaan secara berkala



BAB I
PENDAHULUAN

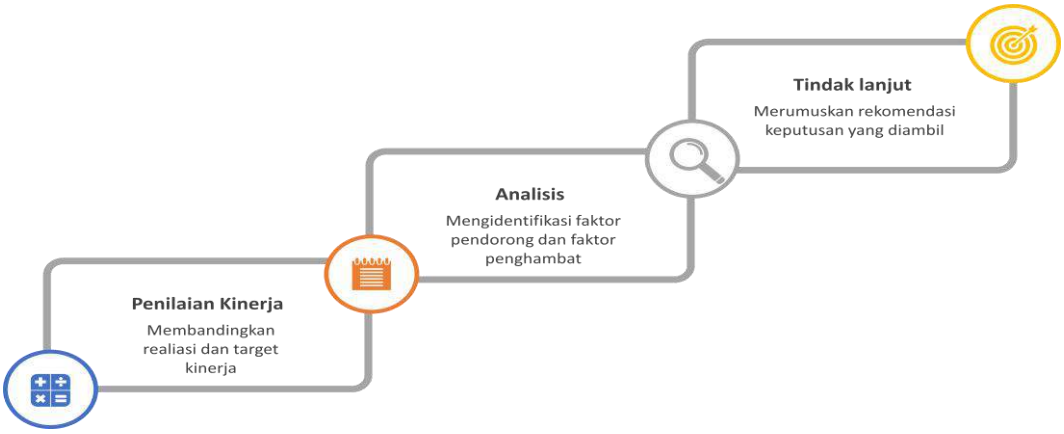
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai triwulan III melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2024.

8. Surat Edaran Nomor 900/2711/411.402/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

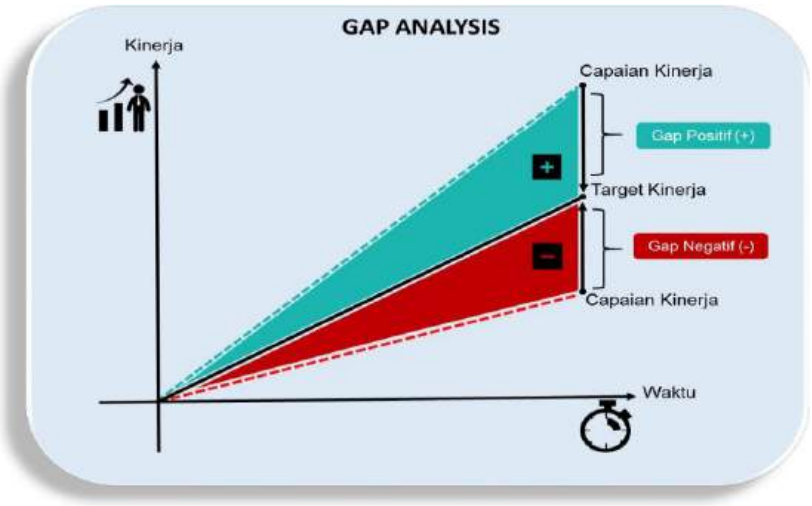
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



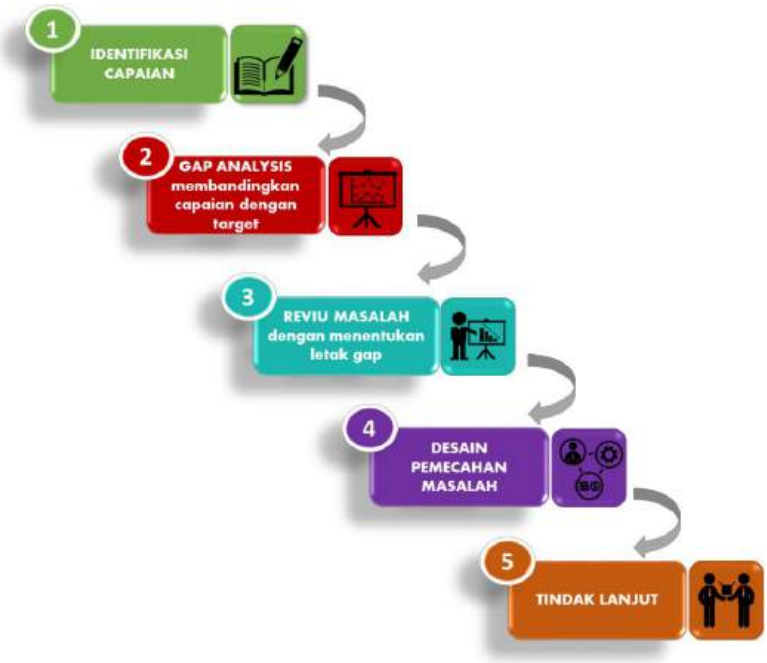
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	66,89% *	99,10%
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	51,34%	61,86%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	100%	111%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Tujuan Dinas Tenaga Kerja yaitu Meningkatnya penyerapan angkatan kerja yang mempunyai indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan untuk realisasi TPAK tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten

Nganjuk dikarenakan data TPAK akan dirilis pada bulan Desember 2024 (satu tahun sekali). Jadi untuk capaian kinerja dengan indikator TPAK masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 66,89%.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada triwulan III Tahun 2024 yaitu dengan target 83% dan sudah terealisasi sebesar 51,34%. Hal ini jika diprosentase capain kinerjanya sebesar 61,86%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 90% dengan target kinerja 111%. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan diperoleh dari formula jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan sebanyak 0 kasus dibagi jumlah perselisihan hubungan industrial tercata sebanyak 1 kasus. Sehingga diperoleh persentasenya 100%

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**-**	-	-
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**14 laporan**	**10 laporan**	**71,43%**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 laporan	10 laporan	38,46%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang**	**20 dokumen**	**20 dokumen**	**100%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						disusun			
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	216 orang	162 orang	75%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	2 laporan	2 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**7 dokumen**	**7 dokumen**	**100%**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang	1 paket	1 paket	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**57 unit**	**57 unit**	**100%**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang	55 unit	55 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						disediakan			
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	35 unit	100%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	12 unit	100%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**14 laporan**	**11 laporan**	**78,57%**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	12 laporan	9 laporan	75%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	**21 unit**	**75%**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	5 unit	50%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	5 unit	5 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Bangunan Lainnya	dipelihara/direhabilitasi			
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**0**	**0**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja**	**1 dokumen**	**0**	**0**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	0	0
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**100%**	**30%**	**30%**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara**	**71%**	**39,38%**	**55,46%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Kompetensi	**ekonomi**			
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	780 orang	160 orang	20,51%
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**80 %**	**52,08%**	**65,1%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	35 lembaga	50 lembaga	142,86%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**15 perusahaan**	**0%**	**0%**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja**	**67,50%**	**66,89%**	**99,07%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						(TPAK)			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**86%**	51,34%	59,70%
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	0 orang	0%
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50 orang	25 orang	50%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**80%**	**80,39%**	**100,49%**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	2.700 orang	1.581 orang	58,56%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan**	**Persentase Perselisihan**	**90%**	**100%**	**111%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Industrial	**Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**			
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**100 perusahaan**	**177 perusahaan**	**177%**
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	4 laporan	1 laporan	25%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**2,50%**	**0,45%**	**18%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	1 perkara	1 Perkara	100%
2	*07*	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 Lembaga	100%
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	14.500 orang	15.259 orang	105,23%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	**0**	**0**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**80%**	**0**	**0**
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi	0	0
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	10 KK	0	0
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring	4 lokasi	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan III Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						dan evaluasi			

- Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada triwulan III tidak ada karena target dan realisasi sudah di triwulan II.

Capaian Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100% dengan realisasi 0%. Hal ini belum mencapai target karena proses perencanaan kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja melampaui waktu yang diperkirakan

Capaian Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard dengan target 100% dan terealisasi sebesar 42,55%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pelatihan yang sudah dilaksanakan sebanyak 8 pelatihan tersebut antara lain :

a) Pelatihan Memasak 2 kali
b) Pelatihan Menjahit 3 kali
c) Pelatihan Barbershop 1 kali
d) Pelatihan Rias Wajah 2 kali
e) Pelatihan Berbasis Kompetensi 5 kali

Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan untuk realisasi TPAK tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Nganjuk dikarenakan data TPAK akan dirilis pada bulan Desember 2024 (satu tahun sekali). Jadi untuk capaian kinerja dengan indikator TPAK masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 66,89%.

Capain Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan dengan target 90% dan sudah terealisasi sebesar 100%. Hal ini dipengaruhi karena tidak ada perselisihan hubungan industrial yang tercatat.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan dengan target 40% dan belum terealisasi sama sekali atau dengan kata lain sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Darah tertinggal dan Transmigrasi hanya 1 KK, belum ada pemberangkatan transmigrasi dan lahan yang akan ditempati masih dalam proses pembenahan atau dapat dikatakan lahan belum siap untuk ditinggali.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Untuk analisis realisasi output atau hasil dari kegiatan dan subkegiatan dari sekretariat dalam triwulan II adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan tepat waktu antara lain :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu menghasilkan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 10 dokumen yaitu Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKjIP 2023, RKA Perubahan TA 2024, RKA Perubahan TA 2025, dan DPPA TA 2024.
2. Kegiatan administrasi keuangan yaitu menghasilkan dokumen keuangan sebanyak 9 dokumen antara lain dokumen gaji bulanan.
3. Kegiatan administrasi umum yaitu menghasilkan dokumen administrasi umum sebanyak 7 dokumen antara lain dokumen perjalanan dinas, dokumen logistik kantor, dokumen arsip, dokumen rapat, dokumen barang cetakan dan penggandaan, dokumen bahan bacaan dan dokumen rutin lainnya.
4. Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yaitu menghasilkan dokumen penunjang lainnya sebanyak 3 dokumen antara lain dokumen surat menyurat, dokumen sumberdaya air dan listrik dan dokumen pelayanan umum kantor
5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang pemerintah daerah yaitu menghasilkan barang milik daerah yang dipelihara sebanyak 21 unit antara lain kendaraan dinas jabatan, operasional lapangan, peralatan dan mesin kantor, gedung kantor dan prasarana dan prasarana kantor.
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) yaitu menghasilkan 0 dokumen. Hal ini belum mencapai target karena proses perencanaan kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja melampaui waktu yang diperkirakan

7. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yaitu menghasilkan 275 orang yang dilatih dalam kegiatan pelatihan.
8. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu menghasilkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 50 lembaga.
9. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil yaitu menghasilkan perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas sebanyak 0 perusahaan.
10. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan sumber daya pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi sebanyak 0 orang dan tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD sebanyak 25 orang.
11. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja menghasilkan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja sebanyak 1.270 orang.
12. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan sebanyak 1 laporan.
13. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan mencegah perselisihan sebanyak 1 perkara, pembinaan LKS Tripartit sebanyak 1 lembaga dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja sebanyak 15.568 orang.
14. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan pelaksanaan penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran sebanyak 0

lokasi, Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi sebanyak 0 KK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi lokasi transmigran sebanyak 0 lokasi. Hal ini kegiatan masih jauh dari target yang dilaksanakan karena masih menunggu kuota transmingrasi dari Kementerian Desa PDTT.

- Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**4.682.744.102**	**2.381.320.194**	**51%**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**25.600.000**	**8.180.000**	**32%**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.600.000	8.180.000	32%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Dokumen**	**2.626.667.000**	**1.217.364.118**	**46%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Dinas Tenaga Kerja	**administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**			
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.622.515.000	1.213.264.118	46%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4.152.000	4.100.000	98,75%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang**	**457.470.584**	**218.055.937**	**48%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						Dilaksanakan			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7.738.284	2.035.718	26%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.485.700	45.403.112	56%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.955.600	6.888.300	43%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000	1.100.000	45,83%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	11.250.000	6.430.000	57%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Tamu	Kunjungan Tamu			
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.861.000	156.198.810	48%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	11.780.000	0	0%
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**327.014.218**	**172.400.000**	**53%**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	91.003.950	42.000.000	46%
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	199.177.700	102.700.000	52%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan	Jumlah unit sarana dan	36.832.568	27.700.000	75%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**454.852.000**	**283.328.903**	**62%**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.022.000	1.350.000	45%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.000000	22.874.100	48%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.830.000	259.104.803	64%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						yang Disediakan			
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**791.140.300**	**481.991.235**	**61%**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	47.996.700	33.088.297	69%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157.376.100	52.576.475	33%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	30.000.000	2.396.000	8%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara			
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	548.567.500	390.330.464	71%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.200.000	3.600.000	50%
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu**	**126.800.000**	**3.200.000**	**3%**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen Perencanaan tenaga**	**126.800.000**	**3.200.000**	**3%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						kerja			
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	126.800.000	3.200.000	3%
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**3.569.115.500**	**1.630.904.065**	**46%**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**3.485.599.500**	**1.567.894.065**	**45%**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	3.485.599.500	1.567.894.065	45%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**66.720,000**	**48.210.000**	**72%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	66.720.000	48.210.000	72%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas**	**16.796.000**	**14.800.000**	**88%**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	16.796.000	14.800.000	88%
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)**	**1.402.179.450**	**1.061.799.750**	**76%**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja**	**Persentase pencari kerja**	**1.038.606.750**	**881.079.750**	**85%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					di Daerah Kabupaten/Kota	**terdaftar yang ditempatkan**			
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	131.792.000	2.225.000	2%
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	197.338.500	169.378.500	86%
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	709.476.250	709.476.250	100%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui**	**363.572.700**	**180.720.000**	**50%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						sistem informasi pasar kerja (IPK) online			
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	363.572.700	180.720.000	50%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**1.016.291.250**	**365.179.100**	**36%**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**9.351.850**	**4.650.900**	**50%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	9.351.850	4.650.900	50%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**1.006.939.400**	**360.528.200**	**36%**
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah perselisihan yang dicegah	268.369.200	196.104.200	73%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
					Penyelesaian perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	66.366.000	32.064.000	48%
2	*07*	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	52.219.000	35.740.000	68%
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan	Terlaksananya program	619.985.200	96.620.000	16%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja			
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**11,350.000**	**0**	**0%**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**11,350.000**	**0**	**0%**
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran	2.000.000	0	0%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Transmigrasi	yang dilaksanakan Penjajakan			
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	7.850.000	0	0%
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1.500.000	0	0%
						JUMLAH	**10.818.480.302**	**5.442.403.109**	**50%**

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV tahun 2024
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	kebutuhan perusahaan tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja
3	**Sasaran 2 :** Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Tidak ada perselisihan yang tercatat.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah pada triwulan III	Segera diselesaikan
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Permintaan data dari bidang bidang yang lambat	Selalu koordinasi dengan bidang bidang
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	setiap bulan	dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	Masih Proses	Segera diselesaikan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Daerah		
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Proses perencanaan kegiatan penyusunan rencana tenaga	Dilakukan percepatan penyusunan KAK dan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						kerja melampaui waktu yang diperkirakan	kebutuhan penunjang administrasi pengadaan jasa konsultansi RTKD
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Proses perencanaan kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja melampaui waktu yang diperkirakan	Dilakukan percepatan penyusunan KAK dan kebutuhan penunjang administrasi pengadaan jasa konsultansi RTKD
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	koordinasi dengan dinas terkait untuk mencukupi data RTK	menghimpun data penyusunan RTK
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Saat ini tidak ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini	Pelatihan masih dalam proses pelaksanaan dan masih cukup banyak masyarakat yang belum membuka usaha mandiri
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Saat ini tidak ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini	Pelatihan masih dalam proses pelaksanaan dan masih cukup banyak masyarakat yang belum

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							membuka usaha mandiri
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Pelatihan masih dalam proses pelaksanaan
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	-	-
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Akan dilaksanakan pembinaan LPK Swasta pada anggaran tahun berikutnya bagi yang belum mendaptkan pembinaan	Keterbatasan anggaran sehingga pembinaan tidak dapat mencakup seluruh jumlah LPK Swasta
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	koordinasi dengan perusahaan perusahaan yang ada	belum ada perusahaan yang melalukan konsultansi
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perencanaan kegiatan peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil akan dilaksanakan pada triwulan III	Perencanaan kegiatan konsultasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							berbenturan dengan kegiatan lainnya sehingga membutuhkan waktu melebihi yang direncanakan
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Terbatasnya lowongan kerja dibandingkan dengan pencari kerja serta tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Masih adanya perusahaan yang tidak menyampaikan laporan lowongan pekerjaan ke Dinas serta belum maksimalnya pencari kerja membekali diri dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	melakukan pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja	kebutuhan perusahaan tidak sesuai dengan kualifikasi pencaker
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan	Pelaksanaan kegiatan sesuai	Perencanaan kegiatan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Antar Kerja	dengan perencanaan	pelayanan antar kerja direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Menyelesaikan pelaksanakan pelatihan untuk penyandang disabilitas	Pelatihan untuk penyandang disabilitas masih dalam proses pelaksanaan
2	**07**	04	2.01	**0005**	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Perencanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	melalukan pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja	kebutuhan pasar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencaker
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan target sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Tidak ada hambatan untuk capaian sub kegiatan Job

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						pada tahun berikutnya	Fair/Bursa Kerja
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	Menjaga hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha agar tetap harmonis	Tidak ada perselisihan HI yang selesai diluar pengadilan
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan	Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Perlu adanya Pembinaan Norma dan Syarat Kerja bagi Perusahaan	Masih terdapat beberapa Perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru terakit data ketenagakerjaan ke Dinas
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah**	Selalu berkomunikasi kepada dua pihak agar penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat	Terkadang salah satu pihak tidak dapat hadir dalam proses penyelesaian perselisihan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Kabupaten/Kota		
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Perlu penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan yang tidak comply terhadap aturan ketenagakerjaan - Perlunya kesadaran Perusahaan untuk memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh - Meningkatkan partisipasi aktif pekerja dan pengusaha dalam menyampaikan problematika yang terjadi dalam hubungan kerja sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis - Melaksanakan Keputusan	- Sosialisasi ditujukan untuk Pengusaha agar mengetahui norma kerja pada Perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya permasalaha dengan pekerja - Kegiatan Jalan Sehat ditujukan untuk mengapresiasi pekerja/buruh di Kabupaten Nganjuk - Peserta kegiatan sarasehan kurang antusias dalam menyampaikan problematika yang terjadi dalam hubungan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						Gubernur sebagai salah satu norma hukum yang harus dipatuhi - Melakukan monitoring ke Perusahaan-Perusahaan apakah penetapan UMK Tahun 2025 sudah diterima dan siap untuk diterapkan di Tahun 2025	kerja - Salah satu unsur Dewan Pengupahan tidak menyetujui hasil akhir dari keputusan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan UMK Tahun 2025 - Sosialisasi ditujukan untuk memantau apakah penetapan UMK Tahun 2025 sudah diterima dan siap untuk diterapkan di Tahun 2025
2	***07***	05	2.02	0002	Penyelesaian perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Perlu pemahaman antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh terkait	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	ditujukan untuk menambah pengetahuan Perusahaan maupun pekerja/buruh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Saling menjaga komunikasi antara Perusahaan dan Pemerintah terkait Peringatan Hari Buruh Internasional guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis.	Perwakilan Serikat Pekerja mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah untuk memperingati Hari Buruh Internasional salah satunya dengan mengadakan acara tabur bunga di Makam Almh. Marsinah.
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	- Perlunya penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak	- Pembinaan ditujukan untuk Pengusaha agar mengetahui pentingnya

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						comply terhadap aturan ketenagakerjaan termasuk didalamnya tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan - Diperlukan pendataan secara keseluruhan terhadap para petani tembakau di Wilayah Kab Nganjuk yang masuk kategori pekerja rentan	mendaftarkan pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap pekerjanya dapat dilindungi menggunakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdaftarkan - Masih terdapat petani tembakau kategori pekerja rentan yg belum terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang**		

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Transmigrasi		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas	Kuota pemberangkatan berkurang
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	selalu koordinasi dengan Disnaker Prop. Jatim	menunggu kuota dari kementrian
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait KSAD	Belum adanya KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Kegiatan Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke lokasi direncanakan dilaksanakan pada triwulan III
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Melakukan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan	Monitoring ke lokasi transmigran dikoordinir

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						Transmigrasi Provinsi Jawa Timur agar monitoring dapat segera terlaksana dalam waktu dekat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bersama Kab./Kota lain

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 5 Oktober 2024

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaria Daerah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200
Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

IV.2. Tindak Lanjut

1. Program : Hubungan Industrial

1.1 Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Register pencatatan pengesahan peraturan perusahaan

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PP akan tetapi tidak melakukan pencatatan peraturan perusahaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

REGISTER PP 2024

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
1	Januari	PT. Indo Pack Printing	560/001/HIPTK-PP/411.311/2024	10 Januari 2024	10 Januari 2026
		PT. Zhanhui Jaya Indonesia	560/002/HIPTK-PP/411.311/2024	15 Januari 2024	15 Januari 2026
		CV. Cahaya Gemilang Indonesia	560/003/HIPTK-PP/411.311/2024	16 Januari 2024	16 Januari 2026
		PT. Eagle Sporting Goods Bagor	560/004/HIPTK-PP/411.311/2024	03 Januari 2024	03 Januari 2026
		PT. Eagle Sporting Goods Baron	560/005/HIPTK-PP/411.311/2024	23 Januari 2024	23 Januari 2026
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni	PT. Sumber Plast Indo	560/006/HIPTK-PP/411.311/2024	19 Juni 2024	19 Juni 2026
		PT. Limmas Anugrah Plasindo	560/007/HIPTK-PP/411.311/2024	21 Juni 2024	21 Juni 2026
		PT. Sukses Abadi Indonesia	560/008/HIPTK-PP/411.311/2024	26 Juni 2024	26 Juni 2026
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Register pendaftaran perjanjian kerja bersama

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PKB akan tetapi tidak mendaftarkan perjanjian kerja bersama ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

REGISTER PKB 2024

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desmeber				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Pendataan Sarana Hubungan Industrial

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

DATA AKUMULATIF PROFIL HUBUNGAN INDUSTRIAL
TAHUN 2024

NO	JUMLAH		2023	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Perusahaan Tercatat		220	220	220	220	220	220	220						
2	Tenaga Kerja Terdaftar		21.264	16.968	16.968	16.968	21.228	21.228	21.228						
3	Peraturan Perusahaan		23	28	28	28	28	28	31						
4	Perjanjian Kerja Bersama		7	7	7	7	7	7	7						
5	PKWT Tercatat		6.282	733	1.796	2.240	2.277	3.534	3.847						
6	LKS Bipartit		19	22	23	25	25	25	25						
7	SP/SB Tingkat Perusahaan		16	16	16	16	16	16	17						
8	Perselisihan Hubungan Industrial		0	0	0	0	0	0	0						
9	Perselisihan HI Perselisihan Diluar Pengadilan		0	0	0	0	0	0	0						
10	Mogok Kerja		0	0	0	0	0	0	0						
11	Tenaga Kerja Peserta BPJamsostek		15.568	14.263	14.263	14.263	15.259	15.259	15.259						
12	Tenaga Kerja Peserta BPJS Kesehatan														
13	PHK	Pencairan JHT	8	2	2	2	2	4	6						
		Laporan dari Perusahaan	227	9	105	110	113	117	119						

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

1.2 Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan	:	Jalan Sehat dan Sarasehan Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2024
Waktu Pelaksanaan	:	12 Mei 2024
Hambatan	:	Masih terdapat beberapa yang tidak mencatatkan perselisihan ke Dinas
Tindak Lanjut	:	Memberikan pemahaman kepada perusahaan, pekerja maupun SP/SB terkait tata cara penyelesaian perselisihan





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 13 Juni 2024
Hambatan	:	Terdapat salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Tindak Lanjut	:	Melakukan kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan HI kepada pengusaha, pekerja maupun SP/SB agar mengetahui teknisnya



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Data rekapitulasi keanggotaan SP/SB

Waktu Pelaksanaan : Bulan April s.d Juni Tahun 2024

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang seharusnya sudah memenuhi syarat untuk membentuk SP/SB akan tetapi tidak dilakukan

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

DATA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH Kab.Nganjuk Tahun 2024 (per Bulan Juni)

NO	NAMA SERIKATPEKERJA/SERIKAT BURUH	JUMLAH ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	NOMOR BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	NAMA AFILIASI FEDERASI ATAU KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH		PENGURUS SP/SB	
				FEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KETUA	SEKRETRAIS
1	Serikat Pekerja Perekebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) Pabrik Gula Lestari	260	560/001/PCT.SP/SB/411.311/2023 Tgl 06-09-2023	FSP - BUN		Totok Edi S.	Iwan Setiawan
2	SP - UK SPSI PT. JAYA KERTAS Kertosono	569	05/SP/PCT/VIII/2001 Tgl. 03-08-2001	F-SPSI NGANJUK		Harsoyo	Sutrisno
3	SP - UK Langgeng Jaya Makmur Bagor	753	12/SP/PCT/IV/2002 Tgl. 12-08-2002	FSP-RTMM SPSI NGANJUK		Rochmatin	Jumilah
4	SP - UK RTMM Perusahaan Rokok CENGKIR GADING Nganjuk	98	14/SP/PCT/III/2005 Tgl. 22-03-2005	FSP-RTMM SPSI NGANJUK		Suhartono	Handayani
5	SP - PGRI KABUPATEN NGANJUK	450	07/SP/PCT/XI/2001 Tgl. 29-11-2001	SP-PGRI PROP. JATIM		Sukotjo HS,S Pd	Sutrisno, S.Pd M.MPd
6	SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA (SPPI) DPC NGANJUK	54	01/SP/PCT/V/2001 Tgl. 21-05-2001	ASPEK INDONESIA		Robby Dwi Hermawan	Nawang Sudadi
7	Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) KPH Nganjuk	86	560/001/PCT.SP-SB/411.203/2013	DPD SP2P Jatim		Subari	Abdul Rohman
8	Serikat Karyawan (SEKAR) Perhutani KPH Nganjuk	33	560/002/PCT.SP-SB/411.203/2013 Tgl 19-04-2013	DPW Sekar Perhutani Unit II Koreg IV Jombang		Zainudin	Mariyono
9	SP - UK SPSI PT. Lotus Sukomoro.Nganjuk	900	560/003/PCT.SP SB/411.310/2020 Tgl 10-11-2020	F - SPSI Nganjuk		Dwi Hariyanto	Eko Suhartono
10	Serikat Buruh Bersatu Sejahtera Bagor	15	560/001/PCT.SP-SB /411.310/2018			Satriyo Pamungkas	M. Dzikri Fajrul Falah, S.Sos
11	SPUK-SPSI Direktorat Breeding Farm-Wonokoyo Group Jatikalen	170	560/002/PCT. SP-SB/411.310/2018 Tgl 11-06-2018	F - SPSI Nganjuk		Amirul Mutaqin,SE	Huda S
12	PK F KIKES KSBSI PT.Candra Perkasa Mandiri Group A Kecamatan Tanjunganom	170	560/001/PCT.SP-SB/411.310/2020	F. KIKES KSBSI		Atik Tri S	Feny Rio R
13	PK F KIKES KSBSI CV.Rio Karya Wood Kecamatan Ngronggot	60	560/002/PCT.SP-SB/411.310/2020	F. KIKES KSBSI		Freddy	Heny Jaya
14	SB Tingkat Perusahaan SBI (SBTP-SBI) PT. Gunawan Fajar Lengkong	380	560/001/PCT.SP-SB/411.310/2021 Tgl 14-12-2021			Joko Wahyudi	Muhamad Johan
15	Serikat Pekerja SPBS PUK PT. Sukses Abadi Indonesia Gondang	700	560/001/PCT.SP-SB/411.311/2022 Tgl 18-04-2022			Stefani Aprilia W	Tantis Qurizza
16	Pengurus Komisariat HUKATAN PT. SUKSES ABADI INDONESIA GONDANG	10	560/003/PCT.SP-SB/411.311/2022 Tgl 18-07-2022	Federasi Hukatan KSBSI Kab. Nganjuk		Safei Ricardyan	Siti Nimatus S.
17	SPBS PUK PT. Bayangkara Majapahit Sejati (BMS)	20	560/001/PCT.SP/SB/411.311/2024 Tgl 13 Juni 2024			Didik Priyanto	Daniel Noirul Qodim
18	SPBS PUK PT. Eagle Sporting Goods Plant II	13	560/002/PCT.SP/SB/411.311/2024 Tgl 08 Juli 2024			Sri Utami	Windy Ayu Wulandari

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200
Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program	**:**	**Hubungan Industrial**
Kegiatan	**:**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat kerja Anggota LKS Tripartit Tahun 2024 dengan Bapak Pj. Bupati Nganjuk
Waktu Pelaksanaan	:	23 April 2024
Hambatan	:	Beberapa Perusahaan konsultasi terkait kelengkapan persyaratan baik untuk pengajuan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
Tindak Lanjut	:	Memberikan arahan serta saran kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200
Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : **Hubungan Industrial**

Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Pembinaan Kepesertaan BPJS Tahun 2024
Waktu Pelaksanaan	:	25 Juni 2024
Hambatan	:	Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data pekerja yang terdaftar BPJS terbaru ke Dinas
Tindak Lanjut	:	Melakukan koordinasi ke perusahaan secara berkala



BAB I
PENDAHULUAN

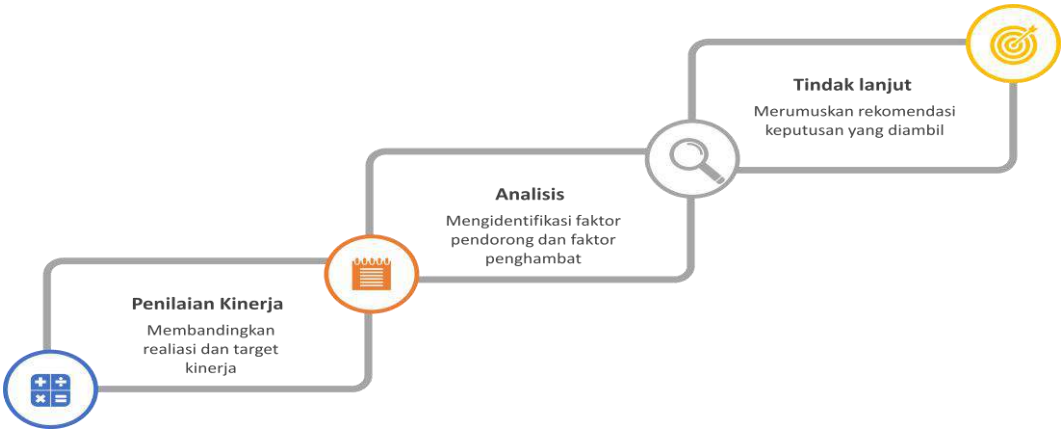
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2024.

8. Surat Edaran Nomor 900/2711/411.402/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

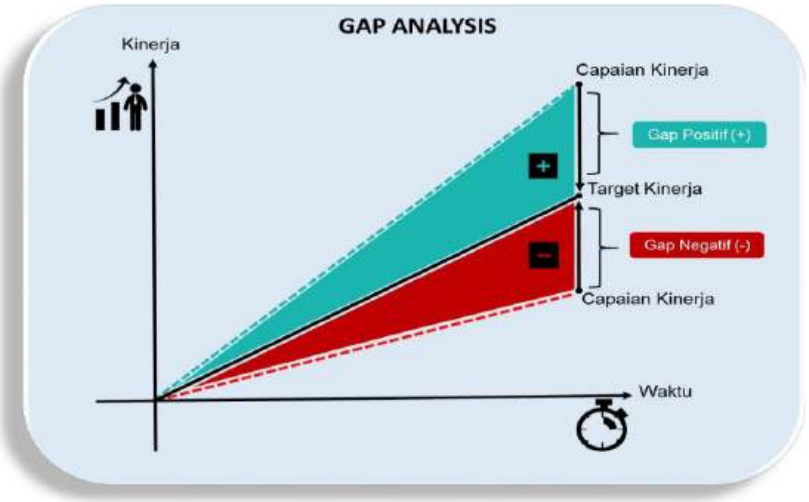
Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:



Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja

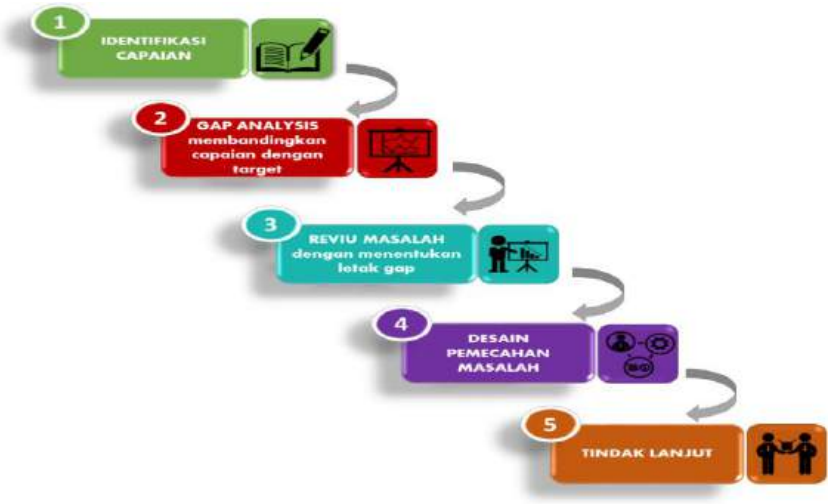
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	69,79% *	103,40%
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	29%	220,54%	760,48%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	100%	111%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

  Dalam pelaksanaan Tujuan Dinas Tenaga Kerja yaitu Meningkatnya penyerapan angkatan kerja yang mempunyai indikator Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan untuk realisasi TPAK tahun 2024 yaitu sebesar 69,79%. Sehingga besaran capaian kinerjanya mencapai 103,40%. Hal ini

didapat dari jumlah angkatan kerja sebesar 627.400 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja sebesar 898.950 orang.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada triwulan IV Tahun 2024 yaitu dengan target 83% dan sudah terealisasi sebesar 220,54%. Hal ini jika diprosentase capain kinerjanya sebesar 265,71%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 90% dengan target kinerja 100%. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan diperoleh dari formula jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan sebanyak 1 kasus dibagi jumlah perselisihan hubungan industrial tercatat sebanyak 1 kasus. Sehingga diperoleh persentasenya 100% dan capaian kinerjanya sebesar 111%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**-**	-	-
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**14 laporan**	**14 laporan**	**100%**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**20 dokumen**	**20 dokumen**	**100%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 orang	39 orang	100%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	1 laporan	1 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**7 dokumen**	**7 dokumen**	**100%**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	0 paket	0 paket	0%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	0%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	0 paket	0%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0 laporan	0%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	0 laporan	0%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0 laporan	0%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	0 dokumen	0 laporan	0%
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**102 unit**	**102 unit**	**100%**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	44 unit	44 unit	100%
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**14 laporan**	**14 laporan**	**100%**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0 laporan	0%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0 laporan	0%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	100%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	**28 unit**	**100%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	100%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	3 unit	100%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	**60,20%**	**84,79%**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	280 orang	55 orang	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Kompetensi				
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**80 %**	**50%**	**62,50%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	100 lembaga	50 lembaga	50%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**7%**	**30%**	**428,57%**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	50 perusahaan	30%
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**83%**	**73,21%**	**88,20%**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	**86%**	57,79%	67,20%
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan	60 orang	60 orang	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi			
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50 orang	50 orang	100%
2	07	04	2.01	0004	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	401 orang	401 orang	100%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**80%**	**58,60%**	**73,25%**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	400 orang	2.432 orang	608%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	**100%**	**100%**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan**	**Jumlah Perusahaan yang telah**	**100**	**177**	**177%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**perusahaan**	**perusahaan**	**perusahaan**
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	0 laporan	0 laporan	0%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**2,50%**	**0,45%**	**5,50%**
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan	Jumlah perselisihan yang	1 perkara	0 Perkara	

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dicegah			
2	*07*	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara	1 Perkara	100%
2	*07*	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	0 lembaga	0 Lembaga	0%
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	14.500 orang	15.568 orang	

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
					Pekerja	Pekerja			
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	**6,67%**	**16,67%**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	**6,67%**	**16,67%**
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	1 lokasi	1 lokasi	∞%
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota	1 KK	1 KK	∞%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan IV Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Capaian
						sampai ke lokasi			
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	1 lokasi	∞%

- Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada triwulan III tidak ada karena target dan realisasi sudah di triwulan II.

Capaian Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100% dengan realisasi 100%. Hal ini sudah mencapai target karena kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja sudah terlaksana.

Capaian Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Persentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi dengan target 100% dan terealisasi sebesar 14,29%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pelatihan yang sudah dilaksanakan sebanyak 7 pelatihan tersebut antara lain :

a) Pelatihan Menjahit
b) Pelatihan Memasak
c) Pelatihan Las
d) Pelatihan Rias Wajah
e) Pelatihan Barista
f) Pelatihan Berbasis Kompetensi di 6 Perusahaan

Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan target 83% dan sudah terealisasi sebesar 73,21% sehingga capaian kinerjanya sebesar 88,20%.

Capain Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan dengan target 90% dan sudah terealisasi sebesar 100%. Hal ini dipengaruhi karena tidak ada perselisihan hubungan industrial yang tercatat.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan dengan target 40% dan telah terealisasi sebesar 6,67%. Hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi yang didapat Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk hanya 1 KK. Penempatan transmigrasi tahun 2024 di UPT. Saluandean Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Untuk analisis realisasi output atau hasil dari kegiatan dan subkegiatan dari sekretariat dalam triwulan II adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan tepat waktu antara lain :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu menghasilkan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 14 dokumen yaitu Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKjIP 2023, RKA Perubahan TA 2024, RKA Perubahan TA 2025, dan DPPA TA 2024, Laporan Triwulan 1, Laporan Triwulan 2, Laporan Triwulan 3, dan Laporan Triwulan 4.
2. Kegiatan administrasi keuangan yaitu menghasilkan dokumen keuangan sebanyak 20 dokumen antara lain dokumen gaji bulanan.
3. Kegiatan administrasi umum yaitu menghasilkan dokumen administrasi umum sebanyak 7 dokumen antara lain dokumen perjalanan dinas, dokumen logistik kantor, dokumen arsip, dokumen rapat, dokumen barang cetakan dan penggandaan, dokumen bahan bacaan dan dokumen rutin lainnya.
4. Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yaitu menghasilkan dokumen penunjang lainnya sebanyak 14 dokumen antara lain dokumen surat menyurat, dokumen sumberdaya air dan listrik dan dokumen pelayanan umum kantor

5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang pemerintah daerah yaitu menghasilkan barang milik daerah yang dipelihara sebanyak 28 unit antara lain kendaraan dinas jabatan, operasional lapangan, peralatan dan mesin kantor, gedung kantor dan prasarana dan prasarana kantor.
6. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yaitu menghasilkan barang milik daerah yang diadakan sebanyak 102 unit antara lain pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
7. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) yaitu menghasilkan 1 dokumen.
8. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yaitu menghasilkan 440 orang yang dilatih dalam kegiatan pelatihan berbasis Masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 420 orang.
9. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu menghasilkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebanyak 0 lembaga. Hal ini dikarenakan kegiatan Pembinaan LPK Swasta sudah dilaksanakan pada triwulan II.
10. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil yaitu menghasilkan perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas sebanyak 15 perusahaan.
11. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan sumber daya pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi sebanyak 60 orang dan tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD sebanyak 50 orang, dan kegiatan perluasan kesempatan kerja sebanyak 404 orang.

12. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja menghasilkan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja sebanyak 2.432 orang.
13. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan sebanyak 1 laporan.
14. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota menyelesaikan perselisihan sebanyak 1 perkara, pembinaan LKS Tripartit sebanyak 1 lembaga dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja sebanyak 15.568 orang.
15. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan pelaksanaan penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran sebanyak 1 lokasi, Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi sebanyak 1 KK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi lokasi transmigran sebanyak 1 lokasi. Monitoring transmigrasi pemberangkatan tahun 2023 yaitu di UPT Raimuna Kawasan Mutiara Kec. Maligano Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**4.682.744.102**	**3.659.702.214**	**78,15%**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**25.600.000**	**25.580.000**	**99,92%**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.600.000	25.580.000	99,92%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**2.626.667.000**	**1.688.272.355**	**64,27%**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.622.515.000	1.684.172.355	64,22%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4.152.000	4.100.000	98,75%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian**	**457.470.584**	**406.398.741**	**88,84%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						Umum yang Dilaksanakan			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	7.738.284	7.140.415	92,27%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.485.700	66.113.312	81,13%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.955.600	12.749.200	79,90%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000	2.400.000	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	10.255.000	91,16%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.861.000	293.180.814	90,53%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	11.780.000	14.560.000	98,51%
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**327.014.218**	**310.788.950**	**95,04%**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	91.003.950	87.748.950	96,42%
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	199.177.700	194.540.000	97,67%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	36.832.568	28.500.000	77,38%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**454.852.000**	**454.383.464**	**99,90%**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.022.000	3.000.000	99,07%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.000000	47.553.464	99,07%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	403.830.000	403.830.000	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**791.140.300**	**774.278.704**	**97,87%**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	47.996.700	47.965.777	99,94%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157.376.100	144.407.973	91,76%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.000.000	29.798.000	99,33%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	548.567.500	545.106.954	99,37%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.200.000	7.000.000	97,22%
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu**	**126.800.000**	**111.288.900**	**87,77%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja**	**126.800.000**	**111.288.900**	**87,77%**
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	126.800.000	111.288.900	87,77%
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**3.569.115.500**	**3.485.123.796**	**97,65%**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**3.485.599.500**	**3.416.293.796**	**98,01%**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	3.485.599.500	3.416.293.796	98,01%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Berdasarkan Klaster Kompetensi				
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**66.720,000**	**54.030.000**	**80,98%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	66.720.000	54.030.000	80,98%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas**	**16.796.000**	**14.800.000**	**88,12%**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	16.796.000	14.800.000	88,12%
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan**	**1.702.179.450**	**1.674.948.157**	**98,40%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
						kerja (TPAK)			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**1.338.606.750**	**1.318.608.957**	**98,51%**
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	131.792.000	114.291.000	86,72%
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	197.338.500	194.878.500	98,75%
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	1.009.476.250	1.009.439.457	99,99%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**363.572.700**	**356.339.200**	**98,01%**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	363.572.700	356.339.200	98,01%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**1.016.291.250**	**935.487022**	**92%**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1**	**Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**9.351.850**	**8.850.900**	**94%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					(satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	9.351.850	8.850.900	94%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	1.006.939.400	926.636.122	**92%**
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah perselisihan yang dicegah	268.369.200	258.925.200	96%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	*07*	05	2.02	0002	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	66.366.000	64.228.000	96%
2	*07*	05	2.02	0001	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	52.219.000	48.740.000	93%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
					Kabupaten/Kota				
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	619.985.200	554.742.922	89%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**21.350.000**	**17.850.000**	**83,61**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**21.350.000**	**17.850.000**	**83,61**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
							Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	2.000.000	0	0%
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	17.850.000	17.850.000	100%
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1.500.000	0	0%
						JUMLAH	**11.118.480.302**	**9.884.400.089**	**88,90%**

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Meningkatnya pertumbuhan industri padat karya yang membuka kesempatan kerja baru termasuk didalamnya *multiplier effect* terhadap pertumbuhan tenaga kerja mandiri	Kompetensi yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Meningkatnya pertumbuhan penduduk usia produktif	Masih rendahnya etos kerja yang berdampak pada produktifitas tenaga kerja
3	**Sasaran 2 :** Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Efektifnya pemberdayaan LKS Bipartit di Perusahaan	Masih rendahnya pemahaman pekerja atas kewajiban menjaga keberlangsungan usaha

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah pada triwulan III	Segera diselesaikan
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Permintaan data dari bidang bidang yang lambat	Selalu koordinasi dengan bidang bidang
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	setiap bulan	dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	Masih Proses	Segera diselesaikan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Tidak ada kendala, kegiatan rutin dilakukan tiap bulan	-

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Daerah		
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	-
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Belum tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen RTKD (Perencanaan Tenaga Kerja)

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							masih dianggap kurang penting dalam keseluruhan dokumen Perencanaan di OPD
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Belum tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Keterbatasan anggaran sehingga penyusunan RTK hanya terbatas pada RTK Makro sedangkan untuk RTK Mikro belum teranggarkan
2	**07**	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Belum tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Kurangnya koordinasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Tingginya Tingkat turn over tenaga kerja sebagai dampak kurangnya kompetensi	Tidak seluruh pencari kerja terdaftar mendapatkan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan**	Adanya ketidak sesuaian	Tidak semua pencari kerja

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Unit Kompetensi	kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	terdaftar tercover pelatihan berdasarkan klaster kompetensi
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Terdapat peserta pelatihan yang tidak menyelesaikan kegiatan pelatihan
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							tinggi
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Tidak tersedianya data tingkat produktivitas pada Perusahaan kecil	Keterbatasan pengetahuan Perusahaan kecil terkait pengukuran produktivitas
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Tidak tersedianya data tingkat produktivitas pada Perusahaan kecil	Tidak semua peserta bimtek memahami materi yang disampaikan
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Masih banyaknya angka pengangguran	Kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih banyaknya pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan	Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Masih rendahnya kompetensi petugas antar kerja dalam penyuluhan / bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Tidak semua peserta bimtek hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Masih kurangnya fasilitasi pelayanan kepada pencari kerja disabilitas	Tidak semua peserta pasca pelatihan mampu mandiri secara ekonomi
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terbatasnya kesempatan kerja	Pencari kerja cenderung masuk didunia kerja bukan menciptakan kesempatan kerja baru dengan menjadi tenaga kerja mandiri
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Tersedianya platform digital informasi pasar kerja seperti MERGAWE maupun melalui kanal media sosial OPD	Tidak semua maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Tersedianya lowongan pekerjaan dalam jumlah yang	Terdapat perusahaan peserta job fair yang tidak

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						besar dalam satu kegiatan	menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	Efektifnya pemberdayaan LKS Bipartit di Perusahaan	Masih rendahnya pemahaman pekerja atas kewajiban menjaga keberlangsungan usaha
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Adanya regulasi yang mewajibkan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan yang memenuhi syarat	Masih banyaknya Perusahaan yang menganggap kewajiban pengesahan Peratuan Persahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap proses bisnis di Perusahaan
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Telah tersedianya aplikasi berbasis web Peta Sarana	Terdapat Perusahaan yang belum dilakukan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Hubungan Industrial (Pena HI)	pendataan terkait Sarana Hubungan Industrial
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Nganjuk termasuk ke dalam salah satu daerah yang Hubungan Industrialnya relatif kondusif dan harmonis	Masih adanya perselisihan Hubungan Industrial yang tidak selesai dengan perundingan Bipartit di Perusahaan
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Semakin mudahnya pekerja dalam mengakses pengetahuan terkait norma dan syarat kerja melalui media sosial - Peringatan Hari Buruh	- Masih adanya Perusahaan yang tidak patuh dan taat terhadap norma dan syarat kerja dengan pertimbangan kondisi keuangan Perusahaan - Masih adanya Serikat

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						International (May Day) telah ditetapkan sebagai hari libur nasional - Peringatan Hari Buruh International (May Day) telah ditetapkan sebagai hari libur nasional - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten telah ditetapkan berdasarkan permenaker No. 16 Tahun 2024	Pekerja/Serikat Buruh yang memperingati May Day dengan melakukan aksi unjuk rasa - Peserta kegiatan sarasehan kurang antusias dalam menyampaikan problematika yang terjadi dalam hubungan kerja - Salah satu unsur Dewan Pengupahan tidak menyetujui hasil akhir dari keputusan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan UMK Tahun 2025

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						- Informasi terkait Upah Minimum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 telah dapat diakses secara luas di media sosial	- Sebagian Perusahaan merasa berat dengan kenaikan 6,5%
2	***07***	05	2.02	0002	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semakin mudahnya pekerja dalam mengakses pengetahuan terkait norma dan syarat kerja melalui media sosial	Masih adanya Serikat Pekerja yang menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial dengan melakukan aksi mogok kerja dan penutupan Perusahaan
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Telah terbentuknya Lembaga Kerja Sama Tripartit.	LKS Tripartit tidak dapat merumuskan rekomendasi.
2	***07***	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	- Telah terdapat sanksi	- Perusahaan belum

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	administrasi bagi Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 - Telah terbit Instruksi Presiden No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	mengikutsertakan pekerja ke dalam program BPJS karena pertimbangan kondisi keuangan Perusahaan - Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan petani tembakau hanya selama 5 bulan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						- Telah terbit Instruksi Presiden No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	- Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Sosial Keagamaan hanya selama 4 bulan
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Pemerataan jumlah penduduk dalam suatu wilayah	Penentuan lokasi dan kuota calon transmigran dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							Tertinggal
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya persebaran penduduk	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Memastikan kesiapan Lokasi penempatan calon transigran	Tidak terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigran
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Memberikan pendampingan calon transmigrasi sampai ke Lokasi penempatan transmigran	Tidak terlaksananya pendampingan calon transmigrasi
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Memastikan Tingkat kesejahterasan transmigran pasca ditempatkan	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi

s

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 9 Januari 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Terselesaikannya Perencanaan Tenaga Kerja**

   Kegiatan : **Prosentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
Waktu Pelaksanaan	:	23 Desember 2024
Hambatan	:	*Saat ini tidak ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini*
Tindak Lanjut	:	Melaksanakan Rapat Paparan Akhir Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029







PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Sasaran** : **Meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang telah mampu mandiri secara ekonomi**

   Indikator : **Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**

Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan Menjahit, Pelatihan Las, Pelatihan Barista, Pelatihan berbasis Kompetensi)

Waktu Pelaksanaan :
- Pelatihan Menjahit : Gelombang IV 8 Oktober 2024 (DBHCHT)
- Pelatihan Las : 9 Oktober 2024 (DBHCHT)
- Pelatihan Barista : 18 Oktober 2024 (DBHCHT)
- Pelatihan berbasis Kompetensi
  1. Gelombang IX 1 Oktober 2024 (DAU)
  2. Gelombang X 2 Oktober 2024 (DAU)
  3. Gelombang XI 4 Oktober 2024 (DBHCHT)

Hambatan : Jumlah pelatihan berbasis kompetensi hanya tersisa 1 jenis pelatihan saja.

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai anggaran kas.

Pelatihan Menjahit









Pelatihan Las





Pelatihan Barista











Pelatihan berbasis Kompetensi

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Sasaran** : **Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**

   Indikator : **Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**

   Kegiatan : Bimtek Petugas Antar Kerja

   Waktu Pelaksanaan : 2 s/d 3 Desember 2024

   Hambatan : Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal.

   Tindak Lanjut : Bimtek Petugas Antar Kerja secara berkala dan berkelanjutan.





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website :
Disnaker.nganjukkab.go.id

1. Sasaran : Meningkatnya keberhasilan transmigrasi yg diberangkatkan

Indikator : Persentase tingkat keberhasilan transmigrasi yg diberangkatkan

Kegiatan : Pemberangkatan calon transmigran ke lokasi penempatan di UPT Saluandeang, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.

Waktu Pelaksanaan : 16 s/d 19 Desember 2024

Hambatan : Jumlah kuota yang penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas.

Tindak Lanjut : Menindaklanjuti dengan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk penambahan kuota.







PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Register pencatatan pengesahan peraturan perusahaan

Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PP akan tetapi tidak melakukan pencatatan peraturan perusahaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
1	Januari	PT. Indo Pack Printing	560/001/HIPTK-PP/411.311/2024	10 Januari 2024	10 Januari 2026
		PT. Zhanhui Jaya Indonesia	560/002/HIPTK-PP/411.311/2024	15 Januari 2024	15 Januari 2026
		CV. Cahaya Gemilang Indonesia	560/003/HIPTK-PP/411.311/2024	16 Januari 2024	16 Januari 2026
		PT. Eagle Sporting Goods Bagor	560/004/HIPTK-PP/411.311/2024	03 Januari 2024	03 Januari 2026
		PT. Eagle Sporting Goods Baron	560/005/HIPTK-PP/411.311/2024	23 Januari 2024	23 Januari 2026
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni	PT. Sumber Plast Indo	560/006/HIPTK-PP/411.311/2024	19 Juni 2024	19 Juni 2026
		PT. Sukses Abadi Indonesia	560/008/HIPTK-PP/411.311/2024	26 Juni 2024	26 Juni 2026
7	Juli	PT. Limmas Anugrah Plasindo	560/007/HIPTK-PP/411.311/2024	04 Juli 2024	04 Juli 2026
		PT. Trikarya Cahaya Utama	560/009/HIPTK-PP/411.311/2024	15 Juli 2024	15 Juli 2026
		PT. Sinar Jaya Prima Perkasa	560/010/HIPTK-PP/411.311/2024	24 Juli 2024	24 Juli 2026
		PT. Rimba Damai Sejahtera	560/011/HIPTK-PP/411.311/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024
8	Agustus				
9	September	PT. KBI	560/012/HIPTK-PP/411.311/2024	19 September 2024	19 September 2026
10	Oktober	PT. Capglobal Industry International (Perubahan ke-3)	560/027/HIPTK-PP/411.311/2024	03 Oktober 2024	13 Desember 2024
		PT. BPR Anjuk Ladang Perseroda	560/ 013 /HIPTK-PP/411.311/2024	08 Oktober 2024	08 Oktober 2026
		PT. LKM Artha Tanjung Mandiri	560/14/HIPTK-PP/411.311/2024	11 Oktober 2024	11 Oktober 2026
11	November	PT. Karunia Ultima Kemasan	560/015/HIPTK-PP/411.311/2024	05 November 2024	05 November 2026
12	Desember	PT. Indo Bakry Nusantara	560/016/HIPTK-PP/411.311/2024	05 Desember 2024	05 Desember 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Register pendaftaran perjanjian kerja bersama

Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024

Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PKB akan tetapi tidak mendaftarkan perjanjian kerja bersama ke Dinas

Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli	PT. Langgeng Jaya Makmur	001/Pdt.PKB/VII/2024	22 Juli 2024	22 Juli 2026
8	Agustus				
9	September	PT. Indoraya Sejahtera Group	002/Pdt.PKB/IX/2024	23 September 2024	23 September 2026
10	Oktober				
11	November				
12	Desmeber				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Pendataan Sarana Hubungan Industrial

Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

NO	JUMLAH		2023	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Perusahaan Tercatat		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
2	Tenaga Kerja Terdaftar		21.264	16.968	16.968	16.968	21.228	21.228	21.228	21.228	21.228	21.228	24.579	24.579	24.579
3	Peraturan Perusahaan		23	28	28	28	28	28	31	35	35	36	39	40	41
4	Perjanjian Kerja Bersama		7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9
5	PKWT Tercatat		6.282	733	1.796	2.240	2.277	3.534	3.847	4.789	5.672	7.877	8.941	10.046	10.392
6	LKS Bipartit		19	22	23	25	25	25	25	27	29	31	32	32	32
7	SP/SB Tingkat Perusahaan		16	16	16	16	16	16	17	20	20	21	21	21	21
8	Perselisihan Hubungan Industrial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Perselisihan HI Perselisihan Diluar Pengadilan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mogok Kerja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tenaga Kerja Peserta BPJamsostek		15.568	14.263	14.263	14.263	15.259	15.259	15.259	15.568	15.568	15.568	15.568	15.568	15.568
12	Tenaga Kerja Peserta BPJS Kesehatan														
13	PHK	Pencairan JHT	8	2	2	2	2	4	6	7	11	13	14	14	14
		Laporan dari Perusahaan	227	9	105	110	113	117	119	267	446	860	1.051	1.271	1.271

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Pemberian Iuran JKK dan JKM bagi 1.966 Petani Tembakau
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 24 Oktober 2024
Hambatan	:	Terdapat beberapa pekerja petani tembakau yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan
Tindak Lanjut	:	Melakukan kegiatan pemberian iuran JKK dan JKM bagi 1.966 petani tembakau



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Pemberian Iuran JKK dan JKM bagi 6.040 Pekerja Sosial Keagamaan
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 29 November 2024
Hambatan	:	Terdapat beberapa pekerja sosial keagamaan yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan
Tindak Lanjut	:	Melakukan kegiatan pemberian iuran JKK dan JKM bagi 6.040 Pekerja Sosial Keagamaan





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan : Data rekapitulasi keanggotaan SP/SB

Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024

Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang seharusnya sudah memenuhi syarat untuk membentuk SP/SB akan tetapi tidak dilakukan

Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

NO	NAMA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH	JUMLAH ANGGOTA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH	NOMOR BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH	NAMA AFILIASI FEDERASI ATAU KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH		PENGURUS SP/SB	
				FEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KETUA	SEKRETARIS
1	Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPGUN-SGN) Pabrik Gula Lestari	200	200/001/PCT.SP/XI/611.211/2022 Tgl 30-09-2022	FSP - GUN		Teteh Edi S.	Iwan Setiawan
2	SP - UK SPSI PT. JAVA KERTAS Kertosono	209	02/SP/PCT/VIII/2001 Tgl 03-08-2001	F-SPSI KGAR/UK		Hanasya	Suhriono
3	SP - UK Langgeng Jaya Makmur Sejati	720	12/SP/PCT/IV/2002 Tgl 22-08-2002	FSP-KTHSN SPSI KGAR/UK		Kasirmatin	Jumiati
4	SP - UK KTHSN Perusahaan Kakao CONGKOK DADING Nganjuk	90	14/SP/PCT/III/2003 Tgl 22-03-2003	FSP-KTHSN SPSI KGAR/UK		Suhartiono	Handayani
5	SP - FSPSI KABUPATEN KGAR/UK	630	07/SP/PCT/XI/2001 Tgl 29-11-2001	SP-FSPSI FKSP. JATIM		Suhaiya H.S.Pd	Suhriono, S.Pd M.MPd
6	SERIKAT PEKERJA FSPSI INDONESIA (SPFI) SPC KGAR/UK	36	01/SP/PCT/V/2001 Tgl 21-05-2001	ASPEK INDONESIA		Kelsky Dwi Hermawan	Nurung Zuaidah
7	Serikat Pekerja dan Pegawai Perkebuan (SPPP) KPN Nganjuk	80	200/001/PCT.SP-SE/611.202/2012	SPC SPPP Jatim		Sukari	Abdul Kahrman
8	Serikat Karyawan (SEKAR) Perkebuan KPN Nganjuk	22	200/002/PCT.SP-SE/611.202/2012 Tgl 19-04-2012	SPW Sekar Perkebunan Unit II Kerep/IV Tambang		Samsudin	Haryana
9	SP - UK SPSI PT. Lotus Indomarco Nganjuk	900	200/003/PCT.SP-SE/611.210/2020 Tgl 10-11-2020	F - SPSI Nganjuk		Dwi Haryanto	Eko Suhartiono
10	Serikat Buruh Bersatu Sejahtera Bagor	12	200001/PCT.SP-SE/611.3102018			Sutrisno Pamungkas	M. Zaidul Rijal, Ulum
11	SPLUK-SPSI Gudang Garam Tbk. Tarokan Wonokerto Gondang Jombang	170	200002/PCT.SP-SE/611.3102018 Tgl 11-06-2018	F - SPSI Nganjuk		Amrul Mukarja, SE	Nuzla S
12	PK F KIKES KSBSI PT.Gudang Garam Tbk Kediri Group A Kecamatan Tanjunganom	170	200001/PCT.SP-SE/611.3102020	F. KIKES KSBSI		Aldi Tri S	Fery Kus K
13	PK F KIKES KSBSI CV.Ke Karya Wood Kecamatan Nganjuk	60	200002/PCT.SP-SE/611.3102020	F. KIKES KSBSI		Freddy	Nany Jaya
14	SB Tingkat Perusahaan SBI (SBTP-SBI) PT. Gunung Tapi Lengkong	380	200001/PCT.SP-SE/611.3102021 Tgl 14-12-2021			Joko Wahyudi	Muhamad Johan
15	Serikat Pekerja SPSI PUK PT. Sukses Abadi Indonesia Gondang	700	200001/PCT.SP-SE/611.311/2022 Tgl 18-04-2022			Stefan Agnia W	Tania Quriana
16	Pengurus Komisariat MUKATAN PT. SUKSES ABADI INDONESIA GONDANG	10	200003/PCT.SP-SE/611.311/2022 Tgl 18-07-2022	Federasi Mukatan KSBSI Kab. Nganjuk		Zaka Kusnikyan	Zia Nirmala S.
17	SPBS PUK PT. Bayangkara Manggabit Sejati (BMS)	30	200001/PCT.SP-SE/611.311/2024 Tgl 13 Juni 2024			Dede Priyanto	Darul Nurul Qodim
18	SPBS PUK PT. Eagle Sporting Goods Plant II	13	200002/PCT.SP-SE/611.311/2024 Tgl 08 Juli 2024			Sri Ulami	Windy Ayu Wulandari
19	SBTP-FSBI PT. Sinar Jaya Prima Perkasa	12	200003/PCT.SP-SE/611.311/2024 Tgl 23 Juli 2024			Saifullah	Muhammad Ardiansa
20	Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) PT. Mitra	9	200004/PCT.SP-SE/611.311/2024 Tgl 23 Juli 2024			Hendrik Adi Saputra	Bayu Dwi Jumbo
21	Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan – Serikat Pekerja Indomya Sejahtera	11	200002/PCT.SP-SE/611.311/2024 Tgl 17 September 2024			Jamhuri Agung Cahyadi	Nana Nur Andah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat Kerja Anggota Dewan Pengupahan
Waktu Pelaksanaan	:	Kamis, 12 Desember 2024
Hambatan	:	Usulan UMK dikembalikan atau ditetapkan sepihak oleh Gubernur
Tindak Lanjut	:	Memberikan rekomendasi usulan UMK oleh Dewan Pengupahan kepada Gubernur.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. Program : Hubungan Industrial

Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan : Sosialisasi UMK

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 19 Desember 2024

Hambatan : Terdapat Perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan

Tindak Lanjut : Perlunya sosialisasi ke Perusahaan terkait Penetapan UMK yang mana ditetapkan sepihak oleh Gubernur



LAMPIRAN

5. IKHTISAR DPA TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

omor :

rganisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
8	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00
8	1	02	Retribusi Daerah	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	1		BELANJA OPERASI	Rp6.351.711.752,00	Rp10.495.598.652,00	Rp4.143.886.900,00	39.48
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.794.606.000,00	Rp2.699.615.000,00	[illegible]	[illegible]
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.557.105.752,00	Rp7.795.983.652,00	Rp4.238.877.900,00	54.37
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100.00
5	2		BELANJA MODAL	Rp236.845.500,00	Rp322.881.650,00	Rp86.036.150,00	26.65
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp236.845.500,00	Rp322.881.650,00	Rp86.036.150,00	26.65

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.028.499.987,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp747.352.325,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp497.440.625,00
April	Rp0,00	April	Rp2.022.128.636,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.722.407.993,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp408.448.375,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.049.055.603,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp561.836.075,00
September	Rp0,00	September	Rp1.691.819.675,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp893.288.558,00
November	Rp250.000.000,00	November	Rp111.582.325,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp86.622.125,00
Jumlah	Rp250.000.000,00	Jumlah	Rp10.818.486.302,00

Nganjuk, Tanggal 04 September 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA

SAMSUL BUDI, S.H.,M.H
NIP. 196806101992031011

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	PURWO BUJONO, S. Hut	196709121997031004	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M. Si	196805111992022001	Sekretaris	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor : DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp250.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp250.000.000
			Jumlah Pendapatan	Rp250.000.000
5	1		BELANJA OPERASI	Rp6.351.711.752
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.794.606.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.557.105.752
5	2		BELANJA MODAL	Rp236.845.500
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp236.845.500
			Jumlah Belanja	Rp6.588.557.252
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp6.338.557.252)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.028.598.570
Februari	Rp0	Februari	Rp747.352.325
Maret	Rp0	Maret	Rp496.315.625
April	Rp0	April	Rp2.069.610.866
Mei	Rp0	Mei	Rp600.946.243
Juni	Rp0	Juni	Rp180.347.925
Juli	Rp0	Juli	Rp750.497.199
Agustus	Rp0	Agustus	Rp93.382.325
September	Rp0	September	Rp102.360.325
Oktober	Rp0	Oktober	Rp329.841.399
November	Rp250.000.000	November	Rp104.857.325
Desember	Rp0	Desember	Rp84.447.125
Jumlah	Rp250.000.000	Jumlah	Rp6.588.557.252

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA

SAMSUL HUDA, S.H, M.H.
NIP. 196608101992031011

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPA/A 1/2 07.3 32 0 00 01 0000/001/2024

Organisa : 2 07.3.32 0 00 01 0000 - DINAS TENAGA KERJA
si

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja				Rp250.000.000
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp250.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp250.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp250.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp250.000.000
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) .				Rp250.000.000
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				Rp250.000.000
	:: Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
	::: Penggunaan tenaga kerja asing				
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1	Tahun	1 Tahun	Rp250 000 000
				Jumlah	Rp250.000.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp250.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp250.000.000

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA

SAMSUL HUDA, S.H, M.H.
NIP. 196608101992031011

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE.MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3	KARTIMAH, SE., M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner